GERAKAN PEMISAHAN KELANTAN (SUATU KAJIAN PERGERAKAN NASIONAL DI MALAYSIA) 1955 – 1956



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin

Oleh

ZULKEPHLI BIN MOHAMMAD No. Stb : 88 07 421 Jurusan Sejarah

UNIVERSITAS HASANUDDIN UJUNG PANDANG

1993

UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS SASTRA

HALAMAN PENGESAHAN

Berdasarkan surat tugas Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Nomor 121 /PTO4. H5. FS/C/1993, tanggal 26 Januari 1993 dengan ini kami menyatakan menerima dan menyetujui skripsi ini.

Ujung Pandang, 7 April 1993

Pembimbing Utama,

(DR. Edward Poelinggomang)

Pembantu Pembimbing,

(Drs. Suriadi Mappangara)

Disetujui untuk disampaikan kepada Panitia Ujian Skripsi.

Dekan,

u.b. Ketua Jurusan Sejarah dan Arkeologi

(Drs. Daud Limbugau S.U.)

UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS SASTRA

Pada hari ini, Rabu tanggal, 21 April 1993,
Panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik Skripsi yang
berjudul : GERAKAN PEMISAHAN KELANTAN: SUATU KAJIAN
PERGERAKAN NASIONAL DI MALAYSIA 1955-1956, yang diajukan
dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Sejarah dan
Arkeologi pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Vjung Pandang, 5 Mer 1993

Panitia Ujian Skripsi

1. Drs Sand Limbigan SU	Ketua M:
2. Der Ida S. Henen	Sekretaris
3. Des Bambang J. S.4	Anggota
A Sis Anwar Forebo, M. Hum	Anggota
5. Dr & L. Poelinggomang 6. Des Sured Happanjara	Anggota . Thomas
6. Was Street Transpargara	Anggota

"Tak seorang pun mampu menegakkan kembali otoritas kebenaran, dan setan kebatilan menang dari perenungan-perjernihan. Seorang penukil hanya mampu mendikte dan menyampaikan materi sebagaimana adanya. Tetapi persepsi kritis menyingkap kebenaran tersembunyi. Dan pengetahuan dapat menjernihkan serta memperbaiki lembaran-lembaran kebenaran, di mana persepsi kritis boleh jadi mengaplikasikannya" - Ibn Khaldun, Muqadimmah

Kupersembahkan karya ini, buat Ibunda tercinta Kamariah Haji Daud dan Ayahanda Mohammad Musa yang berkorban untuk anak-anaknya, supaya tidak tenggelam muslihat dari kehidupan

> Kini..., aku perpanjangkan harapan dan doa bonda itu buat, anakandaku Ahmad Fakhri. dan istri tersayang Noriza Abdullah.

Semoga lembaran-lembaran ini satu muqadimah menyingkap tabir pengetahuan dan membuka tatanan dan pedoman dari, sekelumit kejadian masa silam. -zm.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Masalah eksistensi kaum Melayu, kontitusi sultan dan posisi negeri bagian dalam Persekutuan Malaysia serta eksistensi kaum pendatang dalam perkembangan politik di Malaysia dewasa ini menjadi topik yang hangat dibicarakan dari berbagai kalangan baik dari dalam maupun luar negara Malaysia. Munculnya usaha pemerintah negeri bagian Kelantan pada tahun 1990 untuk menerapkan undang-undang Islam (Hukum Hudud) menjadikan pergolakan politik di Malaysia umumnya dan di Kelantan khususnya telah menarik minat penulis mengkaji dan menganalisis kegiatan dari kaca mata ilmu sejarah. Oleh itu penulis mengkaji peristiwa yang terjadi pada tahun 1955-1956 di Kelantan yaitu, Gerakan Pemisahan Kelantan sebagai objek kajian dalam menggali kazanah sejarah yang diharapkan dapat menemukan kesinambungan fakta dan kenyataan yang berlaku.

Sebagai sebuah karya tulis yang dilahirkan oleh seorang penulis yang masih dini dalam dunia penulisan tentu banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi penggalian sumber dan penganalisisan, maka segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak amat penulis harapkan.

Selama penulisan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis telah mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Penulis menyadari tanpa bantuan, kerjasama dan dorongan itu skripsi ini mungkin belum dapat terselesaikan. Sehubungan dengan itu pada kesempatan ini, sudah sewajarnyalah penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

- Bapak Prof. DR. Najamuddin M.Sc. selaku Dekan Fakultas Sastra, Universitas Hasanuddin yang telah membina penulis selama berkiprah di Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
- 2. Bapak DR. Edward Poellinggomang, M.A., sebagai Pembimbing Utama dan Drs. Suriadi Mappanggara sebagai Pembantu Pembimbing, dengan senang hati di tengahtengah kesibukannya memberi tuntunan, panduan, pengarahan, dan dorongan selama penulisan skripsi ini.
- 3. Bapak Drs. Daud Limbugau S.U. dan Dra. Ny. Ida Harun, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan, dan dosen-dosen Jurusan Sejarah; Drs. Baharuddin Batalipu, DR. Mukhlis Paeni, DR. Arlina G. Latif, Prof. Dra. Ny. Marrang P, M.S., Drs. Bambang S, M.S., Drs. Abd. Latif, Drs. Abd. Rasyid. Dra. Margareta dan seluruh staf Fakultas Sastra yang banyak membantu

- menabur budi kepada penulis selama bernaung di bumbung Universitas Hasanuddin.
- 4. Buat istri tercinta, Noriza binte Haji Abdullah yang mendampingi penulis (juga seorang mahasiswa pada jurusan yang sama di Unhas) yang penuh pengertian dan memberikan semangat, motivasi dan yang merasai susah senang hidup di rantauan, dan anakandaku Ahmad Fakhri (yang lahir Ujung Pandang), yang merupakan sumber inspirasi dan sugesti untuk ayahandamu dalam mengorak langkah menekuni ilmu di Gedung Merah'(Universitas Hasanuddin).
- 5. Kedua orang tua dan mertua penulis, ayahanda Muhammad bin Musa, Ibunda Kamariah binti Haji Daud, dan Haji Abdullah bin Awang Kechik, Hajah Som binti Kundur serta saudara-saudaraku dan ipar-iparku Ab. Shafri, Siti Zubidah, Mohd. Ab. Zubir, Zulaila, Zukarnain Zulyati dan Abang Ramli dan istri, Abang Wan Mustafa dan Kak Lah, Abang dr. Tajuddin dan Kak Nora yang serta seluruh paman-paman dan mak saudara (bapakbapak saudara) dan sepupu yang tidak sempat disebut di sini yang ditinggalkan bertahun-tahun di Malaysia oleh penulis tanpa menghiraukan rasa rindu yang melepaskan penulis menimba ilmu dirantau sini.

- Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Malaysia yang telah mengirim dan membiayai perkuliahan penulis selama berada di Universitas Hasanuddin.
- 7. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, terutama Atase Pendidikan Encik Ismail Zamzam, Sekretaris Pertama Encik Baharum Ibrahim dan seluruh staf yang memberi fotokopi bahan rujukan dan juga sering memantau dan menjadi penghubung pihak sponsor penulis.
- 8. Kepada Zakaria Bahari S.E di Univeritas Sains Malaysia, dan keluarga Hajah Thamadiah Haji Jalal yang membantu mengirimkan bahan-bahan untuk tulisan ini dari Malaysia.
- Rekan-rekan anggota Persatuan Kebangsaan Pelajar-Pelajar Malaysia di Indonesia cabang Ujung Pandang yang menjadi bagian dari keluarga selama di sini.
- Rekan-rekan seangkatan pada Jurusan Sejarah dan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Akhir sekali, segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis serahkan kepada Allah SWT untuk memberi balasan yang sebaik-baiknya. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pihak yang memerlukannya.

Ujung Pandang,

1993

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL			٠.	•	i
HALAMAN PENGESAHAN				*	ii
HALAMAN PENGESHAMN					iii
					iv
KATA PENGANTAR	• • •	•••	٠.	•	
DAFTAR ISI	• • •	• • •			/111
DAFTAR SINGKATAN	• • •			٠	хi
PETA MALAYSIA DAN LOKASI KELANTAN				.)	ciii
BAB I PENDAHULUAN					1
1.1 Latar Belakang Masalah		• • •	••	• • •	1
1.2 Batasan Masalah dan Rumusan					
Persoalan					
1.3 Metodologi	•••		••	•••	8
BAB II SELAYANG PANDANG NEGERI KELANTAN					. 11
BAB II SELAYANG PANDANG NEGERI RECENTIONS 2.1 Keadaan Geografi					. 11
2.1 Keadaan Geografi					. 16
2.2 Penduduk dan Hada Februari					. 19
2.4 Perkembangan Pendidikan					. 26
BAB III KELANTAN SEBELUM TAHUN 1955	•••				. 37
3.1 Pemerintahan Tradisional		•••	••		. 3
3.2 Birokrasi Pemerintahan Masa					

		Pemerint	ahan In	ggris			42
	3.3			Politik			
		Pemisaha	n Kelan	tan			54
	τ 4			an-Gerakan			70
	51170554	MERTS NO	53346 333	UE 00 50	59009 770		
	3.4			ahan Pulau			
		dan 19	53-1957				71
	3.4	.2 Geraka	n Pemis	ahan Johor	1955	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	74
BAB IV	GER	AKAN PEM	ISAHAN	KELANTAN			
	4.1	Jalannya	Perist	iwa			77
	4.2	Hambatan	dan Ta	ntangan			99
	4.3	Hubungan	Kelant	an dengan	Pemerinta	han	
		Pusat					103
39							
BAB V	KES	IMPULAN .	,				107
DAFTAR PL	JSTAK	Α					112
		i i					
LAMPIRAN-	-LAMP	IRAN					
Lampiran	1	Peta Neg	eri Kel	antan			
Lampiran	11	Perjanji	an Pers	ekutuan 18	996		
Lampiran	111	Surat Pe	rsekutu	an Perseti	aan Melay	u Kelant	an

Kepada Surat Kelantan Disember 1945

- Lampiran IV Perjanjian Malayan Union 1946
- Lampiran V Surat dari Persekutuan Persetiaan Melayu Kelantan Kepada Majelis Raja-Raja Melayu 13 April 1946
- Lampiran VI Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948
- Lampiran VII Undang-Undang Perlembagaan Tuboh Kerajaan
 Kelantan Tahun 1948 (Bahagian Pertama) dan
 Undang-Undang Perlembagaan Tuboh Kerajaan
 Kelantan Tahun 1955 (Bahagian Kedua)
- Lampiran VIII Silsilah Kesultanan Kelantan
- Lampiran IX Struktur Organisasi Pemerintahan Persekutuan

 Tanah Melayu dan Kelantan Tahun 1948 serta

 Struktur Pemerintahan Daerah Kelantan .
- Lampiran X Struktur Pemerintahan Kelantan Setelah Gerakan
 Pemisahan Kelantan 1955 dan Struktur Majelis
 Legislatif (*Council of State*) dan dewan Negeri
 Kelantan Berdasar Undang-Undang Tahun 19481955.

DAFTAR SINGKATAN

	그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그
AMCJA	(All Malaya Council of Joint Action atau Majelis
	Tindakan Bersama SeTanah Melayu)
API	(Angkatan Pemuda Insaf)
AWAS	(Angkatan Wanita Sadar)
BBS	(Barisan Buruh Sukarela)
BMA	(British Military Administration atau Pemerintah
	Tentara Inggris)
GPPMK	(Gabungan Persekutuan Pemuda Melayu Kelantan)
GPK	(Gerakan Pemisahan Kelantan)
HAMIM	(Hizbul Muslimin)
IMP	(Independence Malaya Party atau Partai Kemerde-
	kaan Malaya)
KMM	(Kesatuan Melayu Muda)
MCA	(Malayan Chinese Assosiation atau Persatuan Cina
	Malaya)
MIC	(Malayan Indian Congres atau Kongres India Ma-
	laya)
MOCSDA	(Malayan Overseas Chinese Self Defence Army atau
	Tentara Pertahanan Orang-orang Cina Seberang
	Laut)
MPAJA	(Malayan People Anti Japanese Assosiation atau
	Persatuan Rakyat Malayan Anti-Jepang)
MU	(Malayan Union atau Persekutuan Malaya)
PAB	(Pemuda Asuhan Berkerjasama)
PAS	(Partai Agama Islam Semalaya)
PERUPA	(Pertubuhan Rumaja Pemimpin)
PETA	(Pembela Tanah Air)
PKM	(Partai Komunis Malaya)
PKMJ	(Persatuan Kebangsaan Melayu Johor)
PKMM	(Partai Kebangsaan Melayu Malaya)
PMIP	(Pan-Malayan Islamic Party atau Partai Agama
100000	Islam seMalaya atau PAS)
PMFTU	(Pan-Malayan Federation of Trade Union)
PPP	(People's Progresif Party atau Partai Progresif
	Rakyat atau Partai Kemajuan Raykat)
PPMK	(Persekutuan Persetiaan Melayu Kelantan)
PTM	(Persekutuan Tanah Melayu)
PUTERA	(Pusat Tenaga Rakyat)
UMNO	(United Malay National Organization atau Perseri-
	katan Kebangsaan Melayu Bersatu)
	H SHET STORE

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan Tanah Melayu pada tanggal 31 Agustus 1957 bukan merupakan hadiah dari Inggris. Sejarah perjuangan orang-orang Melayu menentang kolonial Inggris sebelum dan setelah Perang Dunia Kedua menunjukkan suatu bukti sejarah bahwa kemerdekaan yang dicapai merupakan hasil perjuangan melalui perang dan kompromi. Dalam konteks sejarah pergerakan nasionalisme Tanah Melayu, perjuangan kemerdekaan itu menghadapi masalah intern yang berhubungan dengan kesatuan dan persatuan, baik antar kaum maupun antar pemerintah pusat dan negeri bagian.

Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka pada tahun 1957 terdiri atas 11 negeri bagian¹ yaitu, Perlis, Pulau Pinang, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Malaka, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan (tidak termasuk Sabah, Sarawak dan Singapura), Pernah mengalami kegon-

M. Thambirajah, Malaysia Dalam Sejarah 3, (Kuala Lumpur: Federal Publications Sdn. Bhd., 1986), hal. 42.

Z Sabah, Sarawak dan Singapura baru masuk ke dalam Malaysia pada tanggal 16 September 1963, yaitu perubahan dari Persekutuan Tanah Melayu menjadi Malaysia. Pembentukan Malaysia diumumkan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus 1963.

cangan dalam persatuan dan kesatuannya. Kegoncangan itu disebabkan oleh usaha-usaha yang dilakukan pemerintah negeri bagian untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat. Usaha-usaha tersebut akhirnya diwujudkan dalam gerakan pemisahan. Gerakan itu, dalam konteks politik dan penulisan sejarah di Malaysia, disebut gerakan penyisihan, persisihan, perpecahan atau anti penyerahan. Dalam penulisan ini digunakan istilah Gerakan Pemisahan untuk menunjuk pada pergolakan politik itu.

Gerakan pemisahan pertama muncul di Pulau Pinang pada tahun 1948-1949 dan kemudian berlanjut lagi 1953-1957 dipimpin oleh orang Cina. Gerakan yang sama muncul kemudian di Johor pada tahun 1955-1956 dipimpin oleh Sultan Johor dan di Kelantan pada tahun 1955-1956 yang diprakarsai oleh sebuah organisasi politik Melayu di wilayah itu. Di antara gerakan-gerakan itu, saya memilih untuk mengkaji gerakan yang terjadi di Kelantan, dan dalam kaitan dengan objek kajian ini akan diperhatikan juga gerakan-gerakan yang terjadi di Pulau Pinang dan Johor sebagai bahan perbandingan.

Masalah eksistensi kaum Melayu, hubungan antar orang Melayu, Cina, dan India dan juga peranan organisasi yang terlibat dalam Gerakan Pemisahan Kelantan merupa-

Joginder Singh Jessy, Sejarah Asia Tenggara 1824-1965, (Kedah: Penerbitan Darulaman, 1986), hal. 428-429.

kan fenomena dari warna sejarah pergerakan nasional di Tanah Melayu sebelum merdeka. Gerakan Pemisahan Kelantan merupakan titik awal hubungan renggang antar pemerintah pusat dan negeri ini yang berkelanjutan hingga sekarang, walaupun pada kenyataannya, Kelantan tidak terpisah dari Tanah Melayu atau Malaysia seperti yang terjadi dengan Singapura pada tanggal 9 Agustus 1965, 4 tetapi secara struktur pemerintahannya, Kelantan diperintah oleh sebuah partai oposisi yang bergiat secara otonom selama dua periode yaitu: pertama selama 18 tahun (1959-1977) dan kedua mulai tahun 1990 hingga sekarang. Hal ini mendorong keingintahuan penulis dalam menelusuri latar belakang hubungan yang terjadi sebelumnya.

Pada umumnya, masyarakat Kelantan masih kuat dengan ikatan tradisional (kepatuhan rakyat terhadap sultan) dan ikatan agama (ketaatan terhadap ajaran agama Islam). Namun terdapat juga kondisi yang unik dalam kehidupan masyarakat ini. Kondisi tersebut diungkap oleh Frank Swettenham dalam karangannya yang memuat kesan-kesannya selama mengunjungi daerah ini. Sa mengatakan tentang kondisi dan ideologi masyarakat Kelantan bahwa:

"Masyarakat di daerah ini memiliki adat-istiadat yang sangat khas, di mana pada daerah tersebut

⁴ M. Thambirajah, op. cit., hal. 65.

Frank Swettenham adalah residen Inggris di negeri bagian Selangor dari tahun 1883 sampai dengan 1889.

dapat dikatakan bahwa mereka penganut Agama Islam [ajaran Nabi Muhammad SAW], kaum wanitanya melakukan kegiatan sebebas yang dilakukan oleh kaum lakilaki."⁶

Kutipan ini memberikan keterangan tentang data kehidupan keislaman pada masyarakat itu berlangsung tanpa menyisihkan adat-istiadat sebelumnya. Gambaran tentang kondisi sosio-politik dan sosio-ekonomi secara terperinci akan dibahaskan kemudian. Juga gambaran tentang geografis, penduduk dan mata pencaharian, agama, pendidikan, ekonomi, dan birokrasi pemerintahan karena faktorfaktor ini merupakan kondisi yang membentuk suatu proses terjadinya dinamika dalam masyarakat untuk memperjuangkan gagasan-gagasan mereka, termasuk gerakan pemisahan.

Pada satu sisi Gerakan Pemisahan Kelantan 1955-1956 adalah suatu usaha mengagalkan kemerdekaan Malaysia, dan pada sisi lain gerakan ini merupakan suatu kesadaran politik masyarakat Melayu negeri ini. Kesadaran tentang masalah eksistensi kaum Melayu dalam susunan pemerintah-

⁶ Alias Mohamed, Kelantan Under PAS, The Problems of Land Development and Corruption, (Kuala Lumpur: Insular Publishing House, 1983), hal. 25. Teks asli dari kutipan adalah: "The people of this place have certain peculiar customs, of which it may be mentioned that thought they are Muhamadans, the women move about as freely as the men."

an, hak istimewa sebagai pribumi dan masa depannya, dan juga penentuan bentuk undang-undang dasar untuk menjadi landasan pemerintahan setelah merdeka.

Dalam warna sejarah pergerakan nasional di Malaysia khususnya, telah muncul partai-partai yang mewakili perjuangan dan inspirasi setiap kaum yang ada di Tanah Melayu. Orang-orang Melayu telah membentuk partai United Malays National Organization (Perserikatan Organisasi Kebangsaan Melayu, disingkat UMNO), orang-orang Cina dengan partai Malayan Chinese Association (Persatuan Cina Malaya, disingkat MCA) dan orang-orang India dengan partai Malayan Indian Congres (Kongres atau Perkumpulan India Malaya, disingkat MIC). Partai-partai ini terbentuk setelah Inggris menerapkan bentuk pemerintahan Malayan Union (Persekutuan Malaya, disingkat MU) pada tanggal 1 April 1946.

Semangat nasionalisme di Kelantan yang ekstrem yang berlandaskan pada agama dan kesetiaan kepada sultan merupakan dua aspek yang mewarnai perkembangan pergerakan nasional di negeri ini. Meskipun demikian, akibat isu yang hangat di tahun 1948-1957 adalah kemerdekaan, maka cita-cita gerakan pemisahan tenggelam dalam lipatan sejarah Malaysia. Oleh karena itu, Gerakan Pemisahan Kelantan kurang dikenal sehingga diabaikan dan dipandang tidak penting.

Walaupun demikian, bila dikaji perkembangan politik di Kelantan sekarang - tampaknya partai oposisi yang memperjuangkan otonomi penuh dalam pemerintahan - tampak bahwa gagasan gerakan itu masih terus bergema. Kenyataan ini juga merupakan motivasi yang mendorong bagi pengkajian ini. Dengan demikian kajian ini diharapkan dapat menjawab masalah sebab akibat dari terjadinya gerakan itu dan gambaran yang dapat menjelaskan perkembangan politik di wilayah pemerintahan itu.

1.2 Batasan Masalah dan Rumusan Persoalan

Pusat perhatian kajian ini adalah bentuk dan pengaruh dari Gerakan Pemisahan Kelantan sebagai satu unit
dari sejarah pergerakan nasional di Malaysia. Dikatakan
"satu unit" karena peristiwa itu terjadi di salah satu
bagian dari wilayah pemerintah yang luas, sehingga merupakan satu bagian dari keseluruhan riwayat masa lampau
pergerakan nasional Malaysia. Gerakan ini juga adalah
suatu penjelmaan cita-cita masyarakat Kelantan dalam
rangka memperjuangkan nasib hidup mereka. Dikatakan
gerakan ini timbul karena untuk melindungi hak-hak orang
Melayu dari usaha-usaha untuk mengalihkan ke tangan
penduduk bukan Melayu. 7

⁷ Joginder Singh Jessy, op. cit., hal. 430.

Tulisan ini memberi batasan temporal pada tahun 1955 sampai dengan 1956. Batasan temporal ini merujuk pada usia Gerakan Pemisahan Kelantan. Walaupun demikian, batas waktu ini bukanlah batas mutlak dalam menganalisis suatu proses peristiwa sejarah yang menyangkut perkembangan dan dinamika dari tindakan manusia dalam kehidupannya. Hal ini diungkap juga oleh Sartono sebagai berikut:

"Konsep proses politik yang diperluaskan serta dianalisis atas pelbagai unsur dan dimensinya akan menunjukkan bahwa politik sangat ditentukan oleh sikap dan kelakuan politik yang pada hakikatnya multidimensional kultur, religi, dan lain sebagainya Hasil yang diharapkan akan memberi gambaran yang lebih bulat dan relief yang dalam di satu pihak, di pihak lain memberi eksplanasi yang lebih mendalam"

Sesuatu peristiwa terjadi pasti mempunyai latar belakang, dan kondisi-kondisi yang ada jauh sebelumnya. Latar belakang dan kondisi tersebut mencakupi masalah politik, ekonomi dan sosial yang merupakan faktor-faktor tidak langsung atau gejala-gejala terjadi suatu dinamika dalam masyarakat. Gejala-gejala tersebut pada suatu ketika akan muncul ke permukaan yang didukung oleh faktor-faktor semasa (langsung) yang ada. Hal ini dijelas-kan oleh Montesque dalam Consideration on Romans and of thier Rise and Decline sebagai berikut:

⁸ Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah, (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), hal. 47.

"...telah mengambil sebagai titik-tolaknya prinsip -prinsip bahwa terdapat sebab-musabab umum, yang bersifat akhlak ataupun fizikal, yang berperanan dalam setiap kerajaan beraja, mengangkatnya, menge-kalkannya, menjatuhnya dan bahawa semua yang berla-ku adalah tertakluk kepada sebab-musabab ini"

Oleh itu kondisi sosio-politik Kelantan sebelum tahun 1955 adalah merupakan latar belakang yang perlu ditelusuri bagi menemukan kesinambungan fakta dan kenyataan yang ada. Kondisi-kondisi politik, ekonomi dan sosial masyarakat Kelantan akan lebih mengarahkan lagi pokok-pokok persoalan kajian ini. Dalam hubungan ini, perhatian diarahkan untuk mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya Gerakan Pemisahan Kelantan 1955-1956, dan organisasi yang terlibat secara mikro dan makro dan juga hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar pemerintah Kelantan dan pemerintah pusat.

1.3 Metodologí

Adapun perhatian penulis dalam menjelaskan permasalahan ini adalah pada sisi sosio-politik secara mikro dan
makro. Gerakan Pemisahan Kelantan disoroti dalam konteks
proses sejarah dengan kerangka pikir yang konseptual dan
teoritis berdasarkan pendekatan sosiologi dan politikologi. Pendekatan sosiologi yang meneropong dari aspek-

⁹ E.H. Carr, Apakah Sejarah, terj. Abdul Rahman Haji Ismail, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1984), hal. 94.

"...telah mengambil sebagai titik-tolaknya prinsip -prinsip bahwa terdapat sebab-musabab umum, yang bersifat akhlak ataupun fizikal, yang berperanan dalam setiap kerajaan beraja, mengangkatnya, menge-kalkannya, menjatuhnya dan bahawa semua yang berla-ku adalah tertakluk kepada sebab-musabab ini"

Oleh itu kondisi sosio-politik Kelantan sebelum tahun 1955 adalah merupakan latar belakang yang perlu ditelusuri bagi menemukan kesinambungan fakta dan kenyataan yang ada. Kondisi-kondisi politik, ekonomi dan sosial masyarakat Kelantan akan lebih mengarahkan lagi pokok-pokok persoalan kajian ini. Dalam hubungan ini, perhatian diarahkan untuk mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya Gerakan Pemisahan Kelantan 1955-1956, dan organisasi yang terlibat secara mikro dan makro dan juga hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar pemerintah Kelantan dan pemerintah pusat.

1.3 Metodologi

Adapun perhatian penulis dalam menjelaskan permasalahan ini adalah pada sisi sosio-politik secara mikro dan
makro. Gerakan Pemisahan Kelantan disoroti dalam konteks
proses sejarah dengan kerangka pikir yang konseptual dan
teoritis berdasarkan pendekatan sosiologi dan politikologi. Pendekatan sosiologi yang meneropong dari aspek-

⁹ E.H. Carr, Apakah Sejarah, terj. Abdul Rahman Haji Ismail, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1984), hal. 94.

aspek sosial, peranan golongan, nilai, interaksi, konflik, ideologi dan sebagainya. Dengan menggunakan
pendekatan ini, maka gerakan tersebut dapat diungkapkan
dimensi yang cukup berpengaruh dalam melihat suatu proses
dan perkembangan yang terjadi.

Manakala pendekatan politikologis yang menyorot aspek-aspek kekuasaan, struktur, organisasi, peranan organisasi politik, jenis kepemimpinan, hirarki sosial dan lain sebagainya yang merupakan seperangkat alat analitis yang digunakan. Hal ini dijelaskankan oleh Sartono sebagai berikut:

"Proses politik terjadi senantiasa dalam kerangka struktural kekuasaan, seperti struktural kekuasaan atau jaringan hubungan sosial yang, menghasilkan kekuatan sosial. Dalam hal ini sangat relevan menelaah kehidupan sosial antara golongan sosial, terutama dalam konteks kepentingan, sistem sosial, ideologi serta sistem nilainya".

Dengan menggunakan acuan pemikiran¹² tersebut maka penulisan ini membicarakan tentang eksistensi kaum Melayu yang bersaing dengan kaum Cina dan India di Kelantan pada khususnya dan di Malaysia pada umumnya, sebagai

¹⁰ Sartono Kartodirdjo, op. cit., hal. 229.

¹¹ Ibid., hal. 167.

¹² Ini dapat dikatakan satu bentuk pemikiran tentang nasionalisme yang dinyatakan oleh H. Kohn sebagai berikut; "Nasionalisme adalah suatu state of mind, jadi berarti bahwa sejarah pergerakan nasional terutama harus dianggap sebagai history of idea". Sartono op. cit., hal. 229.

salah satu pokok permasalahan yang dikaji. Sehubungan dengan itu untuk melihat keutuhan sebuah penulisan sejarah yang mengkaji suatu proses yang pernah terjadi, maka penulis memakai gagasan Hegel¹³ yang diungkapkan dalam pertanyaannya sebagai berikut:

- Irama atau pola macam apa dapat kita amati dalam proses sejarah?
- 2. Mana 'motor' yang menggerakan proses sejarah?
- Apa sasaran terakhir yang dituju oleh proses sejarah?¹⁴

Berdasarkan pada acuan di atas, maka Gerakan Pemisahan Kelantan coba dilihat dalam pola dari proses pergerakan nasional di Malaysia, mengungkapkan dan menjelaskan motor atau ideologi yang menggerakkan gerakan pemisahan itu dan sasaran yang ditujunya.

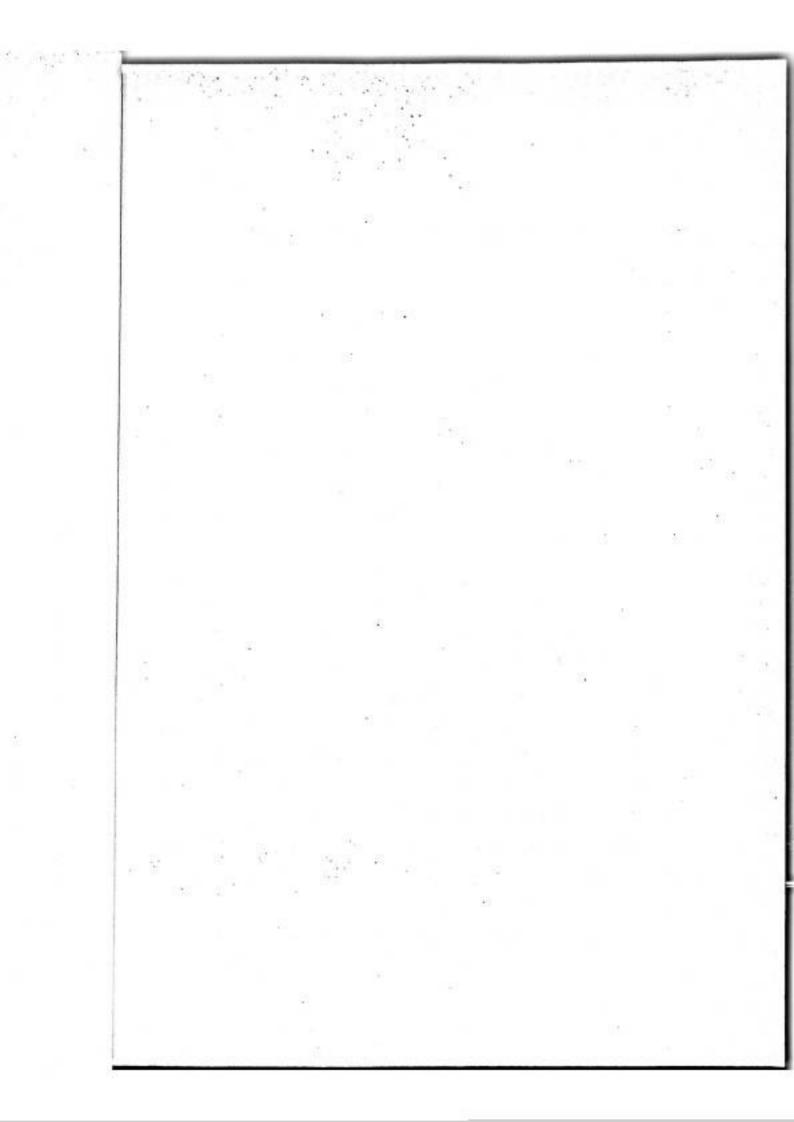
¹³ G.W.F. Hegel (1770-1882) adalah seorang filsuf berbangsa Jerman, yang terkenal dengan metoda dialektik dalam berfikir atau logika. Metodanya kemudian diterima oleh Karl Marx dan kaum komunis walaupun mereka menolak metafisiknya. dari buku Harold H. Titus dkk, Persoalan-Persoalan Filsafat, terj. H.M. Rasjidi, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), hal. 223.

¹⁴ F.R. Ankersmit, Refleksi Tentang Sejarah, Pendapat-pendapat Modern Tentang Filsafat Sejarah, (Jakarta: PT. Gramedia, 1987), hal. 17.

PETA MALAYSIA DAN LOKASI KELANTAN



\SUMBER : SEJARAH MALAYSIA (Petaling Jaya: Fajar Eakti Sdn. Bhd, 1981), hal. 77



BAB II SELAYANG PANDANG NEGERI KELANTAN



2.1 Keadaan Geografí

Kelantan merupakan salah satu dari empatbelas negeri bagian di Malaysia. Negeri ini mempunyai luas wilayah kira-kira 15.000 km² atau 11,40 % luas Semenanjung Tanah Melayu. Luas Semenanjung Tanah Melayu adalah 131.587,67 km². Negeri ini terletak di antara garis lintang 4° 32° dan 60° 15° di utara serta terbentang dari garis bujur 101° 19° dan 102° 37° di timur. Jarak antara batas utara dan selatan 177 km (118 batu) dan dari timur ke barat adalah 132 km (88 batu).¹

Wilayahnya berbatasan pada bagian barat dengan negeri Perak yang dipisahkan oleh banjaran gunung tertinggi
di Semenanjung Tanah Melayu yaitu, Banjaran Pergunungan
Titiwangsa dengan ketinggian sekitar 123.000 km pada
bagian selatan berbatasan dengan negeri Pahang dibatasi
oleh Banjaran Gunung Tahan dengan ketinggian sekitar
6,144 kaki; pada bagian timur berbatasan dengan negeri
Trengganu yang dipisahkan Banjaran Gunung Noring dengan
ketinggian 6,114 kaki; pada bagian utara berbatasan
dengan negeri bagian Patani (Thailand) sementara bagian

Alias Mohamed, Gerakan Sosial Dan Politik Kelantan, (Kuala Lumpur: Insular Publishing House Sdn. Bhd., 1984), hal. 9.

timur-laut dengan Laut Cina Selatan. Letak daerah ini menempatkannya pada posisi yang terisolasi dari negeri lain. Hal itu menyebabkan komunikasi dan transportasi darat dengan negeri-negeri bagian lain di Tanah Melayu pada masa sebelum abad ke-20 amat sukar. Tambahan pula sebagian besar negeri ini masih diliputi oleh hutan.

Transportasi yang digunakan oleh masyarakat Kelantan untuk komunikasi antara daerah-daerah yang ada di negeri ini adalah melalui jalan air. Daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah pemerintahan negeri ini, terdiri atas Kota Bharu sebagai ibukota pemerintahannya, Ulu Kelantan (sekarang dipecahkan lagi menjadi dua daerah baru yaitu, Kuala Krai dan Gua Musang), Pasir Mas, Pasir Puteh, Bachok, Machang, Tumpat dan Tanah Merah.

Sungai Kelantan, panjangnya kurang lebih 200 mil, merupakan sungai yang utama bagi jalur komunikasi dan perdagangan masyarakat Kelantan dengan dunia luar dan daerah-daerah pesisir lainnya. Di samping Sungai Kelantan terdapat juga sungai-sungai kecil lain seperti Sungai Lebir, Sungai Galas, Sungai Nenggiri, Sungai Nal, Sungai Pergau, Sungai Betis, Sungai Chiku dan sebagainya. Sungai Kelantan merupakan induk bagi anak-anak sungai tersebut.

Zakiah Hanum, Asal-Usul Negeri-Negeri di Malaysia, (Selangor: Times Books International, 1989), hal. 22; Alias Mohamed, op. cit., hal. 10.

kapal besar karena adanya jurang-jurang yang dalam dan airnya dangkal.

Hugh Clifford, dalam laporan ekspedisinya ke Kelantan dan Trengganu mengungkapkan:

"Garis pesisir Kelantan merupakan garis pendek jika dibandingkan dengan Trengganu, perbedaan antara garis batas (perbatasan) pesisir laut di sisi Sungai Besut di Kelantan dan titik garis di atas delta Sungai Kelantan yang menandakan perbatasan dengan Legeh, tidak melebihi 45 mil sebagai sebuah garis lurus. Akan tetapi Sungai Kelantan dapat dilayari oleh kapal-kapal orang Melayu yang berukuran besar, yang hampir mendekati 200 mil dari jalurnya dan bagian dalam yang dihuni yang lebih luas dibanding-kan dengan daerah pedalaman Trengganu".

Nama negeri Kelantan dikatakan diambil dari nama sungai Kelantan. Penyebutan ini merupakan nama pertemuan dua anak sungai yaitu, Sungai Galas dan Sungai Nenggiri. Jarak titik pertemuan kedua anak sungai itu dengan laut kira-kira 100 mil. Titik pertemuan itu disebut kuala sungai atau muara sungai. Hugh Cliford menyatakan bahwa:

Khoo Kay Kim, Malay Society, Transformation & A Stimulating and Discerning Study On The Evolution of Malay Society Through The Passage of Time, (Petaling Jaya: Pelanduk Publication Malaysia Sdn. Bhd., 1991), hal. 85-86. Teks asli dari kutipan adalah: "The coast line of Kelantan is short one when it is compared with that of Trengganu, the distance between the boundry post on the sea shore on the Kelantan side of the Besut River, and the spot above the delta of the Kelantan River which marks the boundry with Legeh, being not more than 45 15 as the crow flies. The Kelantan River, however navigable for large Malay boats for nearly 200 miles of its course, and the in- habited portions of the interior are thus far more extensive than is the hinterland of the Trengganu."

"Kelantan terbentuk oleh pertemuan antara Sungai Galas dan Nenggiri. Sungai Galas berasal dari arah sisi kanan dan Nenggiri dari sisi kiri dari pertemuan sebuah titik berjarak 100 mil dari laut [Laut Cina Selatan] yang dikenal oleh para pelayar sebagai Kuala Sungai atau Muara Sungai. Nama Kelantan diambil dari pertemuan air di muara di bawah garis ini".

Namun sumber lain menyebutkan bahwa, nama Kelantan adalah merupakan gabungan tiga kata yaitu, koli, thana atau tanah dan auta atau autam. Koli berarti Kolom atau Kolam dalam penuturan Kelantan. Gabungan tiga kata itu menjadikan istilah Kolamtanah atau Kolamtam yang akhirnya mengalami perubahan bunyi menjadi Kelantan. Ada juga mengatakan nama Kelantan merupakan nama sejenis pohon gelam hutan (Melaleuca Leucadendron) yang terdapat banyak di kawasan hutan pesisir pantai Kelantan. Manakala dari ceritera rakyat pula mengatakan nama yang diberikan oleh Raja Petani dengan nama kilat-kilatan yang kemudiannya disebut menjadi Kelantan.

⁴ Ibid., hal. 86. Teks asli dari kutipan adalah: "The Kelantan is formed by the confluence of the Galas and Nenggiri [Negiri] rivers. The Galas coming from the right and the Nenggiri from the left, from a junction at a spot distance about 100 miles from the sea, which is known to the navives as Kuala Sungei _ or the mouth of the river. The name of Kelantan is given to the combined waters of these below the point".

⁵ Zakiah Hanum, op. cit., hal. 23.

⁶ Ibid., hal. 26.

Iklim negeri ini tergolong iklim khatulistiwa dengan curah hujan sekitar 80"-200" setahun. Suhu kelembapan tahunan sekitar 21° - 32°. Antara bulan November sampai dengan Januari, bertiup angin munsson (monsoon) barat laut yang membawa curahan hujan yang lebat sehingga negeri ini dilanda banjir besar pada setiap tahun. Sungai Kelantan meluap karena tidak tertampung aliran air dari anak-anak sungai yang mengalir dari kawasan hulunya. Clive Kessler mengungkapkan:

"Dari bulan November sampai dengan Januari angin bertiup dari laut, terhempas ke pesisir, menuju ke muara sungai dan merintangi arus sungai yang menuju ke arah laut, jika angin bertiup, air pasang dan hujan keras terjadi, maka sungai Kelantan menjadi meluap menyebabkan banjir yang dahsyat"⁸

Di daerah dataran pantai dan muara sungai Kelantan merupakan kawasan yang subur. Kawasan ini banyak ditanami dengan tanaman padi dan kelapa, karena mempunyai jenis tanah lanar dan pengairan yang baik untuk tanaman tersebut. Kawasan ini juga, merupakan kawasan yang padat penduduk. Daerah pedalaman negeri terdiri dari dataran tanah tinggi dan berbukit-bukit. Sebagian besar daerah

Olive S. Kessler, Islam and Politik in a Malay State, Kelantan 1838-1969, (London: Cornell University Press, 1978), hal. 29.

B Ibid. Teks asli dari kutipan adalah: "From November to January persistent winds blow onshore, throwing tremendous seas upon the coasts, silting up the river's mouth and impeding its flow to the sea. When winds, high tides, and heavy rain coincide, the river may overflow, causing extensive flooding on the plain."

pedalaman masih diliputi oleh hutan, dan sebagian lagi ditanami tanaman tahunan seperti mangga, nangka, durian, karet, kelapa sawit dan lain sebagainya.

2.2 Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk Kelantan terdiri dari berbagai kelompok etnis seperti Melayu, Cina, India, Pakistan, Arab dan lain-lainnya. Penduduk negeri ini, menurut sensus pada tahun 1947, berjumlah 443.967 orang dengan perincian berdasarkan kelompok etnis: Melayu 407.227 orang, Cina 22.227 orang dan India 4.982 orang dan lain-lainnya 9.531 orang. Kemudian pada tahun 1970 meningkat menjadi: Melayu 655.396 orang, Cina 39.235 orang, India dan Pakistan 8.405 orang, dan lain-lainnya 11.907 orang.

Wilayah pemukiman yang terpadat penduduknya adalah di kawasan-kawasan lembah sungai, delta sungai Kelantan, dataran pinggir pantai dan kawasan yang subur untuk pertanian khususnya tanaman padi. Orang-orang Melayu kebanyakannya bertempat tinggal di kawasan-kawasan pertanian ini. Mereka menempati juga wilayah pesisiran dan umumnya bekerja bekerja sebagai nelayan.

Hal ini juga pernah diungkapkan oleh Clifford dari segi pengeluaran hasil negeri Kelantan sebagai berikut:

⁹ Sa'ad Shukri Bin Haji Muda Detik-Detik Sejarah Kelantan, (Kota Bharu: Pustaka Aman Press, 1971), hal. 199.

"Ekspor utama Kelantan adalah berupa emas, ikan, produk pabrik sutera dan katun. Sejumlah kecil kopra dan jeruk juga dilakukan setiap tahun.

Tetapi ia menemukan sekelompok penduduk yang mencari nafkah pada lahang pertanian. Munshi Abdullah menemukan adanya sawah di Kelantan dan mengemukakan bahwa, padi juga diekspor dari negeri tersebut dengan jumlah yang sedikit". ¹⁰

Selain itu juga tinggal di kota-kota seperti Kota
Bharu dan kota-kota kecil lainnya dan mereka terlibat
dalam kegiatan di bidang komersial, seperti menjadi
pedagang-pedagang kecil, penjual ikan, penjual kuih-muih,
penjual daging, peternak ayam, penjual beras, telur,
keropok, buah-buahan, sayur-sayuran, barang-barang tembaga, tukang emas, petenun kain, pegawai istana, guru-guru
pesantren, dan sebagainya. 11

Kelompok etnis lain baru memasuki kawasan ini pada permulaan abad ke-20. Kehadiran mereka itu berkaitan

¹⁰ Khoo Kay Kim, op. cit., hal. 96-97. Teks asli dari kutipan adalah: "The principal exports from Kelantan are gold, fish, and silk and cotton fabrics. A little copra and a few shipments of oranges are also made annually.

But he found that "The bulk of the population is engaged in agriculture". Munshi Abdullah too had noticed padi fields in Kelantann and mentioned that a small amount of rice was exported from the state."

Alias Mohamed, Kelantan Poltik dan Dilema Pembangunan, (Kuala Lumpur: Insular Publishing House Sdn. Bhd., 1989), hal. 58.

dengan pengembang usaha perdagangan Robert William Duff¹² merupakan pengusaha Inggris yang membawa kaum pendatang tersebut untuk bekerja di perusahaannya (perkebunan karet dan usaha perkayuan). Duff telah berhasil memiliki tanah seluas 777.000 hekter (7.770 km²) atau 1/3 luas wilayah Kelantan melalui *Perjanjian Duff-Sultan Kelantan* pada tahun 1900. Akan tetapi dalam kegiatannya, ia berhasil mengeksploitasi areal tanah sekitar 50 % dari luas wilayah Kelantan untuk mencari tambang timah, emas, pembalakan (usaha perkayuan), dan pengembangan perkebunan karet.

Kaum pendatang Cina dan India ke Kelantan berasal dari Pantai Barat Tanah Melayu mengakibatkan pertambahan jumlah penduduk dan melebarnya bentuk mata pencaharian di negeri ini. Namun pertambahan jumlah penduduk dari kaum Cina dan India adalah dalam jumlah yang sedikit jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain di Tanah Melayu. Kebanyakan kaum Cina bergiat di bidang pertambangan timah, emas dan usaha perkayuan dan kaum India pula be-

¹² Pada tahun 1900 Robert William Duff (seorang polisi penjara Inggris yang pernah bertugas di Pahang dan sudah pensiun) telah membuat suatu perjanjian dengan Sultan Kelantan. Perjanjian dikenal dengan Perjanjian Perkongsian Duff-Raja Kelantan pada tanggal 10 Oktober 1900. Perjanjian ini telah memberi hak milik tanah kepada Duff seluas 7.700 km di daerah pedalaman Kelantan untuk tempoh 40 tahun. Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya, Sejarah Halaysia, (Petaling Jaya: Macmillan Publisher Malaysia Sdn. Bhd., hal. 227.

kerja di perkebunan-perkebunan karet.

2.3 Agama, Sosial dan Ekonomi

Penduduk di daerah ini kebanyakan beragama Islam. Mereka yang menganut kepercayaan lain adalah para pendatang, seperti orang Cina, India, dan Eropa, yang menetap ataupun bermukim sementara di daerah ini. Keterikatan atau kuatnya keyakinan penduduk bumiputera pada ajaran Islam itu berkat usaha penyiaran yang telah berlangsung lama. sebelum kontak dengan para pendatang baru. Penyiaran Islam diperkirakan telah berlangsung sejak tahun 1150.¹³ Itu berarti penyiaran Islam di Kelantan terjadi lebih awal bila dibandingkan dengan Kerajaan Malaka yang berdasarkan catatan sejarah baru berlangsung pada tahun 1414. Agama Islam dibawa ke Kelantan oleh pedagang-pedagang muslim dari India dan Arab. Hubungan dagang itu telah berhasil pula merubah sistem perdagangan lama, yaitu dari sistem barter menjadi sistem tukar dengan menggunakan mata uang. Dalam hal itu, interaksi yang

¹³ Pemberitaan itu berdasarkan bukti Arkeologi yang didasarkan pada penemuan mata uang 'dinar' yang bertulisan angka Arab 577 yang ditafsirkan sebagai tahun 577 Hijrah. Penafsiran ini telah dibuat oleh seorang sejarawan Malaysia yaitu Aqiub Al Attas yang menyebut juga bahwa agama Islam masuk melalui Patani yang disebarkan oleh Sheikh Daud bin Abdullah Al-Pattani. Haji Dusuki Ahmad Haji Ahmad, Ikhtisar Perkembangan Islam (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1978), hal. 521; Alias Mohamead, op. cit., hal. 25.

terjadi antar pedagang luar (Arab dan India) dan pedagang setempat (Melayu) telah merubah juga ideologi yang dianut oleh masyarakat Kelantan, yaitu dari beragama Hindu menjadi penganut Agama Islam.

Penyiaran Agama Islam tampak diterima sepenuhnya oleh penduduk, ditaati dan diamalkan. Hal itu tampak dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Melayu Kelantan. Dengan peran yang dimainkan para ulama Islam yang menyebarkan ajaran Islam melalui pendidikan di pondok-pondok (pesantren), di surau-surau, madrasah dan mesjid-mesjid yang bermula sekitar awal abad ke-19. Pendidikan ini mencakupi segala aspek kehidupan, seperti masalah akhlak, ibadah, tauhid, sejarah Islam, dan sebagainya yang bersumberkan pada Al-Quran dan Al-Hadis.

Di Tanah Melayu orang-orang Melayu lazimnya diidentikkan dengan Islam. Hal ini disebabkan kebanyakan orang-orang Melayu adalah penganut agama Islam. Mayoritas orang-orang Islam di Tanah Melayu tinggal di Kelantan berbanding dengan negeri-negeri bagian lainnya. Pada tahun 1992 diperkirakan 95 % penduduk Kelantan beragama Islam dan merupakan 50 % dari 18 juta warga Malaysia yang beragama Islam. Data ini tidak berarti bahwa hanya orang Melayu yang bermukim di Kelantan yang seluruhnya menganut Agama Islam, tetapi menunjukkan adanya pemusatan pemukiman orang Melayu di Kelantan. Ini jelas diungkapkan oleh Clive Kessler:

"Di penghujung utara dari negeri-negeri bagian pesisir Timur, Kelantan secara etnis berbatasan dengan daerah Melayu di Thailand Selatan, penduduknya pada tahun 1970 berjumlah 686,266 orang atau sekitar 92.8 % merupakan penduduk Melayu, walaupun orang-orang Melayu jumlahnya lebih besar di daerah Johor, Kedah dan Perak, tetapi mereka lebih banyak tinggal di Kelantan". 14

Selain agama Islam, terdapat juga agama Kristen, Buddha dan Hindu yang dianut oleh penduduk Kelantan. Agama Kristen dianut oleh bangsa Eropa yaitu, pegawai-pegawai pemerintah Inggris. Agama Buddha dianut oleh sebagian besar kaum Cina, namun ada sebilangan kecil dari mereka beragama Islam dan Kristen. Secara mayoritas kaum India beragama Hindu, terdapat juga sebilangan yang beragama Islam, Kristen dan Sikh. Sementara kaum Melayu, tetap menjadi penganut agama Islam yang dilindungi oleh lembaga pemerintah (Majelis Agama Islam dan Adat-istiadat Melayu Kelantan). 15

¹⁴ Clive Kessler, op. cit., hal. 27. Teks asli dari kutipan adalah: "Northermost of the east coast states, adjoins the ethnically Malay region of southern Thailand, its population in 1970 was 686,266 of whom 92.8 percent were Malays. Though Malays are more numerous in Johore, Kedah and Perak, they are preponderent in Kelantan."

¹⁵ Pada 24 Desember 1915, dengan usaha seorang ulama Kelantan yaitu Tok Haji Kenali (Haji Muhamad Yusuf Ahmad) telah berhasil mendirikan suatu lembaga Islam dalam menata pemerintah dalam urusan umat dan ajaran Islam terhadap penduduk negeri ini. Lembaga ini mempunyai peran politik dalam pemerintahan di Kelantan di samping tugas pokoknya adalah mengelola dan mengurus "pemungutan zakat dan fitrah [penerima sumbangan derma], membangun dan mendirikan mesjid-mesjid dan surau-surau, mendirikan sekolah-sekolah agama, mengelola harta wakaf [harta milik

Dalam masalah sosial khususnya pada aspek kebudayaan, masyarakat Kelantan terkenal kaya dengan pelbagai bentuk-bentuk permainan, kesenian dan perubatan tradisional. Ini mencerminkan suatu suasana kehidupan sosial masyarakat yang kuat berpegang pada adat istiadat dan sikap gotong royong yang tinggi. Semua bentuk permainan dan kesenian yang ada di Kelantan pada mula dilaksanakan oleh masyarakat berhubung dengan kegiatan ekonomi dan biasanya dilaksanakan dalam bentuk pesta yang berhubungan dengan upacara-upacara resmi sultan.

. .

Untuk meljhat perkembangan ekonomi di Kelantan khususnya pada tahun 1950-an dalam masa pemerintahan Inggris, kita perlu melihat pada situasi ekonomi pada tahun 1900-an. Di mana pada tahun 1900, kekuasaan sultan telah mewarnai pola perekonomian secara langsung.

^{...}Continued...

umum] dan mengurus tanah perkuburan.". Sa'ad Shukri, op. cit., hal. 122.

¹⁶ Bentuk-bentuk permainan dan kesenian terdapat di Kelantan antara lain yaitu, Wau (layang-layang), Kertok, Gasing, Rebana, Wayang Kulit, Dikir Barat, Menora, Mak Yong, Main Peteri dan sebagainya. Wan Abd. Kadir Wan Yusoff, "Unsur Mainan dab Hiburan" Purba Jilid I (Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Malaysia, 1982) hal. 8; Muhammad Nor Mat Yassin, "Dikir Barat dan Dikir Laba", Beberapa Aspek Warisan Kelantan Jilid 2 (Kota Bharu: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, 1983), hal. 53; Datok Ahmad Nordin "Wayang Kulit Sebagai Satu Alat Sebaran Am di Kelantan", Beberapa Aspek Warisan Kelantan Jilid 2 (Kota Bharu: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, 1983), hal. 131.

Pada tahun 1900 terjadi suatu peristiwa ekonomi yang penting dalam sejarah Kelantan. Peristiwa ini dikenal dengan Duff Syndicate¹⁷, peristiwa ini merupakan masalah tanah di Kelantan yang diserahkan oleh Sultan Muhamad IV kepada Robert William Duff (seorang pensiunan polisi penjara Inggris yang pernah bertugas di negeri Pahang). Peristiwa bermula dengan dicapainya perjanjian

¹⁷ Duff Syndicate atau disebut juga Kelantan Scandal. Duff Syndicate merupakan suatu kelompok orang-orang Inggris yang pada awal berusaha membuka tambang timah di Kelantan. Kelompok ini terdiri dari Robert William Duff (seorang pensiun polisi penjara Inggris), Mayor Wemyse (seorang mantan pejabat Departemen Angkatan Perang Inggris) dan 6 orang Inggris lain. Pada Februari 1900, Duff telah membentuk suatu perkumpulan dagang dengan pertama sebanyak 10.000 paund. Pada Oktober 1900 Duff membuat suatu perjanjian dengan Sultan Kelantan yaitu, Perjanjian Perkongsian Duff-Sultan. Serikat Duff awal beranggapan bahwa negeri Kelantan kaya dengan tambang timah seperti halnya di negeri Perak, namun pada kenyataan amat sedikit. Duff sebelumnya juga sudah tahu bahwa Kelantan berada di bawah naungan Siam. Namun, ia menekan pemerintah Inggris supaya campur tangan di Kelantan dan tidak mengakui kekuasaan Siam atas Kelantan. Setelah Inggris berhasil mendapat Kelantan (dan termasuk Negeri-negeri Melayu Utara yaitu, Perlis, Kedah, Terengganu). Dalam perkembangannya, pada tahun 1921, Duff telah menuntut pemerintah Kelantan di pengadilan karena melanggar perjanjian sebelumnya pada tahun 1900 yang memberi hak milik tanah selama 40 tahun kepada Duffpemerintah Kelantan mencoba untuk mengambil sebelum cukup tempoh tersebut. Pada tahun 1925, Kerajaan Kelantan kalah dalam pengadilan dan tidak mampu pula membayar gantirugi yang dituntut oleh Duff sebanyak paund. Dengan peristiwa itu Kerajaan Kelantan 378.000 dituntut di pengadilan; serikat Duff dan permasalahannya dikenalnya dengan Duff Syndicate. Alias Mohamed, Kelan-Politik Dan Dilema Pembangunan (Kuala Lumpur: Gateway Publishing House, 1989), hal. 11-24; Sa'ad Shukri, op. cit., hal. 142.

antara Duff dengan Sultan Muhammad IV yang disebut sebagai Perjanjian *Perkongsian Duff-Raja Kelantan* pada tanggal 10 Oktober 1900.

Perjanjian ini telah memberi hak kepada Serikat Duff untuk mengerjakan suatu kawasan antara Sungai Galas dan Sungai Lebir (seluas 7.770 km²) di daerah pedalaman negeri ini untuk jangka waktu 40 tahun. Serikat Duff dikenakan membayar \$20.000, 4 % dari pendapatan dan 5 % pajak ekspor kepada Sultan. Bagi Sultan, perjanjian ini dibuat karena untuk mendapat perlindungan dalam menghadapi campurtangan Siam (Thailand)¹⁸. Oleh karena itu, Duff berpendapat bahwa pemberian tanah itu merupakan

¹⁸ Alasan lain mengapa Sultan Muhammad IV mengadakan perjanjian tersebut adalah untuk mendapat perlindungan politik dirinya sendiri, karena Raja Abdul Kadir
yakni, Sultan Patani telah dipenjarakan oleh Siam pada
tahun 1902. Dalam sejarah keberadaan negeri ini,Siam
adalah musuh berbuyutannya dan sikap anti-Siam tidak
lepas dalam masalah ini. Elina Farouk, Heniti Kejayaan
Sejarah Malaysia SPM, (Petaling Jaya: Persekutuan Preston
Sdn. Bhd., 1989), hal. 63.



hadiah¹⁹ dari Sultan Kelantan.²⁰

Mulai tahun 1900 negeri Kelantan dari segi politik dan ekonomi dikuasai oleh orang Inggris, karena wilayah seluas 777.000 hektar (7.770 km²) atau hampir mencapai 1/3 luas negeri Kelantan telah menjadi hak milik Duff. Kawasan ini telah diekploitasi dalam usaha mencari tambang emas, usaha perkayuan (pembalakan), perkebunan karet. Usaha Duff ini merupakan awal dari kegiatan ekonomi berskala besar dan kepentingan komersial yang luas (perkebunan karet dan usaha perkayuan). Sebelumnya, kegiatan ekonomi penduduk umumnya berskala kecil dan pengeluarannya sedikit yaitu, dibidang pertanian dan perikanan dan lebih bersifat usaha pemenuhan kebutuhan sendiri (subsistensi).

¹⁹ Duff menganggap pemberian tanah itu merupakan hadiah dari sultan karena, beliau mendapat kabar bahwa Sultan Kelantan telah memberi juga hak milik tanah seluas 600-1.000 batu persegi kepada seorang Cina bernama Seok Tan Lim. Kawasan tersebut dikatakan terletak di daerah ibukota Kelantan, yaitu Kota Bharu. Selain itu dikabarkan juga bahwa raja Kelantan memberi hak yang sama kepada tiga orang bangsa Asia, tetapi belum dibuat perjanjian(belum ditanda tangani). Tahun pemberian atau perjanjian tersebut tidak disebut. Alias Mohammad, op. cit., hal. 16.

Alias Mohamed, op. cit., hal. 16; Sa'ad Shukri Bin Haji Muda, op. cit., hal. 101; Elina Farouk, Meniti Kejayaan Sejarah Malaysia SPM, (Petaling Jaya: Persekutuan Preston Sdn. Bhd., 1989), hal. 63; Ranjit Singh Mahli, Sejarah Kertas 2 STPM, (Kuala Lumpur: Fedaral Publications, 1990), hal. 21; Barbara Watson Andaya dan Leonard Y Andaya, Sejarah Malaysia, (Petaling Jaya: Macmillan Publisher Malaysia Sdn. Bhd., 1983), hal. 227.

Dalam perkembangan dibidang pengangkutan, pemerintah Inggris telah membina jaringan landasan kereta api dari Tumpat ke Pasir Mas hingga ke Rantau Panjang pada tahun 1920. Dalam perkembangan kemudian landasan kereta api disambung bina lagi ke Kuala Krai, Gua Musang dan menghubungkan kota-kota itu dengan Kuala Lipis di negeri bagian Pahang pada tahun 1930. Jaringan landasan kereta api ini terus menghubungkan pula negeri-negeri di Pantai Barat pada tahun 1930-1935. Pada periode yang sama dibina juga landasan kereta api yang menghubungkan kota Rantau Panjang di Kelantan dan Songgora di Thailand.

Perkembangan jalur transpotasi ini telah membawa masuk orang-orang India ke Kelantan dari negeri-negeri di bagian pantai Barat Tanah Melayu. Dari suatu segi telah mengembangkan sektor perekonomian Kelantan khususnya dalam bidang transpotasi kegiatan ekonomi. Dengan ada kemudahan transpotasi yang menghubungkan Kelantan dengan negeri-negeri bagian lain di Tanah Melayu dan Thailand telah membawa arus urbanisasi di Kelantan.

Ekspor produksi timah dari Kelantan tidak sebanyak ekspor dari negeri Perak, Selangor dan negeri-negeri lain di pantai barat Tanah Melayu. Demikian juga halnya dengan produksi karet. Rata-rata jumlah ekspor jauh dibawah jumlah yang diekspor Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Kawasan perkebunan karet di Kelantan telah mencapai

seluas 5.400 ekar pada tahun 1904.²¹ Manakala daerah tambang timah di Kelantan yang amat sedikit ini tidak tercantum dalam daftar luas areal dan jumlah produksinya.²²

Dalam usaha memperlancar kemudahan jaringan komunikasi antar kota besar, pemerintah membuat jalan raya
aspal diusahakan yang menghubungkan kota-kota di Kelantan
dengan kota-kota lain seperti, di Terengganu, Pahang,
Johor, dan negeri lainnya pada tahun 1910. Pada dasarnya,
negeri Kelantan tidak memiliki produksi hasil bumi yang
memadai bila dibandingkan dengan negeri-negeri lain di
bagian pantai barat Tanah Melayu. Oleh karena itu, usaha
penyediaan dan peningkatan infrastruktur, sarana dan
prasarana di negeri ini kurang mendapat perhatian dari
pihak Inggris. Bagi Inggris segala sarana dan prasarana
dibina demi memudahkan struktur perekonomiannya yakni,
untuk mengangkut hasil-hasil bumi ke pusat-pusat pemerintahannya yang terletak di Negeri-negeri Melayu Bersekutu
dan Negeri-negeri Selat.

Sarana listrik mula masuk di Kelantan pada tahun 1926 (khususnya di Kota Bharu), dan pada tahun 1935 dilaksanakan pemasangan pipa air ledeng, khususnya di

²¹ Saad Shukri, op. cit., hal. 104.

²² H. Osman Rani dan E.K. Fisk, Ekonomi dan Politik Malaysia, (Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1983), hal. 42.

kawasan kota-kota pemerintahan. Penduduk Melayu yang tinggal di kawasan-kawasan pedalaman pada umumnya tidak menikmati hasil perkembangan ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Inggris hingga pada tahun 1977. Suatu fenomena yang memprihatin kaum Melayu di Kelantan.

2.4 Perkembangan Pendidikan

Kelantan khususnya dan Tanah Melayu umumnya telah mengenal bentuk pendidikan pondok atau pendidikan tidak formal jauh sebelum diperkenalkan sekolah-sekolah. Bentuk pendidikan ini khususnya ditekuni oleh orang-orang Melayu yang berorientasikan pada pendidikan keagamaan (Islam) dan tumpuan pada pengajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Sarana yang digunakan sebagai tempat pengajarannya adalah surau dan masjid. Pada umumnya, pondok²³ atau bangunan khusus diperlengkapi dengan mesjid, penjaga dan guru-guru agama dan juga kebutuhan santri-santrinya, seperti tikar,

²³ Pondok-pondok di Kelantan lazimnya diberi nama dengan nama tempat atau nama tokoh pendirinya. Setiap daerah di Kelantan paling tidak memiliki satu atau lebih pondok yang didirikan. Hingga kini terdapat 20 buah pondok yang masih berfungsi antara lain, Pondok Haji Zakaria di Pasir Puteh; Pondok Tok Kenali, dan Pondok Bunut Payung di Kota Bharu; Pondok Tok Guru Ghani, Pondok Pak Chu Hasan, Pondok Banggul Kulim di Pasir Mas; Haji Wan Mat di Tumpat; Pondok Machang di Machang dan Pondok Sungai Durian atau Pondok Haji Deraman di Kuala Krai dan lain-lain. Rahim bin Abdullah, "Pelajaran Pondok Di Kelantan", Beberapa Aspek Warisan Kelantan Jilid 2" (Kota Bharu: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, 1983), hal. 3.

bantal, alat-alat memasak dan makanan.24

Para orang tua merasa bangga dan beruntung dapat menghantar anak-anaknya ke pondok-pondok untuk belajar Al-Quran, mahir membaca, menulis, dan menghitung. Mereka berharap setelah selesai pengajiannya anak-anak mereka akan menjadi guru-guru agama sekembali ke kampungnya masing-masing. Pekerjaan itu merupakan lambang status yang tinggi dalam masyarakat.

Pondok-pondok umumnya, didirikan oleh pada ulama lulusan Timur Tengah. Para ulama ini mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat Kelantan. Ilmu yang dipelajari di Timur Tengah khususnya Mekah, telah memainkan peranan dalam membentuk dan merubah masyarakat Kelantan pada umumnya menjadi golongan fanatik kepada agama Islam. Sehingga dikatakan bahwa pada abad ke-19 masyarakat Kelantan tidak tersentuh oleh pengaruh budaya yang dibawa masuk baik oleh kaum Cina, India maupun Inggris.

Penyiaran Agama Islam dan pendidikan keagamaan tidak hanya diarahkan pada kemahiran membaca Al-Guran dan Al-Hadis saja tetapi juga mengenai Usuluddin, Tasawuf, Tauhid, Fikr dan lain sebagainya. Kitab-kitab tafsir dari disiplin agama ini seperti Kitab Minhatul Qarib (mengenai ilmu Usuluddin), Bidayatul Taklim Al-Awam

²⁴ Haris Md. Jadi, Etnik, Politik dan Pendidikan, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990), hal. 10.

(mengenai ilmu Fikr), Lamatul Aurad (kitab Tasawuf) dan banyak lagi buku-buku tentang Agama Islam merupakan hasil tangan (karya) para ulama di Kelantan. Tokoh-tokoh ulama dalam bentuk pendidikan pondok yang termasyhur adalah Tuan Haji Abdul Samad bin Muhammad Salleh dan dikenal dengan panggilan Tuan Tabal (1816-1891), 25 Haji Wan Musa bin Haji Abdul Samad, Tuan Guru Haji Daud, Hakim Nik Abdullah bin Raja Zainal, dan Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad atau dikenal dengan panggilan Tok Haji Kenali. 26

Pembinaan, perluasan dan perkembangan pendidikan non formal ini yang mendasari pemberian julukan pada negeri ini (Kelantan) sebutan "Serambi Mekah". Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Kota Bharu menjadi pusat tumpuan pelajar-pelajar untuk mendalami agama baik pelajar-pelajar dari dalam maupun luar Tanah Melayu. Sekolah Agama Arab yaitu, Madrasah Muhamadiyyatul 'Arab-biyyah, yang didirikan pada tahun 1917 diberitakan dikunjungi juga oleh pelajar-pelajar dari Siak, Palembang dan Kembo-ja yang ingin mendalami ilmu Islam.²⁷

Dalam perkembangannya, Sekolah Arab Madrasah Muha-

Alias Mohamed, Gerakan Sosial Dan Politik Kelantan, (Kuala Lumpur: Insular Publishing House Sdn. Bhd., 1984), hal. 25.

²⁶ Abdullah Al Qari, Detik-Detik Sejarah Hidup Tok Kenali, (Kota Bharu: Pustaka Asa Sdn. Bhd., 1988), hal. 7.

²⁷ Sa'ad Shukri, op. cit., hal. 127.

madiyyatul Arabiyyah ini mendirikan juga suatu organisasi sosial yaitu, Setiawan Belia yang dibentuk pada tahun 1931. Pada mulanya, organisasi ini bergiat di bidang penulisan dan penerbitan buku-buku Islam dan juga kebudayaan. Akan tetapi lima tahun kemudian (1937), organisasí iní melibatkan diri dalam kegiatan politik. Para tokoh dari organisasi ini mendirikan Partai Kesatuan Melayu Muda (KMM). Partai KMM merupakan sebuah organisasi politik pertama yang memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu. Partai ini di peringkat pusat dipimpin oleh Ibrahim Yaakub dan di Kelantan dipimpin oleh Abdul Kadir Adabi dan Sa'ad Shukri Haji Muda. 28 Tokoh-tokoh partai ini termasuk pioner yang secara terang-terangan menunjukan sikap menentang penjajah Inggris dan Jepang. Oleh karena itu, partai ini dinilai sebagai sebuah partai radikal kiri sehingga dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah Inggris pada tahun 1943.

Pada tahun 1917, suatu perkembangan pendidikan nonformal dari bentuk pondok menjadi sekolah, yaitu *Sekolah Majelis Agama Islam* (1917) yang didirikan di Kota

²⁸ Partai Kesatuan Melayu Muda(KMM) dikenal sebagai sebuah partai yang anti-feudal, anti-penjajah, dan mendukung penyatuan Indonesia-Malaya (Indonesia Raya). Pada tahun 1943 partai KMM telah diharamkan oleh Inggris. Dalam masa pendudukan Jepang banyak anggota KMM Kelantan masuk menjadi anggota Barisan Buruh Sukarela (BBS) untuk melawan Inggris. Pemimpin KMM Kelantan yaitu, Abdul Kadir Adabi mendirikan Tentera Pembela Tanah Air (PETA).

Bharu. Sekolah ini merupakan usaha pemerintah di bawah lembaga Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Sekolah ini diresmikan Sultan Kelantan, Sultan Muhamad IV dengan muridnya sebanyak 310 orang. Sekolah ini dikenal dengan nama Sekolah Majelis yang mengabungkan pendidikan agama dan pendidikan sekuler. Sekolah Majelis kemudiannya didirikan di kota-kota kecil lain seperti di Pasir Puteh, Pasir Mas, dan Kutan dengan jumlah siswanya sebanyak 541 orang. 29 Sekolah Majlis telah melahirkan banyak tokoh pergerakan nasionalisme Kelantan diantaranya, Mohammad Asri bin Haji Muda, Haji Ishak Lofti, Nik Hasaan Haji Nik Yahya, Abdul Kadir Adabi, Ustaz Zaki Yaakub dan lain-lainnya. 30

Selain Sekolah Majelis yang bersifat pendidikan keagamaan, didirikan juga sekolah-sekolah formal yang sekuler, seperti Sekolah Melayu dan Sekolah Inggris. Sekolah Melayu yang pertama didirikan pada tahun 1904 dan kemudian menyusul pula Sekolah Inggris yang pertama pada tahun 1925. Lembaga pendidikan ini didirikan atas prakarsa pemerintah Inggris dan ditempatkan di Kota Bharu.

Bentuk pendidikan sekuler yang diperkenalkan oleh pemerintah Inggris ini mengandung *prinsip dualisme*. 31 🗸

²⁹ Alias Mohamed, op. cit., hal. 38.

³⁰ Ibid., hal. 43.

³¹ Haris Md. Jadi, op. cit., hal. 11.



Prinsip ini membagi masyarakat ke dalam dua kategori yaitu; pertama adalah pendidikan yang diperuntukan bagi golongan bangsawan yaitu, raja-raja dan aristokrat-aristokrat Melayu (golongan elite dalam masyarakat Melayu Kelantan); dan kedua adalah pendidikan yang diperuntukan bagi golongan rakyat. Prinsip dualisme diciptakan oleh Lord Macaulay pada tahun 1935 dan diterapkan dalam sistem pendidikan di India. Menurut Macaulay;

"Dengan sumber-sumber yang terhad, memang tidak menasabah (logis) bagi kita untuk mencuba mendidik kesemua orang. Pada waktu ini kita mesti cuba seberapa boleh untuk membentuk satu kelas yang boleh menjadi penterjemah di antara kita dengan berjuta-juta yang kita perintah, satu kelas manusia, darah dan warna kulit mereka sebagai orang India tetapi orang Inggeris dari segi rasa, pendapat dan intelek". 32

Golongan bangsawan yang tinggal di kota-kota pada umumnya mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan yang dikelola oleh pihak Inggris yaitu, Ismail English School dan Sekolah Majelis. Sementara golongan rakyat mengikuti pendidikan pondok (pesantren) dan sekolah Melayu.

Kurikulum pada dua bentuk pendidikan untuk dua golongan ini berbeda-beda. Untuk golongan elit ini, materi pelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendidik calon pegawai-pegawai rendah, juru bahasa dan pembantu bagi administrasi pemerintahan Inggris. 33 Semen-

³² Ibid. hal. 12.

³³ Ibid., hal. 14; Alias Mohamed op. cit., hal. 43.

tara untuk rakyat, kurikulum yang disodor berorientasikan kepada pendidikan ketrampilan bagi peningkatan kegiatan pada bidang pertanian dan nelayan.³⁴

Dasar politik Inggris yang liberal yaitu, memberi kebebasan berusaha, dalam hal ini kepada kaum Cina dan India untuk membina sekolah mereka masing-masing. Sekolah-sekolah Cina dibangun dan biayai oleh pengusaha atau organisasi kaum Cina. Sekolah-sekolah itu menggunakan buku-buku, kurikulum dan guru-guru didatangkan langsung dari negeri Cina dan juga memakai bahasa Cina dengan dialek masing-masing. Sehingga sekolah-sekolah ini merupakan suatu "negeri China yang kecil" yang lahir di Tanah Melayu.

Usaha pengadaan pendidikan yang sama dilakukan oleh penduduk yang berasal dari India. Mereka mendirikan sekolah-sekolah di wilayah pemukiman mereka di daerah perkebunan karet. Mereka juga bergiat mendatangkan guruguru, buku-buku pelajaran dari India dan menerapkan kurikulum pendidikan yang sama seperti yang dilakukan di

³⁴ Ibid. hal. 12.

³⁵ Pada umumnya, Kaum Cina yang datang terdiri atas suku-suku Cina dari berbagai daerah-daerah di negeri China seperti, Kwangtung, Kwangsi dan Fukien yang dapat dibedakan dari segi dialek percakapan mereka. Mereka terdiri dari suku Hokkien, Hakka, Teochew dan Hailam. Suku ini juga dapat dikenalpasti melalui bentuk mata pencaharian yang dilakukannya. Kaum Cina dari suku Hokkein adalah golongan pedagang, Hakka adalah buruh timah, Teochew pekebun sayur, dan Hailam buruh karet.

negeri asal mereka. Lembaga pendidikan ini didirikan dan dibiayai oleh organisasi kerukunan dan sejumlah pengusaha kelompok mereka.³⁶

Sebelum Perang Dunia Kedua, golongan inteletual yang memainkan peran penting dalam perkembangan sosio-politik di Kelantan adalah para ulama dan guru-guru agama (Islam). Mereka banyak terlibat dalam memberi pendidikan agama dan melahirkan karya-karya tulis yang diminati oleh masyarakat. Kebanyakan karya-karya mereka berbentuk buku, majalah, dan koran yang bernada agama yang mempunyai unsur-unsur pengajaran dan nasehat. Majalah Pengasuh (1931-1937) dengan pengarang terkenalnya Tok Kenali (Haji Muhamad Yusuf), Al Hikmah (1934-1941), Sinaran Kelantan (1938), Putera (1929), Al-Kitab (1920), Kencana (1930), Al-Riwayat (1938), Cetera Kelantan (1941) dan lain-lain-nya yang diterbitkan di Kota Bharu dan Pasir Puteh. Khusus di Pasir Puteh diterbit oleh persatuan yang diberi nama New Club. 37

Pada tahun 1933, golongan inteletual Melayu, alumni Sekolah Melayu dan Inggris bergiat mengorganisasikan diri dan memperjuangkan eksistensi bahasa dan tulisan Melayu dengan mendirikan *Dewan Bahasa Melayu*. Dewan ini diketuai oleh Tengku Mahmud Mahyuddin dan sekretarisnya Saad

³⁶ Haris Md. Jadi, op. cit., hal. 16.

³⁷ Ibid., hal. 44.

Shukri Haji Muda. Organisasi ini didirikan dengan tujuan memajukan, mengembangkan dan melestarikan bahasa Melayu yang tergoncang eksistensinya akibat perkembangan dan pengaruh pendidikan dan politik Inggris. 38 Mereka bergiat dan berjuang dengan motto "Bumi Melayu Bagi Orang Melayu". Anggota organisasi ini terdiri para ulama (Islam), dan pegawai-pegawai Melayu yang bekerja pada perusahaan dan lembaga pemerintahan Inggris.

Pada dasarnya, perkembangan dalam dunia pendidikan sebelum dan setelah perang dunia kedua, baik yang berbentuk agama (non-formal) maupun sekular (formal) telah memotori sejarah pergerakan nasionalisme di Malaysia. Dari pendidikan Sekolah Melayu lahir golongan guru Melayu yang bergiat di bidang pendidikan dan penulisan dan juga menyumbangkan kemahiran membaca, menulis dan menghitung kepada masyarakat. Dari pendidikan sekolah Inggris dan Majelis lahir para pendiri organisasi-organisasi politik dan para pelopor pergerakan nasional seperti, Mohammad Asri bin Haji Muda, Haji Ishak Lofti, Abdul Kadir Adabi, Nik Hasan Nik Yahya, Nik Yusuf Hilmi, Abu Bakar Al-Muhamadi, Ustaz Yusuf Zaki Yaakub, Ustaz Haji Mahmud dan lain-lain.

³⁸ Sa'ad Shukri, op. cit., hal. 147; Alias Mohamaed, op. cit., hal. 71.

Shukri Haji Muda. Organisasi ini didirikan dengan tujuan memajukan, mengembangkan dan melestarikan bahasa Melayu yang tergoncang eksistensinya akibat perkembangan dan pengaruh pendidikan dan politik Inggris. 38 Mereka bergiat dan berjuang dengan motto "Bumi Melayu Bagi Orang Melayu". Anggota organisasi ini terdiri para ulama (Islam), dan pegawai-pegawai Melayu yang bekerja pada perusahaan dan lembaga pemerintahan Inggris.

Pada dasarnya, perkembangan dalam dunia pendidikan sebelum dan setelah perang dunia kedua, baik yang berbentuk agama (non-formal) maupun sekular (formal) telah memotori sejarah pergerakan nasionalisme di Malaysia. Dari pendidikan Sekolah Melayu lahir golongan guru Melayu yang bergiat di bidang pendidikan dan penulisan dan juga menyumbangkan kemahiran membaca, menulis dan menghitung kepada masyarakat. Dari pendidikan sekolah Inggris dan Majelis lahir para pendiri organisasi-organisasi politik dan para pelopor pergerakan nasional seperti, Mohammad Asri bin Haji Muda, Haji Ishak Lofti, Abdul Kadir Adabi, Nik Hasan Nik Yahya, Nik Yusuf Hilmi, Abu Bakar Al-Muhamadi, Ustaz Yusuf Zaki Yaakub, Ustaz Haji Mahmud dan lain-lain.

³⁸ Sa'ad Shukri, op. cit., hal. 147; Alias Mohamaed, op. cit., hal. 71.

BAB III

KELANTAN SEBELUM TAHUN 1955

3.1 Pemerintahan Tradisional

Perkembangan dan perubahan pemerintahan di Kelantan, dipandang dari segi bentuk dan pola pemerintahannya dibagi menjadi dua periode yaitu, periode kerajaan-kerajaan kecil (1465-1818) dan periode Kelantan di bawah pengaruh kekuasaan Siam (1818-1900). Pembagian ini juga didasarkan pada perubahan yang dilakukan oleh sultan dalam menjalankan pemerintahannya. Pada setiap kali penggantian sultan, maka berubah pula bentuk kebijaksanaan yang umumnya disebut sebagai suatu pembaharuan demi kemajuan dalam pemerintahan. Lazimnya, pembaharuan dibuat sehubungan dengan masalah internal yang telah terjadi dan masalah eksternal yang mempengaruhinya.

Periode bentuk pemerintahan ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan kecil yang memiliki wilayah pemerintahan tertentu dengan bentuk pemerintahan monarkhi.
Kekuasaan pemerintahan didominasi oleh keturunan tertentu
secara turun-temurun. Ini dapat dilihat pada kerajaan
pertama di Kelantan yaitu Kerajaan Sriwijaya Pertama pada

tahun 500-1450. Kerajaan-Kerajaan ini diperintah oleh seorang raja dan dibantu oleh Mangkubumi² dan terdapat Majelis Perlantikan Raja³, Gambaran pemerintahan tradisional pada periode kerajaan-kerajaan kecil ini lebih banyak mengungkapkan tentang suasana perang, pemantapan keamanan dengan laskar-laskar, perebutan tahta kerajaan, keturunan raja, serangan musuh dari luar dan perpindahan kota pemerintahan. Kerajaan Sriwijaya Pertama ini merupa-

¹ Kerajaan Sriwajaya Pertama berlokasi di daerah Kuala Krai, daerah di persimpangan muara Sunyai Lebir dan Sungai Kelantan. Rajanya bernama Raja Jayanasa telah bersama bala tentaranya telah menyerang dan menakluk Kerajaan Langkasuka pada tahun 670. Pada tahun 673 Raja Jayanasa telah menyerang dan menguasai Palembang serta mendirikan Kerajaan Sriwijaya Kedua. Setelah beliau meninggal Kerajaan Sriwijaya Pertama diserahkan kepada anaknya bernama Dwipan-tara-Singha dan Kerajaan Sriwijaya Kedua diperintah oleh anaknya yang bernama Seri Maharaja Singha. Dan ibukota pemerintahan dipindahkan ke Palembang pada tahun 690. Kerajaan Sriwijaya Pertama berpecah dan putus hubungan dengan Sriwijaya Kedua di Palembang. Akhirnya Kerajaan di Kelantan berubah namanya dikenal sebagai Sakebun Bunga Cherang Tegayong, Sa'ad Shukri, Detik-Detik Sejarah Kelantan, (Kota Bharu: Pustaka Aman Press, 1971), hal. 27.

Pada masa pemerintahan Long Yunus (1762-1794) melantik Long Jaafar sebagai Mangkubumi dan merangkap jabatan Panglima Perang dengan gelar "Tengku Seri Maharaja Perdana Menteri yang bertugas menjaga negeri dan rakyat. Mangkubumi ini diberikan sebuah daerah, sebagai daerah kekuasaannya yaitu di Semerak Pasir Puteh. Ibid., hal. 64

Majelis Perlantikan Raja terbentuk setelah kematian raja tidak mempunyai puteranya sebagai pewaris tahta kerajaan yang terjadi pada 1800 sewaktu pemerintahan Long Yunus 1794-1800. Majelis Perlantikan Raja ini telah melantik menantu sultan bernama Tengku Muhammad Terengganu.

kan bentuk awal konstitusi kesultanan Melayu di Kelantan.⁴ Bentuk pemerintahan ini menjadi pola bagi pemerintahan berikut yaitu oleh keturunan Sultan Iskandar Syah 1465-1677.⁵

Dalam sejarah pemerintahan tradisional, Kelantan dikatakan pernah diperintah seorang ratu yang dikenal sebagai Puteri Sa'dong. Ratu ini memerintah di sebuah daerah bernama Kota Jelasin. Namun kemudian terpaksa berpindah karena kota ini diserang dan dihancurkan oleh tentara Siam. Kemudian didirikan Kota Mahligai sebagai kawasan pemerintahan baru.

Dalam perkembangannya, kerajaan-kerajaan ini sering kali menghadapi musuh besarnya yaitu, Kerajaan Siam dan juga tiap kali peperangan kota pemerintahannya dihancurkan oleh tentara Kerajaan Siam. Pemerintah Kerajaan kecil itu pindah dan mendirikan kota pemerintah baru. Kerajaan Siam pada tahun 1400 merupakan kerajaan yang mengembangkan wilayah kekuasaannya ke atas kerajaan-kerajaan yang ada di Tanah Melayu.

⁴ Kerajaan ini mendirikan kota pemerintahannya yang dikenal sebagai Kota Sa-kebun Bunga Cherang Tegayong. ' Kota ini diserang dan dihancurkan oleh Kerajaan Siam pada tahun 1445. *Ibid.*, hal. 32.

⁵ Ibid., hal. 32.

⁶ *Ibid.*, hal. 41.

Selain menghadapi ancaman dari Siam, negeri ini juga pernah diserang oleh Kesultanan Malaka. Serangan pihak Malaka yang berlangsung pada tahun 1477 berhasil memaksa Sultan Kelantan menyerah kalah. Sultan Kelantan dipaksa membuat pengakuan tunduk dibawah kekuasaan Kesultanan Malaka dan menyerahkan ketiga orang puterinya yaitu, Unang Kening, Chupan dan Chubak sebagai hadiah. Salah seorang dari ketiga puteri Sultan Kelantan yaitu, Unang Kening dijadikan istri Sultan Malaka, Sultan Mahmud Shah.

Dalam periode kedua yaitu, Kelantan berada di bawah naungan Siam dari tahun 1818 sampai dengan 1900. Sultan Muhammad I (Long Muhammad) yang memerintah dari tahun 1800-1835 adalah Sultan Kelantan yang membuat perjanjian dengan Siam yang dikenal sebagai *Persetiaan Kelantan-Siam* pada tahun 1818. Setelah perjanjian ini ditanda tangani, maka negeri ini menjadi wilayah naungan Siam dan harus menghantar upeti sekali dalam tiap tempoh tiga tahun kepada Kerajaan Siam.

Sultan Muhamad I (1800-1835) di awal pemerintahnya, telah membuat pembaharuan dalam sturktur kekuasaan dengan membentuk jabatan Bendahara, Raja Muda, dan Temenggong.

⁷ Ibid., hal. 33.

⁸ *Ibid*, hal. 71.

Jabatan tersebut diserahkan kepada saudara-saudaranya, ⁹
Long Jinal sebagai Bendahara, Long Ismail sebagai Raja
Muda dan Long Tan sebagai Temenggong.

Pada tahun 1837 berlaku lagi pembaharuan, setelah Sultan Muhammad II dinobatkan menjadi Sultan Kelantan (1837-1886). Pembaharuan yang dilakukan adalah melantik seorang Perdana Menteri, (bergelar Engku Perdana Menteri), dan Hakim Besar. 10 Pelantikan jabatan baru ini dilakukan setelah beliau mendapat pengabsahan sebagai sultan dari kerajaan Siam. Upacara itu dihadiri oleh wakil-wakil raja Siam.

Masalah internal yang sering terjadi adalah perebutan kekuasaan antara anak raja atau keluarga raja. sebagai contoh peristiwa perebutan kekuasaan (tahta) yang terjadi sebelum Sultan Muhamad II yaitu, pada tahun 1836-1837. Peristiwa ini dikenal sebagai perang saudara di Kelantan antara Long Jinal dan Long Nik Mulut Merah. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh Long Nik Mulut Merah. Ia kemudian mengelarkan diri sebagai Sultan Muhamad II (1837-1886). Suasana perang tersebut diceritakan oleh Munshi Abdullah dalam bukunya "Kitab Pelayaran Abdullah Munshi Ke Kelantan sebagai berikut:

⁹ Sultan Long Yunus (162-1794) mempunyai 7 putera dan 5 puteri. Putera-puteranya ialah Long Muhamad, Long Tan, Long Jinal, Long Ismail, Long Yusuf dan Long Pandak.

¹⁰ Sa'ad Shukri, op. cit., hal. 83.

"Maka ada kira² sa-tengah dua jam lama-nya saya belayar mudek, sampai-lah kapada suatu tempat yang bernama Pengkalan Tambang, iaitu berseberangan dengan Kampung Laut, Maka ada-lah saya lihat ka darat, penoh orang di-tepi pantai, bersesak, beribanyaknya serta dengan senjata. Maka adalah pada tiap sa-orang itu, ada enam tujoh batang champak-buang [lembing, sic!], dan satu parang lading, atau chenangkas, atau pedang, dan sa-bilah keris tersisip di-pinggang-nya; dan ada pula yang membawa senapang, maka kelihatan bercheranchangan [berdiri, sic!] seperti charang [dahan, sic!] kayu Maka tiba datang-lah peluru berdegong. Maka orang yang berjalan dari sa-belah kanan saya meniarap. Maka orang yang dekat itu pun habislah lari, ada yang tundok, ada yang berlindong di-balek kelapa". ¹¹

3.2 Birokrasi Pemerintahan Masa Pemerintahan Inggris

Untuk memahami lebih jelas birokrasi pemerintahan Inggris di Kelantan, dipandang perlu mengungkapkan lebih dahulu gambaran sepintas tentang bentuk pemerintahan Inggris di Tanah Melayu pada tahun 1832 sampai dengan tahun 1951. Gambaran ini menumpukan perhatian pada perkembangan dan perubahan yang dilakukan oleh Inggris dalam melaksanakan pemerintahannya. Pemerintahan Inggris di Tanah Melayu dapat diklasifikasi dalam tiga bentuk pemer- vintahan yaitu, pemerintahan di Negeri-Negeri Selat, Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu.

¹¹ Ibid., hal. 76.

Sebelum tahun 1832, kekuasaan Inggris ke atas Negeri-negeri Selat adalah berada di tangan pegawaipegawai Serikat Dagang Inggris. Serikat Hindia Timur Inggris di bawah Francis Light telah mendapatkan Pulau Pinang dari Sultan Kedah pada tahun 1786. Light telah diangkat menjadi "pengawas" (Superintendent) Pulau Pinang oleh pemerintah Inggris di London. Kekuasaan Light berada di bawah pembantu Gubernur Inggris di Calcutta India yaitu, Sir John Macpherson. 12 Pada tahun 1805, Pemerintahan Inggris di India menjadikan Pulau Pinang sebagai wilayah keempat setelah Madras, Bombay dan Benggala. Kemudian pada tahun 1818, negeri ini diperintah oleh seorang Gubernur Inggris yang masih berada dibawah pemerintahan Inggris di India. 13 Pada tahun 1816, Stamford Raffles telah memperoleh Singapura dari Kesultanan (yang dikuasai oleh salah seorang putera Sultan Johor Johor yaitu, Temenggong Abdul Rahman) untuk dijadikan pelabuhan persinggahan kapal-kapal Serikat Dagang dan kapal-kapal tentara laut Inggris. Pada tahun 1819, negeri ini diperintah oleh seorang Residen yang bertugas

¹² Elina Farouk, Meniti Kejayaan Sejarah Malaysia, (Petaling Jaya: Persekutuan Preston Sdn. Bhd., 1989), hal. 42.

¹³ Ibid., hal. 47.

sebagai wakil pemerintah Inggris di India. 14 Kemudian pada tahun 1824, Malaka diserahkan kepada Inggris dan Bengkulen menjadi milik Belanda melalui Perjanjian Inggris-Belanda (Traktat London) yang dicapai pada 17 Maret 1824. Malaka diperintah oleh seorang residen. Ketiga negeri ini diperintah secara otonom oleh Serikat Dagang Inggris yang kemudian disatukan oleh pemerintah Inggris.

Pada tahun 1826, ketiga negeri ini digabung dibawah satu pemerintah yaitu Pemerintahan Negeri-negeri Selat. Pada tahun 1831 Negeri-negeri Selat berada di bawah kekuasaan pemerintah Inggris di India. Pulau Pinang diketuai oleh Gubernur yang bertugas sebagai wakil Gubernur Jenderal di India. Malaka dan Singapura masing-masing diketuai oleh residen konsular (Resident Councillor) yang berada di bawah kekuasaan Gubernur. 15

Pada tahun 1832, merupakan bentuk pemerintahan Inggris yang pertama yaitu di Negeri-negeri Selat (NNS) yang terdiri atas Pulau Pinang, Malaka dan Singapura. Kekuasaan tertingginya berada dibawah Gubernur Jenderal Inggris di India. Dalam pelaksanaan pemerintahan harian dilakukan oleh Gubernur Negeri-negeri Selat di Singapura yang dibantu oleh Residen Konsular Malaka dan Residen

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Norma Din, SPM Sejarah Malaysia, (Kuala Lumpur: Penerbitan Siri Maju Sdn. Bhd., 1987), hal. 44.

Konsular Pulau Pinang. 16 Bentuk pemerintahan itu berubah lagi pada tahun 1867, setelah kekuasaan tertinggi negerinegeri Selat pindah dari Gubernur Jendral Inggris di India kepada Sekretaris Tanah Jajahan (Colonial Secretary) di London. Pelaksanaan pemerintahan berada di bawah Gubernur Negeri-negeri yang dibantu pula oleh "Majelis Legislatif" (Legislative Assembly) dan "Dewan Eksekutif" (Executive Council). 17

Pada tahun 1876, Inggris memperkenalkan bentuk pemerintah Negeri-negeri Melayu Bersekutu yang terdiri atas negeri bagian Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. 18 Keempat negeri ini berada di bawah Kerajaan Inggris di London. Dalam pelaksanaan pemerintahan harian, kekuasaan tertinggi adalah "Komisaris Tinggi" (High Commissioner) yang juga merangkap Gubernur Negeri-negeri Selat yang dibantu oleh Ketua Residen (Resident General), Kepala-kepala Jabatan Persekutuan yang terdiri atas hakim

¹⁶ Ranjit Singh Mahli, Sejarah Kertas 2 STPM, (Petaling Jaya: Federal Publications Sdn. Bhd., 1990), hal. 12; Norma Din, SPM Sejarah Malaysia, (Kuala Lumpur: Penerbitan Siri Maju Sd. Bhd., 1987), hal. 44; R.S. Milne dan Diane K. Mauzy, Politik Dan Kerajaan Di Malaysia(Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1982), hal. 18.

¹⁷ Ranjit, Ibid., hal. 15; Elina, op. cit., hal. 57.

¹⁸ B. Simandjuntak, Federalisme Tanah Melayu 1945-1963, (Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1985), hal. 10.

ahli hukum, komando tentara, komisaris polisi (police commissioner), komisaris keuangan (finance commissioner), direktur perhubungan (liaison director) dan Dewan Negara (State Council).

Pada tahun 1909, Inggris mendirikan pemerintahan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu yang terdiri atas Kelantan, Kedah, Johor, Terengganu dan Perlis. 19 Bentuk pemerintahan ini merupakan awal penerapan sistem Residen ke atas negeri-negeri bekas naungan Siam itu. Setiap negeri itu harus menerima seorang residen sebagai penasehat sultan dalam masalah pemerintahan. Posisi kekuasaan residen dalam struktur pemerintahan Inggris adalah berada di bawah Residen Jenderal Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Komisaris Tinggi Negeri-negeri Selat. Namun pada kenyataannya, residen berkuasa penuh dan membelakangi Residen Jenderal dan Komisaris Tinggi.

"Para Residen telah memerintah sejak awal disebabkan sebarang jalan penyelesaian yang lain adalah mustahil... Tiada sebuah negeri pun mempunyai seorang Raja dengan kuasa dan jentera untuk melaksanakan 'nasihat' dari Residen... Setiap orang di Negeri-negeri Selat sedia maklum bahawa Residenlah yang jelas memerintah, maka itu adalah menghairankan bahawa Pejabat Jajahan menegakkan sikap tidak tahu-menahu"²⁰

Bentuk pemerintahan Inggris di Kelantan bermula

¹⁹ R.S. Milne, op. cit., hal. 21

²⁰ B. Simandjuntak, op. cit., hal. 9.

pada tahun 1902. Kelantan harus menerima seorang Komisaris Tinggi yang bertugas untuk Kerajaan Siam. Pada tahun 1902-1909, Kelantan mengalami dualisme kekuasaan, yaitu Siam dan Inggris. Keadaan ini bermula setelah Robert William Duff membuat perjanjian dengan Sultan Muhammad IV pada tahun 1900. Perjanjian ini telah mengakibatkan tegangnya hubungan antara Inggris dan Siam. Sehingga terbentuk pula perjanjian antara Inggris dengan Siam pada tahun 1902.

Dalam Perjanjian Bangkok 1902 (Perjanjian Inggris-Siam), Kelantan harus menerima seorang Komisaris Tinggi dan seorang pembantu Komisaris Tinggi Inggris yang dipilih oleh Siam. Kedua pejabat Inggris ini bertugas untuk Kerajaan Siam. Wewenang mereka adalah menjadi penasehat kepada sultan dalam masalah pemerintahan kecuali menyangkut masalah adat istiadat Melayu dan agama Islam. Komisaris Tinggi Inggris yang dilantik itu ialah William Armstrong Graham yang pernah bertugas untuk Siam dan pembantunya, H.W. Thomson yang bekerja di Negeri-negeri Melayu Bersekutu.²¹

Selama tujuh tahun (1902-1909) Kelantan berada di tangan dua kolonial yaitu Inggris dan Siam. Pada masa transisi atau dualisme kekuasaan ini, Inggris lebih dominan dalam pola pemerintahan. Secara keseluruhannya

²¹ Saad Shukri, op. cit., hal. 102.

bentuk pemerintahan di Kelantan adalah ala Inggris.

Pada tahun 1904, Inggris telah membuat pembagian daerah-daerah pemerintah di negeri ini. Bentuk pembagian adalah bentuk distrik (district)²² (setingkat kabupaten), dan distrik kecil (setingkat kecamatan) yang terdiri atas mukim dan kampung. Kepala pemerintahan distrik disebut Kepala Distrik (District Officer) setingkat Bupati, dan distrik kecil dijabat oleh Penggawa setingkat Camat dan Kampung oleh Penghulu setingkat lurah.²³

Pembagian daerah-daerah ini merupakan usaha pemerintah Inggris dalam menangani masalah-masalah pemungutan pajak dan hasil bumi negeri ini. Pada tahun 1915, Inggris memperkenalkan Sistem Tanah Baru. Sistem ini merupakan sistem sewa tanah yaitu, rakyat Kelantan harus membayar sewa tanah dan pajak-pajak tanaman. 24 Pajak tanaman itu dikenakan pada semua jenis tanaman seperti tanaman padi, kelapa, karet, durian, sireh, lada hitam, tebu dan tanam-

²² Pada tahun 1904 dibentuk Jajahan Kota Bharu sebagai pusat pemerintahan negeri Kelantan, Jajahan Batu Mengkebang (dikenal sebagai Jajahan Ulu Kelantan berpecah menjadi jajahan Kuala Krai dan jajahan Gua Musang), Jajahan Pasir Puteh dan sebagainya. Sa'ad Shukri, *Ibid.*, hal. 103.

²³ Sewaktu Kelantan berada dibawah pengaruh kekuasaan Siam gelar untuk jabatan Penggawa adalah "Tok Kueng" dan Penghulu disebut "Tok Nebeng". Habib Zam Zam Bin Haji Abdul Latif, "Berbekwah Besar", Beberapa Aspek Warisan Kelantan Jilid 2" (Kota Bharu: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, 1983) hal. 21; 'Saad Shukri, Ibid.

²⁴ Ranjit Singh Mahli, op. cit., hal. 53.

jian itu, Kelantan diserahkan oleh Siam kepada pemerintah Inggris. Inggris memberi pinjaman uang sebanyak \$4 juta untuk membina landasan keretapi kepada Siam sebagai ganti ruginya.

Kerajaan Kelantan pula mengadakan suatu perjanjian dengan pihak pemerintah Inggris yang dikenal dengan Perjanjian Inggris-Kelantan²⁶ pada tanggal 22 Oktober 1910 antara Komisaris Tinggi Inggris Sir John Anderson dan Kerajaan Kelantan di Kota Bharu.²⁷ Perjanjian ini adalah sebagai pembaharuan terhadap perjanjian sebelumnya (1902) dan Kelantan tidak boleh mengadakan hubungan dengan kuasa-kuasa lain, yang pada dasarnya penerimaan Kelantan secara resmi sebagai wilayah naungan Inggris.

Inggris telah melantik seorang Residen pertamanya, Mr. J. S. Mascon²⁸ di Kelantan bagi menggantikan Graham komisaris tinggi sebelumnya. Jabatan Mascon sebagai

²⁶ Inti dari Perjanjian tersebut juga menyerahkan hak pertuanan ke atas Perlis, Kedah dan Terengganu kepada Inggris dan Inggris memberi pinjaman uang kepada Kerajaan Siam sebanyak \$4juta dengan bunganya 4 % untuk membina landasan keretapi dari perbatasan Tanah Melayu ke Bangkok dan lain-lain kepentingan politik kedua koloni tersebut. Elina Farouk, op. cit., hal. 64 ;Sa'ad Shukri op. cit., hal. 107; Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya, Sejarah Malaysia, (Petaling Jaya, 1983), hal. 229; R.S. Milne dan Diana K. Mauzy, op. cit., hal. 21; Joginder Singh Jessy, Sejarah Asia Tenggara 1824-1965, (Kedah, 1986), hal. 220; Ranjit Singh Malhi, op. cit., hal. 22.

²⁷ Sa'ad Shukri, op. cit., hal. 110.

²⁸ Saad Shukri Ibid., hal. 108.

residen Inggris adalah berada dibawah Gubernur Negerinegeri Melayu Tidak Bersekutu dan Komisaris Tinggi Negeri-Negeri Selat.

Terdapat tiga sultan Kelantan yang menjadi boneka pada periode pemerintahan Inggris yaitu Sultan Muhammad III (1900-1920), Sultan Ismail atau Tengku Ismail ibni Al-Marhum Sultan Muhammad IV(1920-1944) dan Sultan Ibrahim ibni Al-Marhum Sultan Muhammad V (1944-1960).

Dalam birokrasi pemerintahan Inggris di Kelantan pada tahun 1940-an, Inggris telah memperkenalkan State Council dan State Legislative Council yang bertindak sebagai lembaga eksekutif dan legislatif. Ahli-ahli pada kedua Majlis tersebut terdiri dari orang Inggris yang diambil dari Negeri-ngeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Kekuasaan Sultan dan jabatan-jabatan feudal seperti Bendahara, Temenggong, dan lain mulai bergeser dalam struktur pemerintahan. Sultan hanya berkuasa di dalam masalah adat-istiadat Melayu dan agama Islam saja.

State Council dan State Legislative Council dikenal sebagai Dewan Negeri atau (setingkat DPR) diketuai
oleh Sultan. Namun di peringkat Pemerintahan Persekutuan
Tanah Melayu dibentuk Federal Council (Dewan Federal) dan
Federal Legislative Assembly (Majelis Eksekutif
Federal/Persekutuan) yang diketuai oleh High Commissioner
(Komisaris Tinggi).

Tambahan pula, pemilihan dan perlantikan Sultan juga harus mendapat persetujuan Inggris yaitu, oleh Komisaris Tinggi Inggris dan Dewan Negeri. Komisaris Tinggi dan Dewan Negeri yang bertindak dalam membuat segala peraturan dan kebijaksanaan dalam pemerintahan negeri. 29

Pada tahun 1946 Ingris mencoba memperkenalkan bentuk pemerintahan Malayan Union, namun gagal diterapkan karena mendapat tantangan yang hebat dari kaum Melayu karena bentuk pemerintahan yang baru ini tampaknya dirancang untuk meniadakan kedaulatan sultan, hak kaum Melayu dan hak kewarganegaraan yang longgar kepada kaum pendatang dan kemudian diganti dengan bentuk Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Secara umumnya, susunan birokrasi pemerintahan Malayan Union diketuai oleh seorang Gubernur dengan dibantu oleh Federal Council dan Federal Legislative Assembly. Manakala State Council dan State Legislative Council berada pengawasan langsung oleh Centre Government (Pemerintah Pusat). Singapura tidak termasuk dalam Malayan Union dan dilantik seorang Gubernur Inggris yang merupakan Crown Colony (Mahkota Inggris di koloni).

Pada tahun 1948 Inggris memperkenalkan bentuk pemerintahan Persekutuan Tanah Melayu, yang mengabung

²⁹ Saad Shukri, op. cit., hal. 107.

Negeri-negeri Selat, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Negeri-negeri yang tergabung dalam persekutuan itu ialah, Malaka, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Perlis, Kedah, Terengganu, Johor dan Kelantan. Sementara Singapura tidak termasuk dalam bentuk pemerintahan Persekutuan ini.

Secara umum, kekuasaan tertinggi dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948 adalah Komisaris Tinggi yang merupakan ketua Federal Council (Dewan Federal) dan Federal Legislative Assembly (Majelis Legislatif Federal). Kedua majelis ini dikenal sebagai Council of State (Majelis Negara). Jika pada peringkat negeri-negeri bagian terdapat State Council dan State Legislative Council yang diketuai oleh sultan. Kedua Majelis ini disebut sebagai Dewan Negeri.

"Majlis Legislatif Persekutuan juga adalah merupakan satu lagi warisan penjajah. Ketiga-tiga orang ahli ex-officio Majlis eksekutif merupakan di antara ahli-ahlinya juga; kesembilan-sembilan orang Presiden atau Menteri-menteri Besar Majlis Negeri dan dua orang wakil Majlis Negeri-negeri Selat ialah ahli-ahli negeri dan Negeri-negeri Selat ialah ahli-ahli negeri dan Negeri-negeri Selat dan selebihnya, iaitu seramai 11 orang ahli rasmi dan 50 orang ahli tidak rasmi dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi. Dalam Majlis Legislatif Persekutuan yang pertama, kesemua 11 orang ahli rasmi ialah orang Eropah dan di kalangan 50 orang ahli tidak rasmi, 22 ialah Melayu, 14 Cina, 7 Eropah, 5 India, 1 Eurasia dan 1 Sinhalis."

³⁰ B. Simandjuntak, op. cit. hal. 61.

Kedua majelis itu berfungsi membantu dan menasehat Komisaris Tinggi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Tanah Melayu. Jabatan yang penting dalam tradisi pemerintahan Inggris di Tanah Melayu selain Komisaris Tinggi adalah Kepala Sekretaris, Hakim Negara, dan Sekretaris Keuangan.

3.3 Keadaan Sosial Politik Sebelum Gerakan Pemisahan Kelantan

Dalam tulisan ini, penulis coba telusuri secara global keadaan sosial politik yang terjadi di Tanah Melayu sebelum dan setelah Perang Dunia Kedua. Pada dasarnya, situasi sosial politik yang terjadi secara makro mempunyai pengaruhnya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap munculnya Gerakan Pemisahan Kelantan 1955-1956. Sebelum itu, penulis ingin memaparkan suatu peristiwa pemberontakan Tok Janggut di Kelantan yang terjadi pada tahun 1915.

Pemberontakan Tok Janggut di Kelantan, merupakan suatu perlawanan kaum Melayu terhadap kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah Inggris. Setelah Perjanjian 1909 antara Inggris-Siam, Inggris mengangkat dan menempatkan Mason sebagai Residen Kelantan untuk mengganti Graham (Komisaris Tinggi Inggris untuk Siam). Setelah penempatan itu pemerintah Inggris yang diwakili oleh Sir

John Anderson mendesak Sultan Kelantan untuk menandatangani perjanjian pada tahun 1910; Isi pokok dari perjanjian itu adalah menempatkan negeri itu secara resmi di bawah kekuasaan Inggris.

Residen Mason, setelah dicapai perjanjian itu menata susunan pemerintahan sipil, pasukan keselamatan, dan
membentuk Majelis Eksekutif Negeri (Majlis Mesyuarat
Kerja Negeri). Ia menerapkan juga undang-undang perpajakan baru sehingga berakibat berubahnya Undang-undang
Melayu yang berdasarkan tradisi Islam. Perlaksanaan
undang-undang perpajakan ini diungkapkan oleh Sa'ad
Shukri sebagai berikut:

"Pada tahun 1914, chukai atau hasil tanah dan chukai ternakan telah di-kenalkan terutama dalam Jajahan Pasir Puteh. Selain dari itu chukai kepala di-kenakan iaitu satiap orang pendudok dikenakan sa-ringgit sa-tahun, manakala pokok buah²an dikenakan kan chukai 3 sen sa-pohon, buah kelapa dikenakan 3 sen sa-tandan dan pokok sireh dikenakan 5 sen sa-junjong. Penduduk² yang menentang peratoran² ini akan ditangkap, di-denda atau dipenjarakan. Undang² hasil tanah ini hanya baru dijalankan sa-masa Ketua Jajahan Che Latif. 31

Sebagian pembesar Kelantan merasa tidak puas terhadap pembaruan yang dilakukan oleh Inggris itu. Keadaan
itu mendorong Haji Wan Hassan (terkenal dengan sebutan
Tok Janggut), seorang pemimpin Islam dari daerah Pasir
Puteh, tampil mengorganisasikan kekuatan untuk melancar-

³¹ Sa'ad Shukri, op. cit., hal. 116.

kan gerakan perlawanan terhadap pemerintah Inggris pada tahun 1913. Perlawanan ini baru berhasil dipadamkan oleh pemerintah Inggris dalam tahun 1915, 32 setelah mendapat bantuan pasukan dari daerah koloni yang lain. Peristiwa perlawanan itu diungkapkan oleh Sa'ad Shukri sebagai berikut:

"Bantuan ashkar yang telah diminta dari Singapura dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu pun tiba....Kota Jeram [Pasir-Puteh] telah dibakar dan dimusnahkan. Selanjutnya juga larangan berjalan malam....pehak Tok Janggut telah mengalami kekalahan, malah dia terbunoh dan penyokong²nya telah lari ke Siam.... Mayat beliau telah dibawa ke Kota Bharu dengan kereta lembu, sa-jenis kenderaan dewasa itu. Mayat itu di-letakkan di-Padang Merdeka (sekarang) tersandar ka-sabatang kayu untok disaksikan oleh orang ramai yang sedang dalam kebimbangan."³³

Mulai tahun 1915 sampai dengan 1941, perkembangan sosial dan politik di bawah pemerintah Inggris yang mempunyai kekuatan tentara telah mengukuhkan kestabilan politik dalam pemerintahan di Kelantan khususnya dan di Malaysia umumnya sehingga bermulanya Perang Dunia Kedua, yaitu pendudukan Jepang di Tanah Melayu pada akhir tahun 1941.

Pendudukan Jepang di Tanah Melayu adalah bermula di

³² Haji Buyong Adil, Perjuangan Orang Melayu Menentang Penjajahan Abad 15-19 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985), hal. 222; Elina Farouk, Meniti Kejayaan Sejarah Malaysia SPM, (Petaling Jaya: Persekutuan Prseton Sd. Bhd., 1989), hal. 88.

³³ Sa'ad Shukri, op. cit., hal. 118.

Kelantan. Pendaratan pertama tentara Jepang di Pantai Sabak, Kota Bharu pada tanggal 8 Desember 1941 dan 10 hari berikutnya telah menguasai seluruh negeri Kelantan. Sa Pada tanggal 20 Juli 1943, Jepang mengadakan suatu perjanjian dengan Kerajaan Siam yang intinya menyerahkan Kelantan di bawah kekuasaan Siam. Semudian pada tanggal 18 Oktober 1943, bendera Kerajaan Siam mula dinaikkan di Kelantan. Tindakan Jepang menyerahkan Kelantan kepada Siam sebagai suatu politik balas jasa terhadap Siam yang memberi kerjasama dan membenarkan tentara Jepang mendarat di Singora dan Patani di Thailand untuk masuk ke utara Tanah Melayu lewat jalur darat.

Selama dua tahun pendudukan Jepang, dari segi kondisi sosial telah muncul hubungan sosial yang tegang antara kaum Melayu dan Cina. Perasaan anti-Cina dikalangan kaum Melayu yang ditiupkan oleh pemerintah Jepang dengan memaksa penulis-penulis Melayu seperti Abdul Kadir Adabi, dan Sa'ad Shkuri (penulis surat kabar Putera) berkerjasama dalam melancarkan propaganda melalui surat

³⁴ Sa'ad Shukri, Ibid., hal. 166; Elina Farouk, op. cit., hal. 107.

³⁵ Sa'ad Shukri, Ibid., hal. 167.

³⁶ Elina Farouk, op. cit., hal. 107.

kabar "Matahari"³⁷ yang diterbitkan oleh tentara Jepang. Kekuatan tentara Jepang yang didukung oleh Polisi Tentaranya (Kempeitai) dan tentara perisiknya (Tekikan) melancarkan gerakan mencari informasi dan menangkap anggota-anggota gerakan anti Jepang seperti People Anti-Japanese Army (Tentara Malaya Anti-Jepang atau MPAJA), Bintang Tiga, Malayan Overseas Chinese Self Defence Army (Tentara Pertahanan Orang-orang Cina Seberang Laut atau MOCSDA), Force 136 dan Pembela Tanah Air (Peta). Pasukan Bintang Tiga, MPAJA, dan MOCSDA merupakan organisasi gerakan penentangan terhadap pendudukan Jepang yang dianggotai oleh kaum Cina dari Partai Komunis Malaya (PKM). Mereka telah diberi latihan, bantuan senjata dan amunisi dari Force 136 yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Spencer Chapman, yaitu tentara Inggris yang mundur ke India setelah Inggris menyerahkan Tanah Melayu kepada Jepang pada bulan Februari 1942.38

Kekuatan PKM yang merupakan anggota MPAJA selama pendudukan Jepang menjadi bertambah kuat dari segi keanggotaan, bekalan senjata dan amunisi. Pada masa peralihan/transisi kekuasaan, periode menjelang penyerahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Inggris pada

³⁷ Alias Mohamed, Gerakan Sosial dan Politik Kelantan, (Kuala Lumpur: Insular Publishing House Sdn. Bhd., 1984, hal. 74; Saad Shukri, op. cit., hal. 167.

³⁸ Elina Farouk, op. cit., hal. 110.

ulan September 1945, PKM berada dalam posisi yang baik intuk merampas kekuasaan Tanah Melayu. Namun ia tidak dapat melakukannya karena jumlah tentaranya yang kurang memadai bila dibanding dengan tentara Inggris. Tambahan pula, pihak Jepang (tentara diperkirakan 100.000) masih bertahan di Tanah Melayu walaupun sudah menyerang kalah. Kedudukan Jepang itu berdasarkan ikatan perjanjian dengan Inggris. Salah satu ketentuan adalah bersedia mendukung Inggris menumpas usaha perampasan kekuasaan oleh PKM. Tambahan pula ada intruksi dari atasan PKM yaitu, Sekretarisnya Lai Teik supaya PKM bersikap lunak dan sederhana dalam perjuangan. Pada pertengahan tahun 1949 sampai dengan September 1950, terdapat lebih 65 kejadian peristiwa berdarah yang dilakukan oleh PKM yang dibantu oleh masyarakat awam Cina. Di Kelantan tentara PKM, dikenal sebagai *Askar Bintang Tiga*³⁹, melakukan keganasan yang sama seperti negeri-negeri bagian lain.

Keganasan yang dilakukan oleh PKM ini dilakukan ke atas kaum Melayu yang mengakibat kesadaran kaum Melayu untuk menghadapi kondisi tersebut dengan membentuk pasukan Pembela Tanah Air (PETA) yang berpusat di Singapura. Di Kelantan, Abdul Kadir Adabi meninggalkan tugasnya sebagai pengarang Surat Kabar Matahari dan membentuk cabang PETA. Pada dasarnya PETA dibentuk dengan tujuan

³⁹ *Ibid.*, hal. 174.

memerangi pasukan kaum Cina yaitu, MPAJA, Askar Bintang Tiga dan MOCSDA.

Sekembalinya ke Tanah Melayu pada bulan September 1945, Inggris memperkenalkan suatu bentuk pemerintahan yang berbeda dari sebelum Perang Dunia Kedua. Milne, dalam kajiannya, mengungkapkan:

"Kecenderungan untuk menubuhkan Malayan Union jelas kelihatan sebaik sahaja peperangan tamat. Apabila British kembali memerintah Tanah Melayu, mereka mensyorkan dan menubuhkan satu bentuk kerajaan baru iaitu, Malayan Union untuk meliputi seluruh Semenanjung Tanah Melayu kecuali Singapura.... Dari segi politik Singapura ditinggalkan mungkin dengan tujuan menyedapkan hati orang Melayu, iaitu memisahkan sebuah kawasan yang tiga perempat daripada penduduknya terdiri daripada orang Cina. British mungkin berniat untuk melidungi pangkalan tenterav lautnya di Singapura dari bantahan yang akan timbul dari sebuah kerajaan Tanah Melayu yang merdeka di masa hadapan."40

Pada dasarnya konsep Malayan Union adalah tidak mengakui kedaulatan Sultan Melayu, otonomi negeri bagian dan hak istimewa orang Melayu. Hal ini menyebabkan pihak Melayu beranggapan bahwa bentuk pemerintahan ini merupakan reaksi Inggris untuk membalas tindakan sultan dan orang Melayu yang kerjasama dengan Jepang dan membalas jasa kaum Cina dan India yang menjadi anggota MPAJA. Kaum Cina dan India diberi kelonggaran untuk warganegara Tanah Melayu.

⁴⁰ R. S. Milne, op. cit., hal. 35.

⁴¹ Ibid., hal. 36; Barbara Watson Andaya op. cit., hal. 295.

Dalam konsep pemerintahan Malayan Union, Raja-raja Melayu hilang kedaulatan mereka kepada raja Inggris. Pemerintahan di Tanah Melayu akan diwakili oleh seorang Gubernur. Namun tahta (kekuasaan), tempat kediaman peribadi dan elaun raja-raja akan dikekalkan, dan fungsi setiap raja hanya mempengerusikan (mengetuai) Majlis Penasehat Melayu, yang mengendalikan undang-undang Islam.

Pada tahun 1946-1955, telah muncul suatu suasana kebimbingan dalam masyarakat baik dari kaum Melayu, Cina maupun India setelah Inggris coba memperkenalkan Malayan Union. Perasaan bimbing terhadap hari depan Tanah Melayu itu telah melahirkan bentuk nasionalisme yang baru atau munculnya partai-partai politik. Antara partai-partai politik itu seperti partai-partai UMNO (1946), MIC (1946) dan MCA (1949). Partai-partai ini berkembang dan membuka cabang-cabangnya di negeri-negeri bagian. Tambahan pula terjadi gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok dalam memperjuangkan inspirasi kaum dan daerah yang ditempati-nya.

Di tingkat nasional kaum Melayu telah mengadakan Kongres Melayu pada tanggal 29 Maret 1946 di Kuala Lumpur. Persekutuan Persetiaan Melayu Kelantan (PPMK) telah menghantar 3 wakilnya di kongres itu, yaitu Ishak Lofti, Muhamad Bin Busu, dan Fadliullah Suhaimi. Kaum Melayu tidak sabar lagi dengan semangat yang meluap-luap terha-

dap pemerintah Inggris yang ingin membentuk Malayan Union mengadakan perarakan (demonstrasi) yang direncanakan oleh Persekutuan Persetiaan Melayu Kelantan (PPMK) dengan mottonya: "Kembalikan Hak Kami!, Jahanamkan Malayan Union!, Kerajaan British Pechah Harapan!, Kerajaan British Mungkir Janji!"42 Demonstrasi itu diikuti sekitar 30.000 orang yang bergerak menuju ke rumah Residen Inggris, kemudian menuju ke Istana Mahkota Seri Chemerlang, tempat kediaman Sultan untuk menyampai tuntutan mereka. Demonstrasi ini terjadi sewaktu rombongan dua anggota Parlemen Inggris Letnan Carnal D.R. Res William dan Kapten L.D. Garmans ke Kota Bharu pada awal Mei 1946. Sikap lunak Inggris akibat dari demonstrasi ini telah membebaskan pemimpin Melayu Kelantan yang dipenjara oleh BMA, seperti Sa'ad Shukri, Nik Muhammad Ab. Rahman, Nik Jaafar Hasan, Wan Ibrahim Mustafa, Husain Khala'i Haji wang, Muhamad Haji Ab. Salam dan Ustaz Haji Wan Mahmud aud. 43

Sungguhpun sikap penantangan yang keras dari kaum layu terhadap pembentukan Malayan Union, namun pihak ggris tetap juga mengumumkan pembentukan Malayan Union tanggal 1 April 1946 dan melantik Sir Edward Gent

⁴² Sa'ad Shukri, op. cit., hal. 178.

⁴³ Ibid., hal. 184.

sebagai gubernur pertama. Reaksi kaum Melayu Kelantan telah melancarkan hari perkabungan yang dipelopori oleh-PPMK sebagai memprotes sikap pemerintah Inggris yang tidak menghiraukan perasaan dan hak-hak kaum Melayu yang dihilangkan dalam undang-undang Malayan. Union.

Inisiatif penentangan tersebut diteruskan lagi oleh PPMK di bawah pemimpinnya Haji Wan Muhammad bin Haji Ahmad yaitu pada tanggal 13 April 1946 dengan menghantar surat bantahan yang ditujukan kepada Majelis Raja-raja Melayu. 44 Isi surat itu meminta agar sultan-sultan Melayu memprotes atau menarik kembali persetujuan yang telah ditangantangani mereka dengan Sir Harold MacMichael yang dianggap telah memperdaya sultan-sultan agar menandatangani perjanjian Malayan Union pada waktu sebelumnya.

Sikap penantangan kaum Melayu terhadap bentuk pemerintahan Malayan Union disebabkan kelonggaran syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan bagi kaum non-Melayu (Cina dan India) 45. Hal ini merupakan suatu masalah yang tidak dapat diterima oleh kaum Melayu. Rasa ketidakpuasan hati dan kebencian kaum Melayu terhadap kaum pendatang Cina dan India adalah merupakan dampak yang ditinggalkan dari pendudukan Jepang akibat dari tindakan MPAJA yang melakukan keganasan dan membunuh pemimpin kaum Melayu

⁴⁴ Ibid., hal. 179-183.

⁴⁵ Barbara Watson Andaya, op. cit., hal. 300.

yang berpihak pada pemerintah Jepang. 46 Sementara bagi Inggris konsep Malayan sebagai politik balas jasa terhadap partisipsi kaum Cina (MPAJA) yang ikut menentang Jepang dan membalas tindakan sultan-sultan Melayu yang membantu pendudukan Jepang. 47

Pada awal tahun 1947, didalangi PKM dibentuk pula Pan-Malayan Federation of Trade Unions (PMFTU), pada bulan Maret 1947 telah menguasai 80-90% dari kesatuan buruh di Tanah Melayu. Kegiatan mereka adalah menuntut upah yang tinggi dengan mengadakan mogok, dalam suasana kejatuhan harga karet dan tambang timah pada pertengahan tahun 1947.48

Tantangan-tantangan itu mendorong Inggris merubah kebijaksanaannya pada tahun 1948, dengan memperkenalkan Persekutuan Tanah Melayu (PTM) untuk mengganti Malayan Union dan mengembalikan hak sultan, hak otonomi negeri bagian, hak istimewa Melayu dan diperketatkan syarat menjadi kewarganegaraan. PTM diterima oleh kaum masyarakat Tanah Melayu khususnya dari golongan non-Melayu dengan rasa cemas.

Di Kelantan, 1948 sebagai realisasi dari Perjanjian Persekutuan telah dibentuk pula undang-undang pemerinta-

⁴⁶ Saad Shukri, op. cit., hal. 174.

⁴⁷ Barbara Watson Andaya, op. cit., hal. 295.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 300.

han Kelantan yang disebut "Undang-undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan. Pada dasarnya, undang-undang ini merupakan bentuk pengakuan kembali kekuasaan dan kedaulatan raja-raja Melayu, yang tidak ada pada undang-undang dalam Malayan Union.49

Pihak Cina tidak merasa puas dengan pembentukan PTM dan melakukan berbagai tindakan yang mengancam keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, Inggris memberlakukan perintah darurat pada tanggal 18 Juni 1948⁵⁰ dan mengharamkan Partai Komunis Malaya. Keadaan darurat telah menimbulkan masalah besar kepada pemerintah Inggris. Jumlah pemberontak PKM yang aktif kurang lebih 10.000 orang, tetapi dengan taktik gerilya mereka telah berhasil memporak perandakan pemerintahan Inggris. Mereka membunuh dan memusnahkan harta benda, melancarkan serangan dan kemudian lari ke dalam hutan. Walaupun Tanah Melayu tidak berbatasan dengan sebuah negara komunis, tetapi di daerah pembatasan Tanah Melayu dan Semenanjung Thailand merupakan daerah persembunyian dan sumber bekalan bagi kegiatan komunis. ⁵¹

⁴⁹ Sa'ad Shukri, op. cit., hal. 187.

⁵⁰ Jonginder Singh Jessy Sejarah Asia Tenggara 1824-1965, (Kedah: Penerbitan Darulaman, 1986) hal. 438; Saad Shukri op. cit., hal. 192; Norma Din, op. cit., hal. 122.

⁵¹ R. S. Milne, op. cit., hal. 42.

Pada bulan April 1949, Parlemen Inggris telah membuat persetujuan akan memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu dan disahkan oleh Perdana Menteri Inggris. Pada Feruari 1952, Letnan Jeneral Sir Gerald Templer tiba di Tanah Melayu menggantikan, komisaris tinggi yang dibunuh PKM (Sir Henry Gurney). Templer memperkenalkan pemilu kecil dan memberi hak kewarganegaraan kepada lebih 1/2 dari penduduk kaum Cina di Tanah Melayu dan membolehkan kaum Cina buat pertama kalinya menjadi pejabat dalam Persekutuan Tanah Melayu. Pada bulan April 1954, Templer mengumumkan bahwa pemilu untuk memilih ahli bagi Federal Legislatif Assembly (Majelis Legislatif Persekutuan) Tanah Melayu akan diadakan pada tahun 1955. 52

Pada tahun 1950, Inggris melantik Letnan-Jendral Sir Harold Briggs menjadi Direktur Gerakan menentang komunis. Briggs membuat program penempatan baru, yaitu memindahkan orang-orang Cina (Min Yuen) yang tinggal di pinggir hutan yang menjadi sumber bekalan PKM ke tempat baru itu dipagar kawat dan dikawal dengan ketat oleh tentara dan polisi. Lebih 500.000 orang telah dipindahkan ke 550 buah penempatan baru atau kampung baharu. Briggs juga mengadakan pembaharuan dalam pasukan ketenteraan dan polisi dengan mengerahkan tenaga sukarela dan tetap. Pihak PKM merasa terpukul dengan program Inggris ini dan

⁵² Barbara Waston Andaya, op. cit., hal. 304.

membalas dengan tindakan pada 6 Oktober 1951, Komisaris Tinggi Sir Henry Gurney mati dibunuh oleh satu platun gerilya PKM, yaitu di Bukit Fraser, sekitar 105 km dari Kuala Lumpur. 53 Reaksi Inggris terhadap pembunuhan itu telah memperkuatkan lagi strateginya menentang keganasan komunis dengan membentuk Federal War Executive Council (Majelis Mesyuarat Perang Persekutuan) yang diketuai oleh Briggs dan anggota-anggotanya terdiri dari Kepala Sekretaris, Commissioner Police, dan komando tentara darat dan udara. Majelis ini merancangkan gagasan untuk membinasakan komunis secara habis-habisan, dan menawarkan hadiah sebanyak \$250.000 bagi orang berhasil menangkap Ketua Komunis (PKM) yaitu , Chin Peng. Secara umum, setelah kejadian pembunuhan tersebut Inggris telah menambahkan personal tentara baik dari kalangan penduduk Tanah Melayu maupun menerima bantuan dari negara-negara Commonwealth (komanwel) seperti Australia, Rhodesia, dan New Zealand. 54

Pada tahun 1951, Komisaris Tinggi Inggris, Jendral Sir Gerald Templer menegaskan bahwa pemerintah Inggris telah memutuskan untuk membuat persiapan pengesahan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Dieh itu, pemilu percobaan diadakan pada tahun 1952 di Kuala Lumpur. Pemilu ini

⁵³ Ibid., hal. 302.

⁵⁴ Ranjit Singh Jessy, op. cit., hal. 148.



dimenangkan oleh Perikatan yang terdiri partai koalisi Melayu dan non-Melayu yaitu, UMNO dan MCA. Kemenangan partai koalisi ini merupakan suatu tantangan bagi PKM, karena usaha perjuangan mereka adalah mengobarkan api permusuhan yang telah ada antara kaum Cina dan Melayu.

Pada bulan Juli 1953, dibentuk Suruhanjaya (Komisi)
Rendel di Singapura. Keanggotaan komisi yang terdiri dari
3 orang Eropah, 3 orang Cina, seorang Melayu dan seorang
India yang diketuai atau dipimpin oleh Sir George Rendel.
Komisi ini bertujuan untuk mengkaji undang-undang dan
mencari cara-cara untuk menambah bilangan anggota yang
dipilih untuk Majelis Legislatif dan Majelis Eksekutif.
Komisi ini memperjuangkan agar Inggris memberi lebih
banyak kursi dalam majelis dan memperbanyak anggota yang
dipilih melalui pemilu bukan dilantik. Ia juga memperjuangkan peningkatan kedudukan majelis eksekutif sebagai
majelis menteri-menteri. 55

Pada bulan Mei 1954, Pihak Perikatan khususnya UMNO telah mengambil inisiatif untuk bertemu dengan Sekretaris Tanah Jajahan Inggris di London untuk mengajukan tuntutan agar pemilu diadakan pada tahun 1954. Insiatif ini merupakan rundingan pertama bagi Partai Perikatan yang mewakili rakyat Tanah Melayu memperjuangkan kemerdekaan. Tetapi tidak diterima oleh Inggris. Pihak Perikatan yang

⁵⁵ Joginder Singh Jessy, op. cit., hal. 444.

dipimpin oleh Tunku Ab. Rahman yang menjadi Ketua Menteri Tanah Melayu telah memulau musyawarah Majelis Eksekutif yang dilaksanakan oleh Komisaris Tinggi Inggris dan meletak jabatannya sebagai Ketua Menteri sebagai protes agar Inggris mempercepatkan kemerdekaan Tanah Melayu.

Kemudian pada bulan Januari 1956 berangkat lagi satu rombongan ke London untuk meminta supaya Tanah Melayu dimerdekakan. Dampak dari pemilu dan rombongan kemerdekaan itu adalah dibentuknya Reid Commission (Komisi Reid) pada bulan Juni 1956, yang terdiri dari Sir Lord Reid (Hakim Rayuan), Ivor Jennings (Pakar Undangundang Perlembagaan Komanwel), William Mckell (mantan Gubernur-Jendral Australia), B. Malik (mantan Ketua Hakim Allahabad, India), Abdul Hamid (Hakim Pengadilan Tinggi Pakistan Barat). 56 Komisi itu bertugas untuk menyiapkan sebuah undang-undang bagi Tanah Melayu yang merdeka. Anggota-anggota komisi ini dikatakan dipilih dari orang diluar dari Tanah Melayu dan Inggris. Hal yang menjadi kontrovesial dari penyusunan perlembagaan itu ialah fasal-fasal mengenai kewarganegaraan, hak-hak istimewa orang Melayu. Fasal kewarganegaraan yang memberi hak kepada semua orang yang tinggal di Tanah Melayu sama ada atas dasar kelahiran ataupun memenuhi keperluan syarat kediaman, bahasa, dan ikrar/sumpah taat setia.

⁵⁶ Ibid., hal. 433; R. S. Milne, op. cit., hal. 47.

Pada dasarnya, pada tahun 1948-1960 dari segi sosio-politik, Tanah Melayu menghadapi ancaman yang besar dengan keganasan komunis. Pemerintah Ingris mengumumkan perintah darurat. Tindakan pemerintah ini mengakibatkan, pada satu sisi mempercepatkan kemerdekaan bagi Tanah Melayu, dari sisi lain menjadi hambatan kepada sebarang perjuangan yang berbentuk lokal yang dinilai merugikan pihak Inggris dan tidak sejalan dengan pemikirannya. Situasi kerawanan ini baru berakhir sekitar tahun 1955. Pada tahun 1960 undang-undang ditarik oleh pemerintah Malaysia yang sudah merdeka.

3.4 Gerakan-gerakan Pemisahan

Sebelum membicarakan gerakan pemisahan yang terjadi di Kelantan pada tahun 1955-1956 pada bab berikutnya, perlu dibahas terlebih dahulu dua gerakan pemisahan yang terjadi sebelumnya yaitu, Gerakan Pemisahan Pulau Pinang (1948-1949 dan 1953-1957) dan Gerakan Pemisahan Johor 1955. Kedua gerakan ini secara tak langsung mempunyai pengaruh terhadap munculnya Gerakan Pemisahan di Kelantan.

3.4.1 Gerakan Pemisahan Pulau Pinang 1948-1949 dan 1953-

Munculnya Gerakan Pemisahan Pulau Pinang setelah Inggris memperkenalkan bentuk pemerintahan Persekutuan Tanah Melayu (PTM) pada tahun 1948. Tujuan Inggris membentuk PTM adalah merupakan usaha mengsentralisasi kekuasaannya ke Kuala Lumpur di bawah Komisaris Tinggi dari residen-residen Negeri-negeri Melayu Bersekutu, Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dan Negeri-negeri Selat (tidak termasuk Singapura). ⁵⁷ Bagi kaum Cina dari golongan pedagang dan golongan berpendidikan Inggris yang menjadi pegawai dalam pemerintahan Inggris di Pulau Pinang bersekutu pemerintahan terpusat itu yang menyebabkan kaum Cina berada di bawah kaum Melayu dalam susunan struktur pemerintahan. Joginder dalam bukunya menyebutkan,

"Gerakan ini dimulakan oleh orang Cina dan masyarakat saudagar Negeri-negeri Selat. Kumpulan orang Cina ini merupakan sebuah kumpulan penting dalam pemerintahan British dan terdiri daripada orang Cina berpelajaran Inggris yang memainkan peranan penting dalam bahagian masyarakat pentadbiran, perdagangan dan profesional. Kumpulan ini memegang kuasa yang banyak semasa Pulau Pinang merupakan

⁵⁷ B. Simandjuntak, op. cit., hal. 63.

⁵⁸ Kelompok Pemisahan Pulau Pinang diwujudkan yang diketuai oleh D.A. Mackay, yang juag merupakan ketua Dewan Perniagaan Cina Pulau Pinang. Kelompok ini mau membawakan kasus mereka ke Majelis Negeri-negeri Selat. B. Simandjuntak, Ibid., hal. 86.

sebahagian dari negeri-negeri Selat, bimbang akan kehilangan kedudukan ini di dalam Persekutuan yang akan diunggul oleh Negeri-negeri Melayu."⁵⁹

Namun pada dasarnya, gerakan ini adalah memperjuangkan eksistensi kelompok Cina dari segi kedudukan
politik dan ekonomi mereka di Pulau Pinang yang sudah
dinikmati sewaktu Pulau Piang merupakan bagian dari Negeri-negeri Selat. Kelompok ini tidak ingin hak-hak
keistimewaan dihilangkan dan posisi Pulau Pinang sebagai
sebuah pelabuhan bebas diubah statusnya. 60 Kelompok ini
juga memohon agar mereka menjadi rakyat Inggris dan
menghendaki kedudukan yang sama seperti Singapura.

Mereka mahukan kembali taraf mereka sebagai rakyat Inggris dan bersedia untuk menyertai semula Singapura dalam sebuah susunan politik yang 'berasingan, terletak secara langsung di bawah kerajaan British. Masyarakat perniagaan menegaskan bahawa Pulau Pinang merupakan pelabuhan bebas semenjak penubuhannya pada tahun 1786 dan bahawa keistimewaan ini akan lenyap sekiranya ia menjadi bahagian daripada Persekutuan "61

Namun pihak Inggris tetap melaksanakan, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu pada tanggal 1 Februari 1948 dan

⁵⁹ Joginder, op. cit., hal. 428.

^{60 &}quot;Francis Light telah mewariskan kepada Pulau Pinang suatu tradisi pelabuhan bebas yang melalui peredaran masa menjadi amat berpadu dengan sejarah, ekonomi dan kehidupan Negeri-negeri Selat dan penduduknya. Ini menyebabkan orang-orang pulau itu tidak dapat diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan dasar-dasar baru pemaduan politik dan ekonomi yang bermula di Kuala Lumpur". B. Simandjuntak, op. cit., hal. 84.

⁶¹ Joginder Singh, op. cit., hal. 428.

Pulau Pinang berada di bawah susunan pemerintahan yang dikuasai oleh pemerintahan pusat di Kuala Lumpur yang dimonopoli oleh kaum Melayu. Pulau Pinang diubah statusnya dan pajak-pajak diberlakukan ke atas barang-barang yang diimpor dan diekspor.

Cukai eksport telahpun dikenakan ke atas kelapa kering, minyak kelapa dan minyak kelapa sawit. Mereka bimbang yang banyak barang lain juga akan dicukai dan akhirnya menamatkan status pelabuhan bebas Pulau Pinang.⁶²

Gerakan ini tidak berhasil karena tidak mendapat sokongan dari pemerintah Inggris dan tantangan yang kuat dari kaum Melayu. 63 Pemerintahan Inggris kurang menanggapi gerakan itu karena sedang menghadapi adalah ancaman dari keganasan komunis. Pemerintah Inggris ingin mengeratkan kembali hubungan baik dengan kaum Melayu dalam menghadapi keganasan komunis yang kebanyakan terdiri dari kaum Cina. 64 Adapun reaksi dari kaum Melayu terhadap usaha pemisahan ini dilakukan oleh partai UMNO yang dipimpin oleh Dato Onn bin Jaafar yang menentang niat dan hasrat dari kaum Cina yang ingin membagikan Tanah Melayu yang sudah kecil kepada bentuk yang lebih kecil lagi.

⁶² Ibid., hal. 428.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid. Usaha Inggris ingin mengerat hubungan tersebut karena kaum Melayu yang pernah dilukai perasaan mereka oleh pembentukan Malayan Union.

Bagi orang Melayu yang dipimpin oleh Dato' Onn menentang keras gerakan tersebut karena tidak mau "membedahkan" Tanah Melayu yang sememangnya negeri yang kecil. dan gerakan itu lenyap pada tahun 1949, setelah diadakan suatu rapat oleh golongan pemisah tersebut yang hanya di hadiri oleh 216 orang saja.

Kemudian pada tahun 1953, muncul lagi gerakan pemisahan kedua di Pulau Pinang yang diakibatkan terjadinya penggantian pucuk pimpinan dalam UMNO. Tunku Ab. Rahman yang menggantikan posisi Dato' Onn Bin Jaafar dalam UMNO menimbulkan keraguan dan kebimbingan kaum Cina terhadap pemimpin baru itu. Mereka beranggapan penggantian itu akan merubah kebijaksanaan yang dibuat sebelumnya. Oleh karena itu kaum Cina di Pulau Pinang bangkit dan memproklamirkan diri mereka sebagai "Rakyat Cina Ratu Britain" pada tahun 1953. Mereka ingin keluar dari Persekutuan Tanah Melayu. Namun usaha itu gagal karena kurang dukungan Inggris dan tidak mendapat persetujuan dari Tunku Ab. Rahman yang menjadi ketua menteri Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1955. Gerakan Pemisahan Pulau Pinang kedua ini lenyap begitu saja.

3.4.2 Gerakan Pemisahan Johor 1955

Munculnya Gerakan Pemisahan Johor pada tahun 1955, yaitu setelah pemilu 1955 dan terbentuknya Kabinet Tunku Ab. Rahman. Rasa kebimbingan dan ketidakpercayaan terha-

⁶⁵ Ibid.

dap kabinet Tunku Ab. Rahman yang memimpin pemerintahan Tanah Melayu sebagai Perdana (Ketua) Menteri. Tunku Ab. Rahman merupakan putera raja dari kerajaan Kedah sementara Dato' Onn Jaafar yang berasal dari negeri Johor dalam memimpin partai Partai Perikatan dari kaolisi partai UMNO. Kaum Melayu merasa bimbing dengan kepimpinan Tunku Ab. Rahman yang bukan berasal dari Johor dan tentunya akan mengabaikan kepentingan kaum Melayu Johor.

Gerakan ini berawal dari ucapan Sultan Ibrahim pada suatu acara resmi "kejadian ini berlaku di perayaan jubli intan Sultan Ibrahim dari Johor pada bulan September 1955." 66 Gerakan ini dibentuk dengan tujuan ingin keluar dari Persekutuan Tanah Melayu yang berada dibawah Kabinet Tengku Ab. Rahman seperti halnya Gerakan Pulau Pinang. Kabinet Tengku Ab. Rahman telah mengambil langkah dengan memulaukan acara sultan Johor tersebut dan membuat keputusan mengecek terlebih dahulu setiap ucapan resmi sultan dalam setiap acara yang diadakan.

"Akibatnya, Tunku dan lain-lain pemimpin perikatan memulaukan perayaan itu...partai perikatan mengambil keputusan bahawa semua ucapan sultan akan disemak terlebih dahulu oleh majlis mesyuarat kerja kerajaan negeri".⁶⁷

⁶⁶ Ibid., hal. 429.

⁶⁷ Ibid., hal. 430.

Keadaan tersebut muncul lagi setelah dihidupkan pula oleh Ungku Abdullah, seorang anggota majelis negeri yang mengumpul sokongan dan membentuk Persatuan Kebangsaan Melayu Johor (PKMJ).

> "Tengkarah Johor ini bermula apabila Kerajaan Perikatan baru sahaja dipilih untuk memegang jawatan. Bahagian UMNO yang militan dan radikal menuntut kerajaaan sendiri dalam masa dua tahun dan kemerdekaan seterusnya dalam masa empat tahun... Ia menuntut supaya Johor menyisihkan diri dari Persekutuan dan menjadi sebuah negeri merdeka di bawah naungan British".68

Namun usaha tersebut tidak berhasil setelah Tengku Mahkota (raja muda yang mengganti sementara sultan Johor) menanda tangani Perjanjian Persekutuan sewaktu sultan keluar negeri, yaitu ke Eropah.

⁶⁸ Ibid.

BAB IV

GERAKAN PEMISAHAN KELANTAN

4.1 Jalannya Peristiwa

Dalam membicarakan Gerakan Pemisahan Kelantan 19551956, penulis akan cuba membahas faktor-faktor yang berpengaruh baik secara tak langsung maupun langsung bagi
menemukan bentuk dari gerakan tersebut. Faktor-faktor tak
langsung yang mewujudkan gejala awal kepada gerakan ini
akan dilihat pada dampak pendudukan Jepang 1941-1945 dan
perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kebijaksanaan
politik Inggris dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1955.
Perubahan kebijaksanaan politik secara makro ini telah
membawa perubahan pula kepada kondisi sosial politik
masyarakat Kelantan yang membawa kepada proses terbentuknya usaha gerakan pemisahan tersebut.

Selama kurang lebih empat tahun pendudukan Jepang (Oktober 1941 s/d September 1945), masyarakat Kelantan menghadapi kehidupan yang sukar dan kritis di mana kegiatan sosial ekonomi tidak dapat berjalan dengan baik akibat dari pemerintahan tentara Jepang. Terbengkalainya lahang pertanian dan kegiatan industri, musnahnya sarana dan prasarana, dan putusnya jaringan komunikasi perdagangan dengan dunia luar telah menyebabkan kekurangan bahan pangan dan sandang (makanan dan pakaian) dan meningkat tingginya kadar inflasi. Hal ini menyebabkan

BAB IV

GERAKAN PEMISAHAN KELANTAN

4.1 Jalannya Peristiwa

Dalam membicarakan Gerakan Pemisahan Kelantan 19551956, penulis akan cuba membahas faktor-faktor yang berpengaruh baik secara tak langsung maupun langsung bagi menemukan bentuk dari gerakan tersebut. Faktor-faktor tak langsung yang mewujudkan gejala awal kepada gerakan ini akan dilihat pada dampak pendudukan Jepang 1941-1945 dan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kebijaksanaan politik Inggris dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1955. Perubahan kebijaksanaan politik secara makro ini telah membawa perubahan pula kepada kondisi sosial politik masyarakat Kelantan yang membawa kepada proses terbentuknya usaha gerakan pemisahan tersebut.

Selama kurang lebih empat tahun pendudukan Jepang (Oktober 1941 s/d September 1945), masyarakat Kelantan menghadapi kehidupan yang sukar dan kritis di mana kegiatan sosial ekonomi tidak dapat berjalan dengan baik akibat dari pemerintahan tentara Jepang. Terbengkalainya lahang pertanian dan kegiatan industri, musnahnya sarana dan prasarana, dan putusnya jaringan komunikasi perdagangan dengan dunia luar telah menyebabkan kekurangan bahan pangan dan sandang (makanan dan pakaian) dan meningkat tingginya kadar inflasi. Hal ini menyebabkan

kehidupan masyarakat mengalami penderitaan dan kesukaran yang secara tidak langsung telah menimbulkan sikap anti penjajah.

17 '

Keadaan yang kacau ini berkelanjutan, walaupun Jepang sudah meninggalkan Tanah Melayu dan diganti oleh pemerintahan British Military Administration (BMA). BMA ditugaskan untuk mengontrol keadaan setelah perang yang bermula pada bulan September 1945¹. Pada akhir bulan September 1945 sampai dengan awal Oktober 1945, keganasan komunis pula memuncak di Kelantan. Keganasan komunis ini dilakukan oleh pasukan Askar Bintang Tiga dan cuba merampas kekuasaan dengan melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap kaum Melayu di Kota Bahru. Masyarakat Melayu yang menjadi sasaran keganasan Askar Bintang Tiga karena mereka berkerja sama dengan pemerintah Jepang. Namun usaha tersebut gagal setelah tentara BMA berhasil memadamkannya.²

Aksi pasukan Askar Bintang Tiga yang terdiri dari kaum Cina ini menimbulkan pengalaman pahit bagi kaum Melayu. Pengalaman pahit ini mewujudkan pandangan dan sikap benci kaum Melayu terhadap kaum Cina yang ingin menguasai

¹ Tan Sri Dato Abdullah Ayub, Cara Pemerintahan Tanah Melayu 1957-1963, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1978), hal. 27.

² Sa'ad Shukri Bin Haji Muda, Detik-Detik Sejarah Kelantan, (Kota Bharu: Pustaka Aman Press, 1971), hal. 174.

Tanah Melayu pada umumnya dan Kelantan khususnya. Peristiwa percubaan merampas dan tindakan keganasan Askar Bintang Tiga ini merupakan faktor pendorong dibentuknya Persekutuan Persetiaan Melayu Kelantan (PPMK) oleh kaum Melayu. Kedudukan sultan dan kaum Melayu yang tergugat ini juga telah mewujudkan inisiatif PPMK untuk menghantar surat kepada Sultan Kelantan yang mengandung isi rasa solidaritas kaum Melayu, sikap tidak senang mereka terhadap kaum Cina yang menyebabkan penderitaan kaum Melayu dan meminta Sultan mengambil sikap berhati-hati dan curiga baik terhadap pemerintah Inggris maupun kaum Cina. Peristiwa percubaan perampasan kuasa oleh kaum Cina dan usaha dari PMKK ini yang memungkinkan bangkitnya semangat nasionalisme kaum Melayu dan kebencian terhadap kaum Cina.

Selama pemerintahan BMA, Sir Harold Macmichael telah diutus ke Tanah Melayu oleh pemerintah Inggris di London pada bulan Oktober 1945 yang bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dan tandatangan sultan-sultan Melayu terhadap perubahan bentuk pemerintahan BMA kepada Malayan Union. Macmichael kemudian kembali ke London pada bulan Januari 1946 dengan mendapat semua tanda tangan

^{3.} Ibid., hal. 174-176.

dari sultan-sultan Melayu. A Namun tindakan Michael dalam mendapatkan tandatangan itu dinilai curang oleh kaum Melayu. Michael dalam mendapatkan tanda tangan dari Sultan tidak memberi kesempatan untuk Sultan berunding dulu dengan para penasehat dan lembaga pemerintahan Kelantan yaitu Majelis Legisatif dan ia juga mengugut akan mengganti sultan yang dinilai telah bersekongkol dengan pemerintah Jepang. Oleh itu, Michael dengan mudah mendapatkan persetujuan tersebut, karena sultan takut tahta diganti jika tidak menyetujui pembentukan MU.

Sungguhpun tindakan Michael dikecam keras oleh kaum Melayu, pihak Inggris tetap dengan pendiriannya untuk membentuk MU yang diumumkan pada tanggal 1 April 1946.6 Hal ini juga telah menimbulkan rasa tidak puas hati kaum Melayu terhadap pemerintah Inggris. Tindakan oleh Inggris mengumumkan MU adalah sebagai pengganti pemerintahan BMA dan juga sebagai penataan kembali susunan pemerintahan di Tanah Melayu setelah Perang Dunia Kedua.

⁴ Tan Sri Dato', op. cit., hal. 28.

⁵ Ibid.

⁶ R.S. Milne dan Diane K. Mauzy, Politik dan Kerajaan di Malaysia, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1982), hal. 37; Mohd Tajuddin bin Haji Abdul Rahman, Dato Onn Jaafar Tokoh Nasionalis, (Petaling Jaya: Pelanduk Publication Malaysia Sdn. Bhd., 1987), hal. 50.

Bagi kaum Melayu penataan pemerintahan oleh Inggris telah menyebabkan awal rasa kebencian dan ketidakpercayaan kaum Melayu terhadap pemerintah Inggris. Hal ini disebabkan bentuk undang-undang MU yang menghilangkan kedaulatan sultan Melayu, hak otonomi negeri bagian, hakhak keistimewaan orang-orang Melayu, kelonggaran syarat kewarganegaraan kepada kaum pendatang. Pengumuman MU menjadikan semangat nasionalisme kaum Melayu bertambah dan kebencian terhadap pemerintah Inggris makin kuat.

Bagi kaum Melayu perjuangan menentang pembentukan MU disalurkan melalui organisasi (PPMK) yang dibentuk oleh golongan intelektual Melayu yang berpendidikan Sekolah Majlis, dan Sekolah Melayu. B Sikap penentangan yang diprakrasai oleh PPMK ini merupakan peristiwa penentangan terhadap kebijaksanaan politik Inggris yang sebelumnya PPMK ditujukan untuk kaum Cina. Penentangan yang keras dari kaum Melayu ini ditambah dengan kondisi sosial masyarakat Melayu Kelantan yang masih kuat berpegang pada ikatan tradisional.

Setelah gagal melaksanakan MU, Inggris menggantikan dengan bentuk Persekutuan Tanah Melayu (PTM) pada tanggal

⁷ Sa'ad Shukri, op. cit, hal. 174; Alias Mohammad, Gerakan Sosial dan Politik Kelantan (Kuala Lumpur: Insular Publishing Kouse Sd. Bhd., 1984), hal. 79.

⁸ Alias Mohamed, op. cit., hal. 83.

1 Februari 1948. Penggantian MU kepada PTM, pada dasarnya telah menyenangkan masyarakat Melayu pada umumnya, namun bagi pemerintah Kelantan masih merasa ragu dan bimbing atas kebijaksanaan baru politik Inggris itu.

Sikap berhati-hati dan curiga kaum Melayu Kelantan terhadap kaum Cina semakin kuat ketika All Malaya Council of Joint Action (Majelis Tindakan Bersama Tanah Melayu atau AMCJA) meminta pemerintah Inggris mengakui partainya sebagai partai yang mewakili semua kaum di Tanah Melayu.* Pada dasarnya pembentukan AMCJA merupakan usaha penentangan kaum Cina terhadap pembentukan PTM. 9 Di samping itu gerakan pemisahan di Pulau Pinang yang dipelopori oleh golongan pedagang dan birokrat Cina adalah pengaruh tak langsung pada perkembangan politik di Kelantan. Sungguhpun kedua usaha dari kaum Cina tersebut gagal, karena pihak Ingris menolak permohonan mereka, namun usaha kaum Cina di Pulau Pinang dan tindakan Tan Cheng Lock ini meresahkan kaum Melayu Kelantan. Kaum Cina dianggap sudah berusaha pula merebut posisi kekuasaan baik di Pulau Pinang maupun dalam pemerintahan di Tanah Melayu di tingkat pusat.

^{*} AMCJA didirikan pada bulan Februari 1946 dan diketuai oleh Tan Cheng Lock.

⁹ Ranjit Singh Mahli, Sejarah Kertas 2 STPM, (Petaling Jaya: Federal Publication Sdn. Bhd., 1990) hal. 129.

Setelah diumumkan undang-undang PTM pada tingkat Persekutuan (Pusat) oleh pemerintah Inggris. Pemerintah Kelantan mengambil inisiatif membentuk juga undang negeri yang dikenal sebagai *"Perjanjian Kelantan"* pada tanggal 1 Februari 1948, yaitu pada hari. diumumkan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. 10 Pada dasarnya, Perjanjian Kelantan merupakan pelaksanaan dari Perjanjian Persekutuan yang dibuat antara Tanah Melayu dan pemerintah Inggris yang meliputi antara lain pengakuan kekuasaan Inggris ke atas Kelantan, penerimaan residen dan gajinya, pembentukan Majelis Legislatif dan Dewan Negeri. Namun Perjanjian Kelantan merupakan undang-undang negeri yang disebut sebagai Undang-undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan yang mengandung fasal-fasal yang lebih khusus mencakupi masalah-masalah politik, sosial dan ekonomi negeri itu. Pada dasarnya, isi undang-undang itu adalah mengembalikan eksistensi sultan, hak-hak orang Melayu, kedudukan Agama Islam dan otonomi negeri.

Latar belakang tindakan pemerintah Kelantan membentuk Undang-undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan
1948, yang mempunyai empat latar belakang pokok yaitu,
tindakan Askar Bintang, Undang-undang Malayan Union,
usaha Gerakan Pemisahan Pulau Pinang dan AMCJA oleh kaum
Cina. Sungguhpun bentuk pemerintahan PTM telah mengemba-

¹⁰ Sa'ad Shukri, op. cit., hal. 187.

likan eksistensi sultan-sultan Melayu, otonomi negeri bagian dan hak-hak keistimewa kaum Melayu, namun penerimaan terhadap PTM bagi kalangan pejabat dalam pemerintahan Kelantan adalah setengah hati dan terpaksa menerimanya karena lebih baik dari Malayan Union, terutama dalam masalah syarat kewarganegaraan yang diperketatkan tempoh bagi kaum pendatang Cina dan India untuk menjadi warganegara Tanah Melayu. 11

Undang-undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan ini diumumkan oleh Sultan Ibrahim pada hari yang bersamaan dengan perlantikan Raja Muda atau Tengku Mahkota, Tengku Yahya Putera sebagai bakal Sultan pengganti setelah beliau. 12 Oleh karena itu, Perjanjian Kelantan dianggap sebagai pengurniaan atau pemberian Sultan Kelantan (Sultan Ibrahim) untuk mengatur urusan pemerintahan dinegeri tersebut.

Secara umumnya, kebijaksanaan Inggris dalam perubahan politik dengan membentuk Malayan Union dan Perseku-

¹¹ Syarat kewarganegaran Tanah Melayu bagi kaum pendatang Cina dan India diperketatkan dengan tempoh sekurang-kurang 15 tahun hingga 25 tahun dari sebelumnya 10 tahun hingga 15 tahun yaitu bentuk persyaratan otomatis Pada syarat permohonan 8 tahun dari 12 tahun dari sebelumnya 5 dari tahun telah mendiami Tanah Melayu. Elina Farouk, Meniti Kejayaan Sejarah Malaysia SPM, (Petaling Jaya Persekutuan Preston Sdn. Bhd., 1989) hal. 120 dan 124; Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya, Sejarah Malaysia, (Macmillan Publishers Malaysia Sdn. Bhd., 1983) hal. 299.

¹² Saad Shukri, op. cit., hal. 190.

likan eksistensi sultan-sultan Melayu, otonomi negeri bagian dan hak-hak keistimewa kaum Melayu, namun penerimaan terhadap PTM bagi kalangan pejabat dalam pemerintahan Kelantan adalah setengah hati dan terpaksa menerimanya karena lebih baik dari Malayan Union, terutama dalam masalah syarat kewarganegaraan yang diperketatkan tempoh bagi kaum pendatang Cina dan India untuk menjadi warganegara Tanah Melayu. 11

Undang-undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan ini diumumkan oleh Sultan Ibrahim pada hari yang bersamaan dengan perlantikan Raja Muda atau Tengku Mahkota, Tengku Yahya Putera sebagai bakal Sultan pengganti setelah beliau. 12 Oleh karena itu, Perjanjian Kelantan dianggap sebagai pengurniaan atau pemberian Sultan Kelantan (Sultan Ibrahim) untuk mengatur urusan pemerintahan dinegeri tersebut.

Secara umumnya, kebijaksanaan Inggris dalam perubahan politik dengan membentuk Malayan Union dan Perseku-

¹¹ Syarat kewarganegaran Tanah Melayu bagi kaum pendatang Cina dan India diperketatkan dengan tempoh sekurang-kurang 15 tahun hingga 25 tahun dari sebelumnya 10 tahun hingga 15 tahun yaitu bentuk persyaratan otomatis Pada syarat permohonan 8 tahun dari 12 tahun dari sebelumnya 5 dari tahun telah mendiami Tanah Melayu. Elina Farouk, Meniti Kejayaan Sejarah Malaysia SPM, (Petaling Jaya Persekutuan Preston Sdn. Bhd., 1989) hal. 120 dan 124; Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya, Sejarah Malaysia, (Macmillan Publishers Malaysia Sdn. Bhd., 1983) hal. 299.

¹² Saad Shukri, op. cit., hal. 190.

tuan Tanah Melayu, telah melahirkan sikap ketidakpercayaan dan berhati-hati kaum Melayu terhadap kaum Cina yang terlibat dalam pemerintahan di tingkat pusat. Bagi mereka kebijaksanaan politik Inggris itu merupakan punca timbulnya masalah perkauman dan perbedaan agama karena telah membawa masuk kaum Cina dan India ke Tanah Melayu sehingga Tanah Melayu menjadi sebuah kehidupan masyarakat majemuk. Hal ini juga disebabkan oleh sikap hidup kaum Melayu¹³ yang fanatik terhadap ajaran Islam dan kaum pendatang yang menjadi anak emas pemerintah Inggris sehingga terjadinya suatu jurang hubungan yang tegang dan timbulnya konflik antar kaum.¹⁴

Organisasi PPMK yang merupakan saluran inspirasi masyarakat Melayu Kelantan telah mendapat dukungan dari kalangan pemimpin Melayu yang berada dalam pemerintahan seperti pada Majelis Agama Islam dan Adat-istiadat Melayu Kelantan. Cita-cita perjuangan untuk mempertahan-kan eksistensi politik, ekonomi dan sosial kaum Melayu

Islam, kondisi pendidikan pondok dan pengaruh Agama Islam, kondisi geografis, hutan rimba, sungai, bukit-bukau, komunikasi dengan negeri-negeri tetangga telah memberi sumbangan kepada nilai-nilai hidup, falsafah dan cita-cita rakyat negeri Kelantan. Alias Mohamed, Kelantan, Politik dan Dilema Pembangunan, (Kuala Lumpur: Gateway Publishing House, 1989), hal. 26.

¹⁴ Kemuncak ketegangan hubungan antar kaum khususnya kaum Melayu dan Cina adalah tercetusnya Peristiwa 13 Mei 1969, yaitu tragedi konflik fisik antar kaum Melayu dan Cina di Tanah Melayu yang dikenal sebagai peristiwa hitam dalam sejarah Malaysia.

melalui organisasi ini merupakan suatu kesadaran nasionalisme kaum Melayu berpendidikan dan juga merupakan bermulanya suatu zaman baru dalam sejarah pergerakan nasional negeri itu.¹⁵

Kesadaran nasionalisme di negeri ini yang membawa dampak kepada masyarakat Melayu dan kaum pendatang di tingkat nasional sehingga pada periode berikutnya mendorong munculnya partai-partai politik seperti UMNO, MIC, MCA, PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat), PKMM (Partai Kebangsaan Melayu Malaya), API (Angkatan Pemuda Insaf), AWAS (Angkatan Wanita Sadar), Partai Negara. 16 Partai-partai politik ini memperjuangkan nasib dan kedudukan masingmasing kaum di Tanah Melayu, ada yang bersifat radikal dan ada yang berkerja sama dengan Inggris. Pada akhir tahun 1945 hingga 1950 dapat dikatakan sebagai awal muncul dan terbentuknya partai-partai politik yang berbentuk perkauman dalam sejarah pergerakan nasionalisme di Tanah Melayu. 17

¹⁵ Alias Mohamed, Gerakan Sosial dan Politik..., hal. 81.

¹⁶ Ranjit Singh Mahli, op. cit., hal. 128.

¹⁷ UMNO dibentuk pada 11 Mei 1946, oleh Dato Onn Jaafar dengan motto perjuangan "memperjuangkan dan memelihara hak-hak kaum Melayu, dan menuntut Malayan Union dihapuskan". MIC didirikan pada 8 Agustus 1946 presidennya John Thivy dengan motto partainya "mempertahankan hak-hak kaum India", MCA dibentuk pada 27 Februari 1949 dengan pemimpinnya Tan Cheng Lock dengan mottonya "melindungi hak-hak dan kepentingan kaum Cina di Tanah Melayu,

Dalam perkembangan kebijaksanan politik Inggris, yaitu pada bulan April tahun 1951, ia telah memperkenalkan Member System (Sistem Keanggotaan) dengan mengadakan pemilihan (pemilu) untuk enam orang anggota bagi Federal Legislatif Assembly di Kuala Lumpur. Keenam anggota tersebut dipilih dari penduduk Tanah Melayu yang bertang- . gungjawab menjalankan tugas-tugas penting dalam pemerintahan Persekutuan Tanah Melayu yang sebelumnya dipegang orang Inggris. Hasil dari pemilu tersebut telah dipilih tiga orang Melayu, seorang Eropa, seorang Cina dan seorang Ceylon (yang mewakili kaum India). 18 Anggota-anggota majelis tersebut diserahkan tugas menjadi menteri pada Jabatan Hal-Ehwal Dalam Negeri (Departemen Dalam Negeri); Departemen Pertanian dan Perhutanan; Kesehatan; Departemen Tanah, Galian dan Perhubungan; dan Departemen Kerjaraya dan Perumahan. Di mana Dato Onn bin Jaafar sebagai pemimpin Partai Perikatan telah diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri dari partai UMNO, Thuraisingam ...Continued...

mewujudkan suasana keharmonian antar kaum ke arah pembangunan sebuah negara yang bersatu padu".

¹⁸ Sebelum bulan Desember 1951 yaitu, pada bulan pada tahun yang sama, terdapat 6 orang ahli Federal Legislative Assembly dipilih yang terdiri dari 3 orang Melayu, seorang Eropah, seorang Cina dan seorang Caylon (yang mewakili kaum India atau MIC) dengan jabatan-jabatan yang diserahkan adalah Jabatan Hal-ehwal Dalam Negeri; Pertanian dan Perhutanan; Kesehatan; Tanah, Galian dan Perhubungan; dan Kerjaraya dan Perumahan. Elina Farouk, op. cit., hal. 133.

sebagai Menteri Pelajaran dari MIC (India) dan Kolonel Hau Shik Lee sebagai Menteri Kesehatan dari MCA (Cina). 19
Bermula tahun 1951 dalam sejarah pemerintahan Tanah Melayu jabatan menteri dipegang oleh kaum Cina dan India. Keadaan berkelanjutan pada bulan Februari 1952, apabila anggota untuk kursi Federal Legislatif Assembly ditambah lagi dari 9 menjadi 12 kursi untuk diperebutkan. 20 Sembilan kursi dimenangkan oleh Partai Perikatan UMNO-MCA. 21 Pada kabinet Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri, para menteri kabinetnya terdiri dari pemimpin partai MIC dan MCA yang merupakan kaolisi dalam Partai Perikatan.

Pemilihan anggota bagi Federal Legislatif Assembly merupakan suatu langkah pembaharuan dalam politik Inggris karena sebelumnya anggota-anggota dalam majelis tersebut dilantik dari bangsa Inggris oleh Komisaris Tinggi Inggris. Kebijaksanaan politik Inggris yang memberi kesempatan kepada penduduk Tanah Melayu melalui pemilu yang memberi peluang kepada kaum Cina dan India untuk memegang jabatan menteri di tingkat pusat merupakan faktor-faktor

¹⁹ Elina Farouk, op. cit., hal. 133.

²⁰ Ranjit Singh Mahli, op. cit., hal. 151.

²¹ Partai Perikatan adalah gabungan antara partai UMNO dan MCA yang dibentuk pada tahun 1952. Kemudian pada tahun 1955 MIC pula masuk menjadi koalisi dalam Partai Perikatan. Jadi pada tahun 1955, bermulanya 3 partai yang mewakili tiga kaum di Tanah Melayu berada di bawah satu payung induk partai politik yaitu, Partai Perikatan.

yang mewujudkan kemarahan kaum Melayu Kelantan kepada pihak Inggris dan juga kepada kaum Cina dan India yang mengambil kesempatan itu. Dalam pada itu, sebagian besar kaum Melayu Kelantan juga merasa tidak puas terhadap Partai UMNO di tingkat pusat yang berkaolisi dengan kaum Cina dan India dalam membentuk Partai Perikatan pada tahun 1952. Hal ini juga yang membawa munculnya Partai Islam SeMalaya (PAS). Bagi kaum Melayu sikap UMNO merugikan kaum Melayu sendiri yang menyebabkan eksistensi Melayu dalam pemerintahan terjejas dan juga masa depan kaum Melayu yang terpaksa berkongsi kursi dalam pemerintahan di Tanah Melayu.

Pihak Inggris memperkenalkan pemilu di Tanah Melayu ini merupakan suatu usaha menerapkan sistem pemerintahan demokrasi yang memberi tempat dan kesempatan kepada kaum Cina dan India untuk mendapat posisi dalam politik di Tanah Melayu. Kesempatan ini bagi kaum Cina MCA dan India merupakan suatu peluang yang baik dalam mendapat posisi dalam pemerintahan Tanah Melayu pada masa itu. Maka, bergabungnya MCA dan MIC dalam Partai Perikatan yang dibentuk oleh kaum Melayu adalah suatu pendekatan dalam merebut kekuasaan dalam politik. Hal ini menyebabkan rasa ketidakpuasan kaum Melayu Kelantan pada tahap awal terhadap Partai Perikatan yang berkuasa di tingkat pusat.

Perhatian pemerintah Inggris terhadap kaum pendatang diteruskan dan diperluaskan lagi oleh Komisaris Templer pada tahun 1952. Ia memperkenalkan pemilu kecil, majelis kampung, dan memberikan taraf kewarganegaraan kepada lebih separuh daripada orang-orang Cina; menggabungkan War Executive Council (Majelis Perang) dengan Federal Council (Majelis Musyawarah Kerja Kerajaan); dan membolehkan orang-orang Cina buat pertama kalinya menjadi pejabat dalam pemerintahan sipil di Tanah Melayu (Perkhidmatan Awam Tanah Melayu).22

Dalam melaksanakan kebijaksanaan ekonomi, Inggris lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dari segi sarana dan prasarana di kawasan Pantai Barat Tanah Melayu karena kaya dengan hasil buminya (tambang timah dan karet). Kawasan ini juga menjadi tumpuan penempatan penduduk kaum Cina dan India. Perhatian dan tumpuan kebijaksanaan Inggris ini sepertinya sebagai satu tanggungjawab moralnya terhadap kaum pendatang. Hal ini juga telah menimbulkan rasa kecemburuan dan tidak puas kaum Melayu Kelantan terhadap pemerintah Inggris yang dinilai melakukan diskriminasi. Dengan demikian muncul gambaran dan tanggapan kaum Melayu Kelantan, bahwa segala kebijaksanaan ekonomi, sosial dan politik Inggris adalah untuk kaum pendatang

²² Barbara Watson Andaya, op. cit., hal. 304.

dan negeri-negeri di bagian Pantai Barat Tanah Melayu dan tidak untuk kaum Melayu yang mendiami negeri Kelantan.

Pada tahun 1952 seluruh negeri-negeri di Tanah Melayu mengadakan Pemilu Majelis Perkotaan. Di Kelantan pemilu untuk Majelis Perkotaan dimenangkan oleh kaum Melayu. Kemenangan itu erat berkaitan dengan komposisi penduduknya yang mayoritas adalah orang Melayu dan kecenderungan mereka tidak ingin memberi peluang tersebut dirampas oleh kaum Cina yang sudah menguasai negerinegeri di bagian Pantai Barat terutama di tingkat pusat. Semua anggota Majelis Perkotaan Kelantan yang terpilih adalah dari partai Gabungan Persekutuan Pemuda Melayu Kelantan (GPPMK). 23 Mereka adalah Nik Hassan Yahya, Muhamad Abu Bakar, Abu Bakar Al-Ahmadi, Nik Muhamad Amin Nik Ali, Hamid Haji Yaakub, Nik Mat Datuk Amal, Ibrahim Isa dan lain-lain. 24 Mereka ini menjadi anggota pada

²³ GPPMK dibentuk pada tahun 1948, yang terdiri beberapa organisasi kaum Melayu Kelantan yaitu Pertbuhan Remaja Pemimpin (PERUPA), Persekutuan Pemuda Kelantan dan Suara Muda. Motto organisasi ini adalah "memperjuangkan kedaulatan sultan, kedudukan kaum Melayu, ingin mencapai kemerdekaan secepat-cepatnya". Persetiaan Melayu Kelantan (PMK) dibubarkan pada tahun 1948, namun dan anggota-anggota PMK ada yang masuk menjadi pemimpin anggota GPPMK dan tokoh yang terkenal dari PMK yaitu Muhamad Asri Haji Muda dan Ishak Lofti masuk memimpin Mohamad, Gerakan Sosial dan Alias partai PAS. Politik ..., hal. 85.

²⁴ Ibid., hal. 87.

dan negeri-negeri di bagian Pantai Barat Tanah Melayu dan tidak untuk kaum Melayu yang mendiami negeri Kelantan.

Pada tahun 1952 seluruh negeri-negeri di Tanah Melayu mengadakan Pemilu Majelis Perkotaan. Di Kelantan pemilu untuk Majelis Perkotaan dimenangkan oleh kaum Melayu. Kemenangan itu erat berkaitan dengan komposisi penduduknya yang mayoritas adalah orang Melayu dan kecenderungan mereka tidak ingin memberi peluang tersebut dirampas oleh kaum Cina yang sudah menguasai negerinegeri di bagian Pantai Barat terutama di tingkat pusat. Semua anggota Majelis Perkotaan Kelantan yang terpilih adalah dari partai Gabungan Persekutuan Pemuda Melayu Kelantan (GPPMK). 23 Mereka adalah Nik Hassan Yahya, Muhamad Abu Bakar, Abu Bakar Al-Ahmadi, Nik Muhamad Amin Nik Ali, Hamid Haji Yaakub, Nik Mat Datuk Amal, Ibrahim Isa dan lain-lain. 24 Mereka ini menjadi anggota pada

²³ GPPMK dibentuk pada tahun 1948, yang terdiri beberapa organisasi kaum Melayu Kelantan yaitu dari Pertbuhan Remaja Pemimpin (PERUPA), Persekutuan Pemuda Kelantan dan Suara Muda. Motto organisasi ini "memperjuangkan kedaulatan sultan, kedudukan kaum Melayu, ingin mencapai kemerdekaan secepat-cepatnya". Persetiaan Melayu Kelantan (PMK) dibubarkan pada tahun 1948, namun pemimpin dan anggota-anggota PMK ada yang masuk menjadi anggota GPPMK dan tokoh yang terkenal dari PMK yaitu Muhamad Asri Haji Muda dan Ishak Lofti masuk memimpin Gerakan Sosial dan Mohamad, Alias PAS. partai Politik ..., hal. 85.

²⁴ Ibid., hal. 87.

Eksekutif Negeri²⁵ yang disebut sebagai anggota resmi di samping anggota-anggota tidak resmi majelis yang dilantik oleh Sultan.

Pada bulan Juli 1954, organisasi Gabungan Persekutuan Pemuda Melayu Kelantan (GPPMK) telah melakukan satu demontrasi untuk mendesak Pemerintahan Inggris membentuk satu komisi yang bertugas merumuskan undang-undang bagi mempercepatkan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Sikap GPPMK yang tidak percaya kepada kaum Cina dan India juga tercermin melalui tuntutannya agar pembentukan panitia kemerdekaan itu harus beranggotakan kelompok luar, kelompok yang independen. Sa'ad Shukri mengungkapkan peristiwa demonstrasi itu sebagai berikut:

"Suatu perarakan raksasa pernah dianjorkan oleh Persekutuan Persetiaan Melayu Kelantan pada 10hb. Julai 1954M, yang terdiri daripada segala lapisan ra'ayat menuju ke Istana Balai Besar membawa chogan-chogan kata yang panas dan berapi-api. Perarakan ini bertujuan menyembah tuntutan supaya Kerajaan mengadakan suatu Suruhanjaya Bebas dari luar Tanah Melayu untuk mempercepatkan kemerdekaan tanah ayer". 26

Kaum Melayu tak ingin keterlibatan pemimpin Cina dan India mengambil bagian dalam perumusan fasal-fasal

²⁵ Majelis Eksekutif diketuai oleh Menteri Besar, kepala-kepala kantor negeri, dan beberapa anggota dari Majelis Legislatif Sekretaris yang resmi dan tidak resmi yang dilantik oleh Sultan.

²⁶ Sa'ad Shukri, op. cit., hal. 193.

undang-undang untuk Tanah Melayu. Keterlibatan kaum Cina dan India dinilai akan mengambil hak-hak keistimewaan dan merugi kaum Melayu. Pada dasarnya, pihak Inggris mendukung dan menyetujui tuntutan dan membentuk Komisi Reid yang mengambil anggota-anggota komisinya dari pihak luar yaitu pakar undang-undang dari negara-negara Komanwel seperti India, Pakistan, dan Australia.

Pada tanggal 18 Agustus 1954, Federal Legislative Assembly telah meluluskan satu perubahan undang-undang (Perlembagaan) untuk Persekutuan Tanah Melayu. Undang-undang tersebut merupakan janji pihak Inggris untuk mengadakan pemilu bagi seluruh Tanah Melayu secepat mungkin, selambat-lambatnya pada awal tahun 1955. Namun pada bulan Juli 1955 baru pemilu itu diadakan. Sikap Inggris yang melambatkan janjinya, telah menambahkan rasa ketidakpercayaan pemerintah Kelantan atas segala kebijak-sanaan politik tingkat pusat yang dimonopoli oleh Partai Perikatan yang terdiri kaolisi kaum Melayu, Cina dan India yang menduduki Federal Legislative Assembly atau Kabinet Tunku Abdul Rahman.

Salah satu kondisi yang menyebabkan munculnya Gerakan Pemisahan Kelantan adalah pengaruh dari suasana pemilu tahun 1955. Suasana pemilu menjadi ramai dengan banyaknya partai-partai yang ikut bersaing untuk memperoleh kursi yang layak dalam pemerintahan. Partai-partai politik tersebut menganut bermacam ideologi politik yang

secara umumnya menggambarkan suatu pertentangan kaum dalam mendapat posisi dan dukungan dari masyarakat. Alias Mohamed mengungkapkan:

"Mulai tahun 1955 Kelantan menyaksikan satu lagi corak perjuangan politik yang sangat kental dan hebat, tetapi kali ini, di samping isu kemerdekaan yang diperjuangkan oleh UMNO, orang-orang Melayu di Kelantan dikemukakan dengan ideology-ideology UMNO, PAS dan Parti Negara"²⁷

Suasana pemilu yang dimaksudkan adalah isu-isu dari kampanye yang dilakukan oleh partai-partai politik, terutama terhadap Partai Perikatan. Sungguhpun Partai Perikatan telah memenangkan Pemilu 1955 secara mayoritas dengan mendapat 51 kursi dari 52 kursi yang diperebutkan, ²⁸ namun kemenangan ini meresahkan kaum Melayu Kelantan, khususnya dari kalangan pemimpin Melayu dan Sultan. Hal ini disebabkan karena Partai Perikatan merupakan partai kaolisi Melayu, Cina dan India (UMNO, MCA, MIC). Tambahan pula tersebar berita bahwa dana kampanye yang digunakan oleh MCA adalah hasil perjudian (lotere) sehingga tidak disenangi oleh kaum Melayu Kelantan yang fanatik Islam dan anti Cina. Isu ini dikeluarkan oleh Partai Negara dalam kampanyenya. Akibatnya bersebar anggapan bahwa kerjasama antara UMNO, MIC dan MCA dalam "Partai Perikatan dinilai bertujuan menjual Tanah Melayu,

²⁷ Alias Mohamed, op. cit., hal. 81.

²⁸ Elina, op. cit., hal. 133.

hak kaum Melayu dan Agama Islam kepada kaum non-Melayu."29

Isu politik dan perkembangan politik pemerintahan di tingkat pusat setelah pemilu itu mendorong para pejabat Melayu dan Sultan Kelantan untuk merealisir benteng mempertahankan eksistensi kaum Melayu dalam politik di Kelantan. Untuk mencapai keinginan itu, pada bulan September 1955, dibentuk Undang-undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan. Undang-undang ini merupakan manifestasi dari usaha Gerakan Pemisahan Kelantan.

Pada dasarnya, pembentukan Undang-undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan tahun 1955 ini merupakan
tambahan fasal bagi Undang-undang Perlembagaan Tubuh
Kerajaan Kelantan tahun 1948. Undang-undang 1955 ini
telah membentuk dan mensahkan sebuah lembaga pemerintah
yang baru yaitu, Majelis Perajaan Negeri Kelantan
(Council of Succession of Kelantan 1955). Majelis ini
diketuai oleh Menteri Besar, dua orang kerabat sultan
dan beberapa orang anggota-anggota Majelis Eksekutif
Negeri yang dilantik oleh Sultan.

Bidang kuasa Council of Succession of Kelantan adalah menentukan perlantikan semua anggota Majelis Eksekutif dan Legislatif dan jabatan-jabatan tinggi dalam

²⁹ Mahadzir Mohd. Khir "Pilihraya Umum 1955: Asas Demokrasi", Dewan Masyarakat, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka , Juli 1989)

pemerintahan Kelantan. Di samping itu menetapkan peranan Majelis Tempatan (Majelis Perkotaan/Pembandaran) dan Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan sebagai penasehat kepada Sultan. 30 Sultan adalah ketua Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan dan Majelis Legislatif. Hal itu dinyatakan dalam naskah pembentukannya:

"Pembentukan Majlis Perajaan Negeri 1955 dengan fasalnya.

5- Majlis Perajaan Negeri Kelantan, yang digelarkan di dalam bahasa Inggeris Council of Succession of Kelantan ada-lah dengan ini di-tubohkan. 6- Tidak-lah boleh siapa² pun menaiki tahta dan Kerajaan Kelantan melainkan kenaikan-nya itu disahkan oleh Majlis Perajaan Negeri.

7- Majlis Perajaan Negeri hendak-lah mengandongi Menteri Besar yang hendak-lah menjadi Yang Dipertua, dua orang kerabat di-raja dan hendaklah mengandongi ahli² Melayu yang lain di-dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan, berserta pegawai² Melayu yang kanan dan orang² besar negeri kita yang harus dilantek oleh Raja dengan surat tauliah dan di-tandatangani-nya serta di-chap dengan Mohor Kerajaan "³¹

Melihat fasal-fasal pada Undang-undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan 1955 adalah merupakan fasal tambahan undang-undang terdahulu sehingga sering disebut sebagai

³⁰ Ahli Majelis Tempatan terdiri dari Nik Hassan Yahya, Muhamad Abu Bakar, Abu Bakar Al-Ahmadi, Nik Muhammad Amin Nik Ali, Hamid Haji Yaakkub, Nik Mat Datuk Amal, Ibrahim Isa.

³¹ Saad Shukri, op. cit., hal. 195.

Eksistensi Sultan dan posisi jabatan menteri dan jabatan tinggi pemerintahan dalam negeri itu menjadi terjamin untuk kaum Melayu dari ancaman kaum pendatang. Hal ini, disebabkan semua jabatan tinggi dalam pemerintahan di Kelantan harus mendapat persetujuan dari Sultan dan Majelis Perajaan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan majelis ini merupakan usaha menghalang perkembangan politik di tingkat pusat merebak di Kelantan. Hal ini oleh Joginder dalam kajiannya menuliskan sebagai berikut;

"Pemisah-pemisah ini menentang penerimaan menterimenteri bukan Melayu dan ingin mengembalikan keutuhan agama Islam, bahasa Melayu dan adat Melayu. Mereka juga mahu supaya perkhidmatan awam dikhaskan untuk orang Kelantan, malah tidak menerima orang Melayu yang tidak berasal dari Kelantan. 33

Pada dasarnya Gerakan Pemisahan Kelantan dalam perjuangannya lebih cenderung kepada memperjuangkan ideologi Islam, kedudukan raja dan posisi kaum Melayu. Majelis Perajaan Kelantan yang menentukan perlantikan terhadap menteri, dan pejabat-pejabat tinggi dalam pemerintahan di Kelantan adalah merupakan sebagian dari sasaran dalam gerakan tersebut. Sasaran yang ditempuh melalui pembentukan undang-undang dasar ini merupakan landasan bagi pemerintahan negeri itu. Hal ini juga

³³ Joginder, op. cit., hal. 430.

menjadi inspirasi kaum Melayu di Malaysia pada umumnya dan Kelantan khususnya. Tindakan ini merupakan reaksi menolak campur tangan pemerintah pusat dan ingin keluar dari PTM. Namun sasaran akhir dari Gerakan Pemisahan Kelantan tidak berhasil dilaksanakan, karena mendapat tantangan dari Kabinet Tengku Ab. Rahman dan pemerintah Inggris. Tambahan pula gerakan ini tidak disokong oleh sebagian besar penduduk Tanah Melayu.

Namun pada sisi lain Gerakan Pemisahan Kelantan berhasil meletakkan dasar pemerintahan yang khusus di negeri bagian itu. Eksistensi kaum Melayu Kelantan dalam struktur pemerintahan tidak dihapuskan oleh pemerintah pusat, sehingga dalam perkembangan politik di negeri ini memberi keuntungan yang besar bagi kaum Melayu Kelantan, hal yang tidak terdapat di negeri-negeri bagian lain di Tanah Melayu.

4.2 Hambatan dan Tantangan

Gerakan Pemisahan Kelantan menghadapi hambatan dan tantangan yang besar dari Partai Perikatan (Alliance Party) yang terdiri dari UMNO, MIC dan MCA. Usaha Partai Perikatan dalam memperjuangkan cita-cita politik adalah tidak ingin mengungkitkan dan memperlebarkan perasaan perbedaan dan semangat perkauman antar kaum Melayu dan Cina karena tujuan Partai dasarnya adalah menyatukan pelbagai kaum di Tanah Melayu dibawah satu ideologi bagi mencapai kemerdekaan. Oleh itu partai ini menggunakan isu kemerdekaan dan telah menganjurkan satu Konferensi Meja Bulat yang diadakan di Kuala Lumpur pada bulan Mei 1953.³⁴ Konferensi ini telah mengundang semua organisasi dan partai politik Melayu dengan tujuan mencapai kesepakatan mengutamakan isu kemerdekaan dan menjaga hubungan antar kaum dalam menjalankan kampanye pada pemilu 1955. Ide ini diusulkan supaya sejalan sikap pemerintahan Inggris yang berjanji akan memberi kemerdekaan setelah adanya persatuan dan kesatuan baik antar kaum maupun negeri-negeri bagian. Hal ini bertolak belakang usaha GPK yang tebal rasa kebencian terhadap kaum Cina dan menginginkan Kelantan berdiri sendiri.

³⁴ Mahadzir Mohd. Khir, op. cit.

Kegagalan GPK juga disebabkan masalah kondisi sosial masyarakat Kelantan yang sebagian besar adalah dari golongan petani yang tidak mengerti masalah politik. Golongan petani yang tidak menerima pendidikan yang kebanyakannya buta huruf dan sebagian besar dari mereka tidak mengerti akan adanya transfer kekuasaan atau kemerdekaan yang dijanjikan oleh pihak Inggris pada tahun 1954. Mereka menganggap tidak mungkin pihak Inggris ingin memberikan kemerdekaan. Rasa ketidakpercayaan ini muncul sehubungan dengan sikap Inggris yang membentuk Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu menunjukkan bahwa Inggris masih ingin memerintah Tanah Melayu. Kessler dalam tulisannya mengungkapkan,

"Banyak orang Kelantan menganggap Pemilu 1955 bukanlah mengandung arti adanya penyerahan(tranfer) kedaulatan negara. Revolusi (Kekuasaan) yang disampaikan kepada mereka akan memperbaiki pengabaian keinginan petani yang sudah lama, terhadap kemerosotan ekonomi, mereka menerima seruan-seruan partai yang memahami keluhan-keluhan mereka dan yang secara mendasar menentang Perikatan dan pemilu yang telah ia menangi."

State, Kelantan 1938-1969 (London: Cornell University Press, 1978), hal. 121. Teks asli dari kutipan adalah: "Too many Kelantanese, independence had in 1955 not simply cannoted a constitutional tranfer of sovereingty; the devolution of power, they were told, would redress a long-standing neglect of peasant interest. Faced instead with an economic slump, they were made receptive to the appeals of a party that recognized their grivances and fundalmentally opposed the Alliance and the independence it had won"

Dengan kondisi sosial, ideologi dan penentuan bentuk undang-undang yang diperjuangkan oleh gerakan ini tidak terlalu diperhatikan setelah kemerdekaan diperoleh. Hal itu berkaitan dengan kondisi negeri Kelantan sendiri yang mundur dan dari segi ekonomi tidak memberi keyakinan untuk berdiri sendiri. Akhirnya gerakan itu hilang dalam panggung sejarah, seperti diungkapkan oleh Joginder,

"Anehnya gerakan ini tidak mendapat sokongan ramai di sebuah negeri yang dikuasai PMIP (Pan Malayan Islamic Party atau PAS) Jadi gerakan ini memang tidak akan berjaya sejak mula lagi. Amaran Tunku Abdul Rahman tidak sekali-kali akan membiarkan sebarang usaha dari mana-mana pihak untuk membahagi-bahagikan Malaya telah menentukan nasib gerakan tersebut dan ia akhirnya lenyap."

Sebagian masyarakat Kelantan juga beranggapan bahwa, negeri Kelantan sukar untuk berdiri sendiri karena kondisi ekonomi yang tidak teguh dan mantap. Krisis ekonomi, sumber hasil bumi yang kurang, dan krisis Scandal Duff yang berakhir pada tahun 1940 yang merugikan pemerintah Kelantan dalam membayar wang tuntutan pengadilan. Masalah kestabilan ekonomi secara makro yang dihadapi yaitu keganasan komunis (masalah darurat) dan kondisi setelah perang merupakan faktor-faktor kegagalan gerakan ini. Selain itu masalah komunikasi media massa dan transpotasi merupakan hambatan kepada usaha gerakan ini dalam menyakinkan masyarakat.

³⁶ Joginder, op. cit., hal. 430.

Ketidakberhasilan GPK juga adalah diakibatkan kekalahan Partai PAS dalam Pemilu 1955 yang tidak dapat memenangkan Pemilu secara mayoritas. Kekalahan PAS memudarkan harapan bagi GPK untuk memperjuangkan gagasannya. Kekalahan ini disebabkan PAS kalah bersaing dari segi popularitas dan pengaruh berbanding dengan Partai Perikatan. Tokoh politik PAS tidak terlalu menonjol dan ditambah pula dengan masalah perpecahan kalangan pemimpin mengakibatkan dukungan masyarakat Kelantan berbelah bagi pada tahun 1955. Pada tingkat nasional dan lokal, kaum Melayu dihadapkan dengan banyak alternatif dalam memilih partai politik seperti Partai PAS, Partai Negara, dan UMNO. Oleh itu dapat dikatakan partai-partai politik yang dipertandingkan pada pemilu 1955 secara umumnya merugi posisi kaum Melayu pada tingkat lokal dan nasional. Sedangkan kaum Cina dan India hanya mempunyai satu pilihan saja yaitu MCA dan MIC.

Pada dasarnya GPK mengharapkan PAS dapat memperoleh kemenangan agar partai itu dapat memperjuangkan tujuan GPK untuk memperjuangkan pemisahan Kelantan dari PTM. Harapan itu didasarkan atas kenyataan bahwa tokoh-tokoh PAS mendukung perjuangan GPK. Sementara partai-partai lain lebih cenderung memperjuangkan persatuan Tanah Melayu. Oleh karena itu kabinet pemilu 1955 tampil menentang perjuangan GPK.

4.3 Hubungan Kelantan dengan Pemerintah Pusat

Dalam melihat pola hubungan antar pemerintah Kelantan dan pusat setelah Gerakan Pemisahan Kelantan pada tahun 1955-1956, penulis mengkaji kondisi hubungan tersebut secara global dari segi birokrasi pemerintahan. Tumpuan diberikan kepada peran partai dalam perkembangan politik di pemerintahan Kelantan dan Pusat. Perkembangan ini dikaji setelah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957.

Setelah dua tahun pemerintahan Tanah Melayu di bawah Kabinet Tunku Abdul Rahman, pemilu pertama telah diadakan pada tahun 1959. Sebanyak 104 kursi yang diperebutkan oleh 9 partai yang ikut bersaing: Partai Perikatan, Partai PAS, Partai Barisan Sosialis, Partai People's Progresif Party(PPP), Par-tai Negara, Partai Malaya, Partai Semangat Pemuda Melayu, Partai Buruh Provinci Wellesly dan Partai Bebas. Partai-partai yang memenangkan pemilu 1959 secara mayoritas adalah Partai Perikatan dengan 74 suara, diikuti oleh Partai PAS 58 suara dan Partai Barisan Sosial 38 suara dan kursi selebihnya terbagi di antara partai-partai lain. 37

Partai PAS menjadi partai yang kedua memenangkan kursi secara mayoritas dalam pemilu tersebut. Kemenangan

³⁷ Haris Md. Jadi, Etnik, Politik dan Pendidikan, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990), hal. 118.

ini peroleh sebanyak 28 dari 30 kursi yang diperebutkan di negeri Kelantan. 38 Hal ini menjadikan partai PAS secara otomatis memerintah negeri itu sedangkan Pemerintah Pusat diperintah oleh Partai Perikatan (partai koalisi UMNO, MIC dan MCA).

Dalam tradisi pembentukan birokasi pemerintahan di Tanah Melayu, partai yang menang secara mayoritas akan berhak untuk membentuk kabinetnya. Anggota-anggota kabinet dalam pemerintahan di negeri Kelantan mula bertapak dari kalangan pemimpin PAS yang dipimpin oleh Ishak Lofti sebagai Menteri Besar³⁹. Manakala di pemerintahan pusat dipimpin Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri dengan anggota kabinet dari kalangan pemimpin partai Perikatan dari komponen UMND, MCA dan MIC.

Pemilihan terhadap anggota kabinet pemerintahan PAS tidak terlepas dari peran Majelis Perajaan Negeri Kelantan yang didasarkan kepada Undang-Undang Tubuh Perlembagaan Kerajaan Kelantan. Anggota-anggota dalam kabinet pemerintahan negeri ini dipilih terdiri kaum Melayu dari kalangan pemimpin partai PAS. Hal ini berbeda dengan Pemerintahan Pusat yang dikuasai Partai Perikatan yang memegang jabatan dalam kabinet dilantik dari kalangan pemimpin partai-partai MCA, MIC dan UMNO. Dari kajian

³⁸ Alias Mohamed, op. cit., hal. 87.

³⁹ Ibid.

ini, penulis melihat bentuk penentuan birokrasi yang wujud pada tahun 1953 merupakan pemilihan terhadap pemimpin dari partai politik kaum Cina dan India diserahkan jabatan menteri dalam kabinet pemerintahan Tanah Melayu, dan hal ini ditentang keras oleh Gerakan Pemisahan Kelantan. Oleh karena itu kondisi tersebut menjadi jurang hubungan birokasi antar pemerintah Kelantan yang dikuasai oleh kaum Melayu dan Pemerintah Pusat yang multi ras.

Perbedaan ideologi politik yang berkuasa antar pemerintah negeri ini dan pemerintah pusat secara tak langsung mempengaruhi perkembangan politik, ekonomi dan sosial. Hal ini tercermin dalam kebijaksanaan sikap pemerintah pusat. Sungguhpun Kelantan diperintah oleh sebuah partai oposisi dengan pemerintahan pusat, Kelantan tidak terlepas dari kebijaksanaan pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang Perlembagaan Persekutuan. 40 Pihak Pemerintah Pusat mempunyai wewenang terhadap pemerintah negeri bagian dan harus membantu dalam melaksanakan pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial. Namun dalam kenyataannya, Pemerintah Pusat tidak memberi perhatian terhadap Kelantan yang dikuasai oleh partai oposisi. Hal ini tergambar dalam perkembangan ekonomi negeri itu sejak tahun 1959 sampai dengan tahun

⁴⁰ Perlembagaan Persekutuan, (Kuala Lumpur: Internatinal Law Services, 1983), hal. 46.

1977 yang dinyatakan sebagai zaman gelap dalam perkembangan ekonominya. Sebaliknya pemerintah pusat banyak memberi tumpuan perhatian kepada negeri-negeri bagian Pantai Barat Tanah Melayu (Negeri-negeri Bersekutu sewaktu pemerintahan Inggris) yang basis pendukung kemenangan partai Perikatan. Hal ini diungkapkan oleh Kessler sebagai berikut:

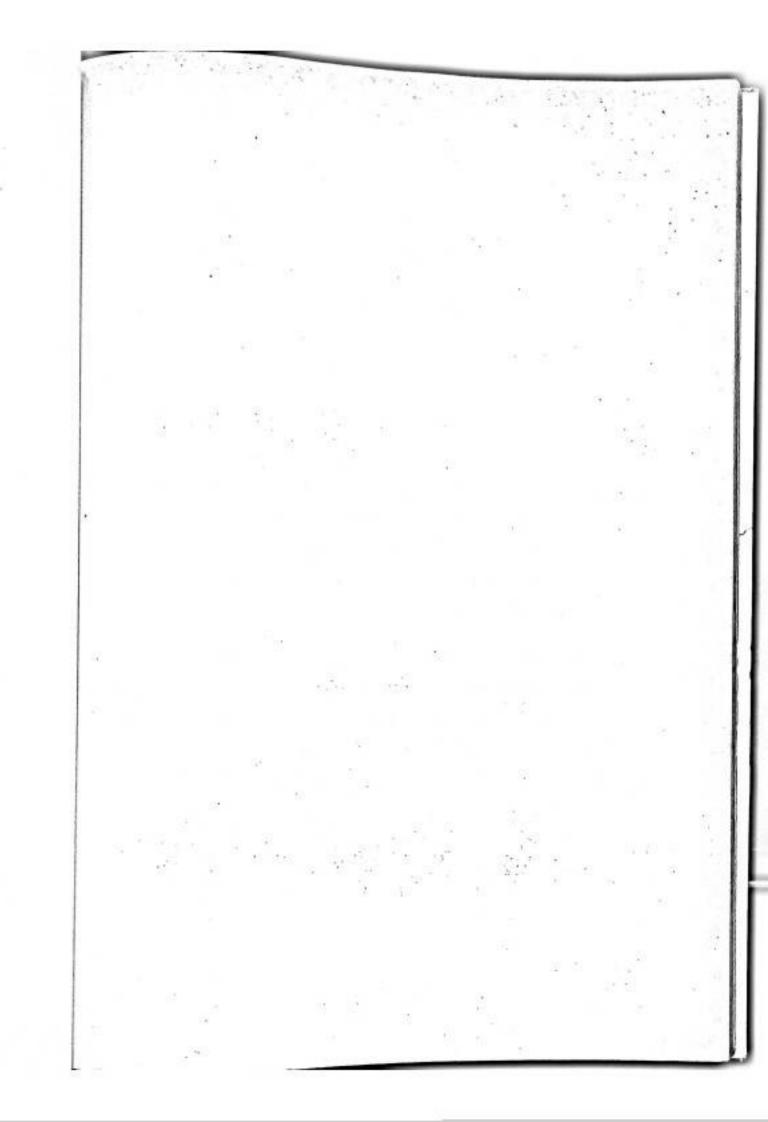
"Dengan mengetahui manfaat kebebasan yang terfokus pada daerah pesisir barat [negeri-negeri bagian Pantai Barat] yang lebih berkembang dan terutama berpenduduk non-Melayu, maka orang-orang Kelantan sangat marah dengan orang-orang Melayu [pemerintah pusat] yang menikmati kekuasaan dengan tidak meng-indahkan/memperhatikan kebutuhan dan tuntutan baru yang dihadapi oleh petani [masyarakat Kelantan]". 41

Periode pemerintahan PAS di Kelantan yang bermula pada tahun 1959 ini, dalam kondisi hubungan antara pemerintahan Kelantan dan Pusat dapat dikaji dari perbandingan kebijaksanaan yang bersifat nasional yaitu kemudahan sarana dan prasarana, yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk negeri Kelantan. Sementara pemerintah Kelantan sendiri kurang kemampuan dana dalam perlaksanaan sarana pembangunan karena untuk membangun dari segi sumber penghasilan sumber hasil bumi, teknologi dan

⁴¹ Clive S. Kessler, Islam and Politics in A Malay State, Kelantan 1838-1969,(London: Cornell University Press, 1978), hal. 120. Kutipan dari asli adalah "Seeing the benefit of independence concerntrated on the more deve- loped and primarily non-Malay west coast, the Kelantanese resented those Malays who enjoyed power in the new order heedless of the peasantry's concerns."

sebagainya. Kelantan masih bergantung kepada pemerintah pusat. Sehingga masyarakat Kelantan dalam kehidupannya tidak semakmur dengan masyarakat lain yang tinggal di bagian Pantai Barat Tanah Melayu. Dalam pada itu, Pemerintah Pusat pula tidak begitu berminat dalam memberi perhatiannya karena Kelantan adalah musuh politiknya (oposisi). Hal ini tampak berlangsung terus dalam percaturan politik antara dua partai itu dalam perkembangan selanjutnya.

Dalam Pemilu tahun 1977, Partai Perikatan dapat berhasil tampil sebagai partai yang memerintah Kelantan. Pada periode itu tampak terjalin hubungan yang baik dengan Pemerintah Pusat. Namun kondisi ini berubah lagi pada tahun 1990, ketika Partai PAS kembali memenangkan Pemilu secara mayoritas. Hal ini mengawali kembali ketidak harmonisan hubungan politik antar Pemerintah Kelantan dan pusat.



BAB V

KESIMPULAN

Tulisan ini mengkaji suatu peristiwa yang terjadi pada tahun 1955-1956 yang termasuk dalam waktu masa periode pergerakan nasionalisme di Malaysia yaitu, Gerakan Pemisahan Kelantan. Oleh itu gerakan ini merupakan bagian atau satu unit pergerakan nasionalisme di Malaysia. Sunggguhpun pada satu sisi gerakan ini dipandang sebagai suatu usaha anti-penyerahan kekuasaan pemerintahan Tanah Melayu dari tangan Inggris kepada rakyat Tanah Melayu, namun pada sisi lain gerakan tersebut merupakan satu gambaran sejarah pergerakan nasional dan dinamika perkembangan proses politik yang terjadi di Tanah Melayu.

Dari kajian ini, penulis menemukan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya gerakan tersebut. Pertama, gerakan ini adalah disebabkan gagasan Malayan Union (MU) pada tahun 1946 yang merupakan imbangan sikap Inggris terhadap kaum Melayu yang berkerjasama dengan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Inggris telah menghilangkan kedaulatan sultan, hak-hak keistimewaan kaum Melayu dan kelonggaran syarat menjadi warganegara yang mudah kepada kaum Cina dan India.

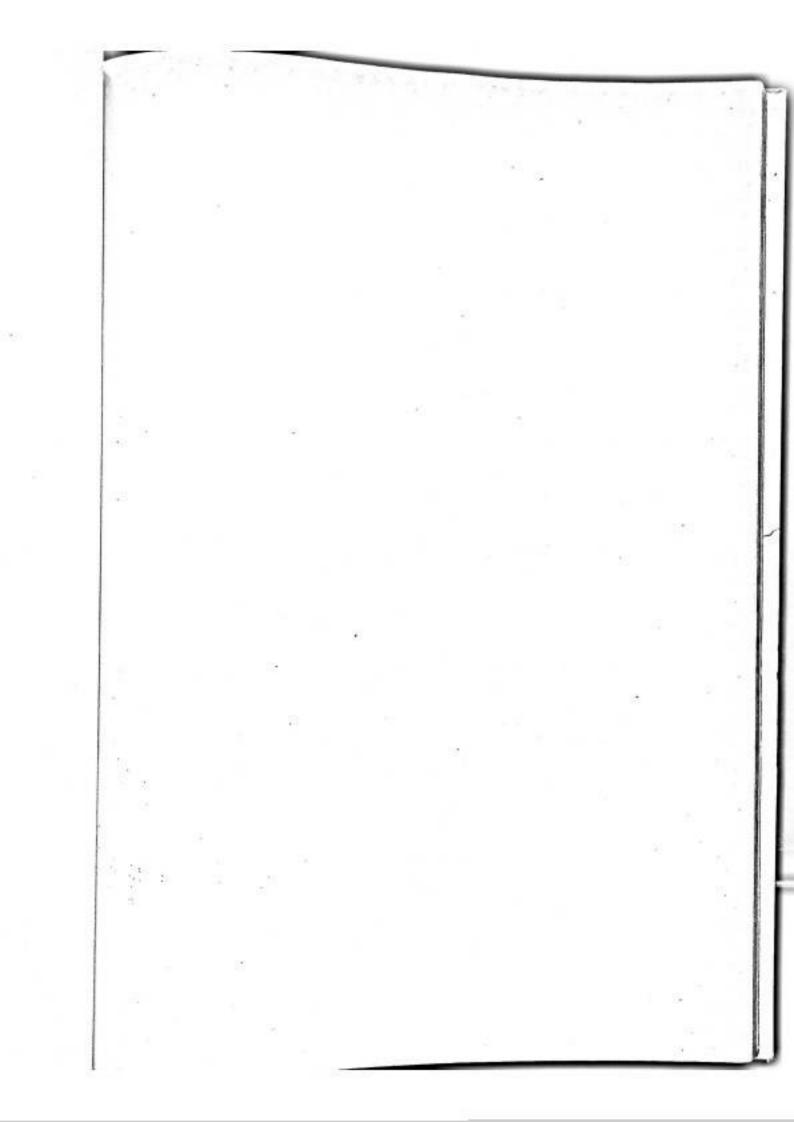
Kedua, Aksi kaum Cina yang dimotori oleh Partai Komunis Malaya (PKM atau Askar Bintang Tiga) setelah tamat Perang Dunia Kedua. PKM mengancam, membunuh pemimpin kaum Melayu yang berkerja sama dengan Jepang dan coba merampas kuasa sehingga menimbulkan semangat nasionalisme dan solidaritas kaum Melayu. Kondisi yang terancam dan tidak tenteram akibat tindakan PKM ini telah menimbulkan usaha menentang terhadap kaum Cina secara umum dengan membentuk organisasi Persekutuan Persetiaan Melayu Kelantan.

Ketiga, posisi kaum Cina dalam politik di Tanah Melayu yang diwujudkan oleh tindakan kaum Cina melalui bentuk-bentuk organisasi seperti AMPAJA, Gerakan Pemisahan Pulau Pinang dan dipilih pemimpin MCA dalam kabinet di Persekutuan Tanah Melayu (pemerintah pusat) telah menimbulkan kebimbingan kaum Melayu Kelantan terhadap posisi mereka dalam politik khususnya di Kelantan dan umumnya di Tanah Melayu. Posisi pemimpin Cina pemerintahan di pusat sebagai menteri bermula sejak tahun 1951 sampai dengan tahun 1955. Sebagai usaha membentengi pengaruh pemerintahan di tingkat merebak pusat ke Kelantan, gerakan ini muncul dengan membentuk Undang-Undang Tubuh Perlembagaan Kerajaan Kelantan sebagai undang-undang khusus pemerintahan negeri itu.

Keempat, faktor kondisi dan budaya masyarakat Kelantan yang dipengaruhi oleh pendidikan pondok dan ideologi Islam kaum Melayu yang tidak menginginkan kaum Cina dan India yang non-Islam mempengaruhi pemerintahan di Kelantan dan tambahan pula negeri itu mayoritas didiami oleh kaum Melayu. Masyarakat Kelantan yang masih kuat kepatuhan kepada agama Islam (ikatan agama) dan kesetiaan kepada sultan (ikatan tradisional) melakukan usaha yang wujud dalam bentuk gerakan pemisahan. Gerakan ini dilakukan oleh kalangan pejabat pemerintahan Melayu Kelantan yang berada dalam Majelis Legislatif Negeri yang diketuai oleh sultan dengan dukungan dari Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Kemudian diteruskan oleh partai PAS.

Kelima, sikap pemerintahan Inggris dalam kebijaksanaan politik dan ekonomi yang memberi perhatian kepada
kaum Cina dan India sebagai politik balas jasa yang
mendiami kawasan Pantai Barat Tanah Melayu telah menimbulkan rasa tidak puas kaum Melayu Kelantan. Kemudian
kebijaksanaan yang sama diteruskan oleh Partai Perikatan
yang berkuasa di pemerintahan pusat telah menimbul tanggapan kaum Melayu kebijaksanaan politik dalam pembangunan hanya untuk kaum Cina dan negeri-negeri bagian Pantai
Barat Tanah Melayu.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Gerakan Pemisahan Kelantan 1955-1956 adalah merupakan satu tahap akhir dalam pergerakan nasional di Tanah Melayu, karena munculnya gerakan itu di ambang kemerdekaan negara itu tahun 1957. Motor penggerak peristiwa ini adalah ideologi kebangsaan yang didasarkan nativisme dan keIslaman yaitu perjuangan kaum Melayu untuk mendapatkan keunggulan kedudukan politik yang ketika itu didominasi oleh kaum Cina dan ideologi Islam kaum Melayu yang secara fanatik menentang kelompok non-Islam. Sasaran dari gerakan ini adalah suatu usaha mendapatkan hak-hak politik, ekonomi dan sosial kaum peribumi Tanah Melayu.



DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Zakry, Mahathir, 'Machiavelli' Malaysia, Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise, 1990.
- Abdullah, Taufik, *Sejarah Lokal di Indomesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1985.
- Abdullah Taufik dan Abdurrachman Sarjomihardjo, *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*, Jakarta: PT. Gramedia, 1985.
- Adil, Haji Buyong, *Perjuangan Orang Melayu Menentang Penjajahan Abad 15-19*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985.
- Ahmad, Haji Dusuki bin Haji, *Ikhtisar Perkembangan Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1978.
- Alatas, Syed Hussein, Mitos Pribumi Malas, Imej Orang Jawa, Melayu, dan Filipina Dalam Kapitalisme Penjajah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989.
- Andaya, Barbara Watson dan Leonard Y. Andaya, Sejarah Malaysia, Petaling Jaya; Macmillan Publisher (M) Sdn. Bhd., 1983.
- Ankersmit, F. R., Refleksi Tentang Sejarah, Pendapatpendapat Modern Tentang Filsafat Sejarah, terj. Dick Hartoko, Jakarta: PT. Gramedia, 1987.
- Ayub, Tan Sri Dato', Cara Pemerintahan Tanah Melayu 1957-1963, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka , 1978.
- Aziz, Abdul Dra., dkk (ed), Gerakan Islam Kontemporer di Indoensia, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989.
- Balandier, Georges, Antropologi Politik, terj. Y. Budisantoso, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Budiardjo, Prof. Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia, 1986.
- Carr, E. H., *Apakah Sejarah*, ter. Ab. Rahman Haji Ismail, Kuala Lumpur: Dewan Bahsa dan Pustaka, 1984.

- Cheah Boon Kheng dan Abu Talib Ahmad, Kolonialisme Di Malaysia Dan Negara-Negara Lain, "Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1990.
- Dewan Masyarakat, (Kuala Lumpur, Julai 1991), hal. 19 oleh Amir Tan, "Jawatan Kuasa Bukan Islam di Kelantan: MCA
- oleh Dr. Shamsul Amri Baharuddin, "Politik Hak semua
- (Kuala Lumpur, Oktober 1990), hal. 6.
 - (Kuala Lumpur, Oktober 1991), hal. 8.
 - 16. (Kuala Lumpur, Oktober 1991), hal.
 - 38. (Kuala Lumpur, Desember 1991), hal.
 - 1991 Imej dan Kekuatan", hal. 8.
- 28. (Kuala Lumpur, Februari 1992), hal.
- raya Umum 1955: Asas Demokrasi", hal. 42.
- Din, Norma, SPM Sejarah Malaysia, Kuala Lumpur: Penerbitan Siri Maju Sdn. Bhd., 1987.
- Evers, Hans-Dieter dan Tilman Schiel, Kelompok-Kelompok Strategis, Studi Perbandingan Tentang Negara, Birokrasi dan Pembentukan Kelas di Dunia Ketiga, terj. Aan Effendi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990.
- Farstern Economic Review, (23 January 1992), oleh Michael Vatikiotis, "Kelantan's Islamic government faces uphill task, Against the odds" hal. 23.
- Farouk, Elina, *Meniti Kejayaan Sejarah Malaysia*, Petaling Jaya: PErsekutuan Preston Sd. Bhd., 1989.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terj. Nurgoho Notosusanti, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Gullick, J. M., Sistem Politik Bumiputera Tanah Melayu Barat, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1978.
- Hall, D.G.E., *Sejarah Asia Tenggara*, terj. Drs. I.P soewarsha, Surabaya: PT. Usaha Nasional, 1988.

- Hanum, Zakiah, Asal Usul Negeri-negeri Di Malaysia, Selangor: Times Books International, 1989.
- Horowits, Louis Irving, *Revolusi Militerisasi dan Konsol- idasi Pembangunan*, terj. Dra. Sahat Simamora, Jakarta:
 PT. Bina Aksara, 1985.
- Hugiono, Drs. dan Drs. P.K. Poerwantana, *Pengantar Ilmu*Sejarah, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Hussain, Ahmad Atory, *Kepemimpinan Masa Depan Berakhirkah Dilema Melayu?*, Kuala Lumpur: Kumpulan Karangkraf Sdn. Bhd., 1987.
- Hussein, Ahmad Atory, *Politik dan Dasar Awam Malaysia*, Kuala Lumpur: Utusan Publication & Dsitributors Sdn. Bhd. 1990.
- Ibrahim, Muhd. Yusof, *Pengertian Sejarah, Beberapa Pembaha*san *Mengenai Teori dan Kaedah,* Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986.
- Ibrahim, Muhd. Yusof dan Mahayuddin Haji Yahaya. *Sejarah dan Pensenjarahan, Ketokohan dan Karya,* Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1988.
- Institut Tadbiran Awam Negara Malaysia, Malaysia Kita, Kuala Lumpur, 1992.
- Jadi, Haris Md., Etnik, Politik dan Pendidikan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990.
- Jessy, Joginder Singh, Sejarah Asia Tenggara 1824-1965, Kedah: Penerbitan Darulaman, 1986.
- Kahin, George Mc Turnan, *Kerajaan dan Politik Asia Teng*gara, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1982.
- Kartodirdjo, Sartono, *Ungkapan-Ungkapan Filsafat Sejarah* Barat dan Timur, Penjelasan Berdasarkan Kesadaran Sejarah, Jakarta: PT. Gramedia, 1986.
- Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah
 Pergerakan Nasional dari Kolonial Sampai Nasionalisme
 Jil.2, Jakarta: PT. Gramedia, 1990.
- . Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah, Jakarta: PT. Gramedia, 1992.

- Kessler, Clive S, Islam and Politics in a Malay State, Kelantan 1838-1969, London: Cornell University Press,
- Khaldun, Ibn. *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha, Jakarta:
- Khoo Kay Kim, Malay Society, Transformation & Democratisation A Stimulating and Discerning Study on the evolution of Malay Society through the passage of time", Petaling Jaya: Pelanduk Publications (M) Sdn. Bhd., 1991.
- Kohn, Hans, *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*, Jakarta: Pustaka Sarjana, 1976.
- Kok Koun Chin. Sejarah Malaysia, Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1981.
- Machiavelli, Niccolo, Sang Penguasa, Surat Seorang Negarawan Kepada Pemimpin Republik, terj. C. Woekirsari, Jakarta: PT. Gramedia, 1987.
- Mahathir, dr., *Menghadapi Cabaran*, Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1980.
- Malhi, Ranjit Singh, Sejarah Kertas 2 STPM, Petaling Jaya: Federal Publication Sdn. Bhd., 1990.
- Meulen, W.J. van der, S.J., Ilmu Sejarah Dan Filsafat, Yogyakarta: PT. Kanisius, 1987.
- Milne, dan Diane K. Mauzy R. S., Politik Dan Kerajaan Di Malaysia, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1982.
- Mohamed, Alias, Kelantan Under PAS, The Problem of Land Development and Corruption, Kuala Lumpur: Insular Publising House Sdn. Bhd., 1983.
- _______, Gerakan Sosial Dan Politik Kelantan, Kuala Lumpur: Insular Publising House Sdn. Bhd., 1984.
- Obstacles and Challenges, Kuala Lumpur: Gateway Publishing House, 1986.
- Kelantan: Politik dan Dilema Pembangunan,
 Kuala Lumpur: Gateway Publishing House, 1989.
- Muda, Sa'ad Shukri bin Haji, *Detik-Detik Sejarah Kelantan*, Kota Bharu: Pustaka Aman Press, 1971.

- Orwell, George, *Mereka Yang Tertinda*s, terj. A. Setiawan Abadi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990.
- Osman, H. dkk (ed), *Ekonomi, Politik Malaysia*, Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1983.
- Osman, Mohd Taib dan Wan Kadir Yusof, *Kajian Budaya dan Masyarakat di Malaysia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987.
- Persatuan Sejarah Malaysia, *Malaysia: Sejarah dan Proses Pembangunan*, Kuala Lumpur: United Selangor Press Sdn. Bhd., 1982.
- "Potong Tangan Di Kelantan", Tempo, (9 Mei 1992), hal. 79.
- Qari, Abdullah Al, *Detik-Detik Sejarah Hidup Tok Kenali*, Kota Bharu: Pustaka Asa Sd. Bhd., 1988.
- Simandjuntak, B., Federalisme Tanah Melayu 1945-1963, Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1985.
- Skopol, Theda, Negara dan Revolusi Sosial: Suatu Analisis Komparatif Tentang Perancis, Rusia dan Cina, Jakarta: PT. Erlangga. 1991.
- Thambirajah, M, Malaysia Dalam Sejarah 3, Kuala Lumpur: Federal Publication Sdn. Bhd., 1986.
- Titus, Harold H. dkk, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, terj. H. M. Rasjidi, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984.



SUMBER: JABATAN PEMETAAN OXFORD UNIVERSITY, ATLAS PROGRESIF OXFORD/PHILIP (KUALA LUMPUR: FAJAR BAKTI SDN. BHD., 1979), hal. 1

LAMPIRAN II

ISI PERJANJIAN PERSEKUTUAN 1896

- Keempat buah negeri yaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang akan digabung di bawah satu pemerintahan yang berpusat di Kuala Lumpur. Persekutuan ini dikenal sebagai Negeri-negeri Melayu Bersekutu.
- Urusan luar negeri Negeri-negeri Melayu bersekutu akan dikuasai oleh Pemerintah Inggris.
- 3. Residen Jeneral akan dilantik untuk mengepalai pemerintahan persekutuan. Gabernor Negeri-negeri Selat akan dilantik menjadi Pesuruhjaya Tinggi Inggris di Negerinegeri Melayu Bersekutu. Residen Jeneral akan bekuasa dalam semua hal, kecuali dalam hal agama Islam dan adat-istiadat orang Melayu.
- Tiap-tiap undang-undang akan diluluskan oleh Majlis Musyawwarah Undangan, dan digubal oleh Penasehat Undang-undang.
- Residen akan meneruskan peranannya yang dulu tetapi jabatan-jabatan penting di tiap-tiap negeri akan diketuai oleh pegawai persekutuan yang bertanggung jawab langsung kepada Residen Jeneral.
- Tiap-tiap buah negeri akan bekerja sama terutama dalam bidang ekonomi.
- Sebuah Durbar yaitu Majelis Musyawarah Sultan-sultan dengan pegawai-pegawai Inggris akan diadakan dari waktu ke waktu tetapi ianya tidak mempunyai apa-apa kuasa.

Sumber: Elina Farouk, Meniti Kejayaan Sejarah Malaysia SPM (Petaling Jaya: 1989), hal. 28.

LAMPIRAN III

SURAT PERSEKUTUAN PERSETIAAN MELAYU KELANTAN KEPADA SULTAN KELANTAN

(Disember 1945)

"Ampun Tuanku Duli Yang Maha Mulia

Persekutuan Persetiaan Melayu sedar di-mana pergantongan segala perkiraan dan perundingan berkenaan dengan kemuliaan Tuan Tanah Melayu hari ini, dan di-mana puncha² orang² Melayu akan hidup senang-lenang dan dapat merasai lebeh kurang kemewahan daripada isi bumi Tanah Melayu sendiri. Maka puncha²-nya yang besar sakali ia-lah atau "kedaulatan" yang Tuanku memindahkan atau serahkan kapada baginda King berma'ana pada hari ini Tuanku dan bangsa Melayu telah hilang sama sa-kali kemerdekaan yang di-tuntut oleh sakalian lapisan bangsa di-muka bumi ini Sudi apa-tah Tuanku arahkan pandangan kapada bermiliun harta benda terbinasa dan kehilangan rumah-tangga dan beberapa banyak bilangan manusia sedang di-dalam kesengsaraan dan ke'adzaban hiudp itu tidak lain hanya kerana merebut kemerdekaan negeri, bangsa dan Tanah Ayer masing², tetapi orang² Melayu dengan tidak mengalir sa-titek darah dan sa-urat bulu roma gugor ka-bumi telah hilang kemerdekaan-nya dan dipandang rendah taraf kemuliaan Sultan² Melayu dengan suatu dugaan dan janji² yang kosong. Yang demikian Persekutuan Persetiaan Melayu pohon ka-bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku sa-belum membuat apa perundingan jangan mengubah apa² kah perkiraan, bahkan menguat dan menegoh kedudukan Tuanku. Had itu-lah persembahan patek bagi tatapan Tuanku. Ampun Tuanku beribu² ampun."

Patek yang di-bawah perentah,

(Hj. W. Muhammad b. Hj. Ahmad)

Yang Di-pertua Agong, Persekutuan Persetiaan Melayu Kelantan

Sumber: Sa'ad Shukri Bin Haji Muda, Detik-Detik Sejarah Kelantan (Kota Bharu: Pustaka Aman Press, 1971), hal. 176

LAMPIRAN IN

ISI PERLEMBAGAAN MALAYAN UNION 1946

- Malayan Union akan terdiri dari gabungan Negeri-negeri Malayu Bersekutu, Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu, dan Negeri-negeri Selat kecuali Singapura.
- Singapura akan menjadi sebuah tanah jajahan Inggris yang berasingan dengan gabernornya sendiri.
- Seorang Gabernor Jeneral Inggris akan berkuasa ke atas Malayan Union, Singapura dan wilayan-wilayan Borneo (Sabah dan Serawak).
- Pemerintah Malayan Union akan dipimpin oleh seorang Gabernor Inggris yang berpusat di Kuala Lumpur.
- Gubernor Malayan Union akan memerintah dengan dibantu oleh Majelis Musyawarah Undangan dan Majelis Musyawarah Kerja.
- Sultan-sultan hanya berkuasa dalam urusan agama Islam dan adat-istiadat Melayu.
- Negeri-negeri Melayu dan Selat akan mengekalkan Majlis Musyawarah Negeri masing-masing tetapi kuasanya di kurangkan. Semua pemerintah negeri terletak di bawah kuasa pemerintah pusat.
- 8. Sebuah Majelis Penasehat Sementara dengan anggotanya yang dilantik oleh gobernor akan bertugas sehingga Majlis Musyawarah Perundangan dan Majlis Musyawarah Kerja di bentuk.
- Kewarganegeraan akan di berikan kepada golongan-golongan berikut melalui dua cara:

A. Secara Otomatis atau Kuatkuasa Undang-undang

- Siapa saja yang dilahirkan di Malayan Union dan Singapura dan setelah menetap di sana sebelum perlembagaan ini diberlakukan.
- ii) Siapa saja yang berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan telah menetap di sana selama 10 tahun dari 15 tahun

sebelum 15 Pebruari 1948. Mereka di angkat sumpah kesetiaan kepada Malayan Union. kehendaki

- iii) Siapa saja yang di lahirkan di MU atau Singapura pada atau selepas pemerintah tersebut dibelakukan.
- iv) Siapa saja yang dilahirkan di luar MU atau Singapura pada atau selepas pemerintah tersebut diberlakukan, tetapi bapanya mempunyai warganegara Malayan Union.

B. Secara Permohonan

Mereka yang telah menetap di Malayan Union atau Singapura selama 5 dari 8 tahun sebelumnya dari pada permohonan itu dibuat. Mereka harus mempunyai tingakh laku yang baik,berpengetahuan dalam bahasa Inggris dan Bahasa Melayu dan mengangkat sumpah kesetiaan kepada Malayan Union serta berjanji untuk kekal menetap di Malayan Union atau di Singapura.

> Sumber: Elina Farnuk, Meniti Kejayaan Sejarah Malaysia SPM (Petaling Jaya: 1989), hal. 119-120.

LAMPIRAN V

SURAT PERSEKUTUAN PERSETIAAN MELAYU KELANTAN KEPADA MAJELIS RAJA-RAJA MELAYU

(31 April 1946)

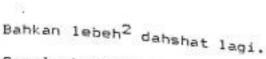
"Ampun Tuanku Duli Yang Maha Mulia

Ada-lah patek bagi Persekutuan Persetiaan Melayu Kelandengan beberapa hormat ta'dzim dan kushu' tawadzuʻ mengangkat sembah ka-bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku, iaitu manakala Persetiaan Melayu Kelantan telah mendapat khabar bahawa Duli Yang Maha Mulia Tuanku telah menyambut dan mempersilakan Duli Yang Maha Mulia sultan² berangkat kakUala Kangar, haruskeranan hendak berunding dan berkira berkenaan pertubohan "Malayan Union", maka patek bagi pehak Persekutuan Persetiaan Melayu Kelantan dengna sukachita-nya mempersembahkan ka-bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku shor atau permohonan Persekutuan Persetiaan Melayu Kelantan didalam masa'alah "Malayan Union", dan patek pohon kapada kabawah Duli Yang Maha Mulia Sultan² yang hadzir di-dalam perjumpaan itu. Patek pohon bahawa permohonan patek ini, Tuanku dan Duli Yang Maha Mulia Sultan 2 mensifatkan sabagai suatu permohonan yang terbit daripada ingatan hati ra'ayat jelata Melayu Tuanku yang ikhlas kerana hendak mengekalkan hak² Melayu dan kebesaran Tuanku. Maka shor atau permohonan patek ini sa-bagaimana di-bawah ini:

- Pohon Duli Yang Maha Mulia Sultan² jangan mengubah apa² langkah perkiraan dan perundingan hingga menguat dan menambahkan lagi bantahan dan bangkangan pertubohan "Malayan Union" itu sebab:
- a. Sa-kiranya Duli Maha Mulia Sultan² ada chenderong atau suka berunding dengan Kerajaan Inggeris yang berma'ana hendak meng'iktirafkan Malayan Union itu, maka tentu akan menimbulkan suatu tudohan yang tidak patut di-tudoh pada kali kedua pleh ra'ayat jelata terhadap Duli Yang Maha Mulia Sultan² Melayu.
- b. Duli Yang Maha Mulia Sultan² baharu sahaja dapat bersambong rapat dan bersatu padu dengan ra'ayat jelata Melayu walhal di-dalam beberapa bulan yang lalu telah memandang lemah pada Duli Yang Maha Mulia Sultan² kerana menyain menyerahkan kuasa kapada Kerajaan Baginda King, oleh itu menyerahkan kuasa kapada Kerajaan Baginda King, oleh itu menyerahkan Melayu memohon kebawah Duli Yang Maha Mulia Persetiaan Melayu memohon kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan² membuat langkah perkiraan itu dengan sa-habis² Sultan² membuat langkah perkiraan itu dengan Kaya chemat dan halus supaya sambutan ra'ayat Melayu Raya chemat dan halus supaya sambutan² itu mengandongi terhadap Duli Yang Maha Mulia Sultan² itu mengandongi

"ta'at setia" dan "kaseh mesra" sa-bagaimana hari ini.

- c. Di-perchayai Duli Yang Maha Mulia Sultan² sifatkan pertubohan Malayan Union yang ada di-Tanah Melayu hari ini ia-lah suatu tuboh atau badan yang haram di-sentoh bagi pehak bangsa Melayu tidak shak lagi bahawa Malayan Union itu sa-bagai satu najis yang wajar dijauhi apa-tah lagi hendak di-bawa ka-dalam mahligai dan istana Duli Yang Maha Mulia Sultan² Melayu.
- d. Menambah dan menguatkan lagi surat² bantahan bagai-nya daripada Duli Yan Maha Mulia Sultan² itu bukan dan saberma'ana lemah dan tidak berchekal bahkan lebeg² berma ana leman dan tidak berchekai bankan lebeg menunjokkan chekal dan kuat-dya hati dan kemahuan Duli Yang Maha Mulia Sultan kapada pandangan dan merebutkan hak²-nya serta hak² ra'ayat Melayu Raya dan negeri Melayu yang hala. Di-sini dapat-lah di-faham dengan erti yang amat dalam oleh pemerhati² bangsa yang hendak menchuba menduga kekuatan dan ketegohan Duli Yang Maha Mulia Sultan² Melayu.
- e. Terpelihara dari sebutan ra'ayat jelata Melayu yang mensifat bahawa Duli Yang Maha Mulia Sultan² itu ia-lah sa-mata² untok memelihara dan mementingkan fa'edah diri sa-orang sahaja. Maka dengan langkah membantah dan menurut kehendak ra'ayat Melayu Raya itu ialah suatu pukulan dan peringatan kapada mereka yang menyangka Duli Yang Maha Mulia Sultan2 itu senang di-permain2 dan diperbelit² dengan suatu hadiah kebesaran yang tidak menyamai dengan harga sa-ekor semut.
- f. Sa-kiranya Duli Yang Maha Mulia Sultan² tetap berpegang tegoh dengan membantah dan menurut kehendak² Melayu Raya. Maka Duli Yang Maha Mulia Sultan² tidak-lah lagi terkena saol di-hadapan Rabbul-Jalil dan akan di-lukiskan dalam tawarikh bangsa Melayu dengan sebutan yang haram dan wangi.
- Malayan Union_telah memberi erti kapada bangsa² di dunia bahawa orang² Melayu hanya bangsa penumpang sahaja sabagaimana China dan India, yang tidak lagi orang² Melayu berhak di-dalam tanah ayer-nya sendiri dan manakala dunia akan mengerti dan faham demikian maka jadi-lah Tanah Semenanjong Tanah Melayu sa-bagai sabuah Pulau Singapura yang kerajaan-nya tidak beberapa tahun telah hilang baka dan turun temurun tidak di-pandang langsong oleh bangsa² penumpang sa-hingga bangsa Melayu telah hilang di-dalam bangsa yang baharu datang dan masok. Maka akibat Malayan Union ta' kurang-lah rupa-nya akan terjadi dan terupa pada hari yang akan datang saperti-lah keadaan pulau Singapura sekarang.



- Segala bangkangan dan bantahan yang Duli Yang Maha Mulia Sultan² yang akan buat itu pohon Duli Yang Maha Mulia Sultan² menjemput jawatan kongres hadzir bersama² didalam majlis meshuarat supaya bantahan Sultan² itu Bersamaan dengan kehendak² dan maksud ra,ayat Melayu
- Pohon Duli Yang Maha Mulia Sultan² yang akan mengadakan suatu pertubohan Sultan² dengan nama Perikatan Setia Sultan² Melayu.
- 4. Pohon Perikatan Setia Sultan² Melayu menghantar kata kapada negeri² Islam yang merdeka dan mana² difikirkan patut supaya kejadian yang maseh berlaku di-dalam Tanah Melayu ini di-dalam pengetahuan kerajaan masing².
- 5. Di-pohonkan supaya Duli Yang Maha Mulia Sultan² berangkat ka-England berunding dengan Duli Yang Maha Mulia lagi Maha Besar Baginda King bersama² dengan jawatankuasa kongres U.M.N.O menuntut kembali segala kuasa yang di-rampas oleh Sir Harold Mac Michael itu.

Had ini-lah persembahan patek bagi tatapan Tuanku Duli Yang Maha Mulia dan patek pohon mudah²an persembahan patek ini sa-bagai penambahan sokongan untuk memperkuatkan lagi semangat perjuangan Tuanku Duli Yang Maha Mulia kerana menuntut ke'adilan dan kebenaran. Patek bagi pehak Persetiaan Melayu pohon limpah ampuni Tuanku Duli Maha Mulia sakira-nya persembahan patek ada terkasar bahasa. Ampun Tuanku beribu² ampun."

Patek Yang Di-bawah Perentah.

(*Haji Wan Muhammad b. Haji Ahmad*) Yang di-Pertua Agong Persekutuan Persetiaan Melayu Kelantan

Sumber : Sa'ad Shukri Haji Muda, Detik-Detik Sejarah Kelantan, (Kota Bharu: Pustaka Aman Press, 1971), hal 179-183

ISI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 1948

- Persekutuan Tanah Melayu terdiri atas 9 buah negeri Melayu (NMB + NMTB) dan Negeri-negeri Selat (Pulau Pinang dan Malaka). Singapura akan kekal sebagai tanah jajahan Inggris yang berasingan.
- Perusuruhjaya Tinggi Inggris mempunyai kuasa tertinggi dalam persekutuan. Belia dibantu oleh sebuah badan atau Majlis Kerja Persekutuan yang mempunyai anggota resmi dan tidak resmi serta sebuah Majelis Perundangan (Kehakiman) Persekutuan yang mempunyai bilangan anggota tidak resmi yang terbanyak.
- Majelis Perundangan Persekutuan mempunyai anggota tidak resmi yang dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi untuk mewakili negeri-negeri Melayu dan Negeri-negeri Selat, kepentingan ekonomi dan kaum bukan Melayu.
- 4. Pesuruhjaya Tinggi ialah Presiden Majlis Perundangan yang sangat berkuasa. Beliau juga mempunyai kuasa pembatal (veto) ke atas undang-undang oleh Majlis Perundangan. Beliau akan berbincang dengan sultansultan mengenai Imigrasi dan memelihara kepentingan kaum Melayu.
- Hal-hal yang penting seperti pertahanan, urusan luar negeri, peraturan umum, perdagangan, kehakiman, perhubungan dan keuangan akan dikendalikan oleh pemerintah persekutuan.
- Hal-hal lain sepeti agama, pendidikan, pertanian dan tanah dikuasai oleh pemerintah negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat.
- 7. Sultan-sultan diberikan semula hak-hak utama, kuasa dan bidang kuasa ke atas negeri mereka masing-masing sama seperti sebelum perang. Sultan mempunyai hak kuasa memerintah negerinya dengan bantuan Majlis Kerja Negeri dan sebuah Majlis Perundangan Negeri.
- 8. Kedua-dua majlis negeri akan dianggotai oleh anggota resmi dan tidak resmi. Undang-undang akan diluluskan oleh majlis negeri harus disahkan oleh sultan. Baginoleh majlis negeri harus disahkan undang-undang yang tidak da juga boleh meluluskan undang-undang yang tidak boleh diluluskan oleh majlis negeri.
- Persidangan raja-raja akan diadakan kapan saja apabila

dianggap perlu dan Pesuruhjaya Tinggi akan hadir paling kurang tiga kali dalam setahun.

10. Syarat-syarat kewarganegaraan.

A. Secara Otomatis

- i) Rakyat sultan di mana-mana negeri di Tanah Melayu.
- ii) Rakyat Inggeris yang dilahirkan di Pulau Pinang atau Malaka yang telah menetap di mana-mana saja di PTM selama 15 tahun.
- iii) Rakyat Inggeris yang dilahirkan di mana saja di persekutuan yang mana orang tuanya telah dilahirkan di Tanah Melayu atau telah menetap di sini selama 15 tahun.
- iv) Mereka yang dilahirkan di PTM yang mana orang tuanya telah menetap di sini sekurang-kurangnya selama 15 tahun.

B. Secara Permohonan

- Mereka yang dilahirkan di Persekutuan Tanah Melayu yang telah menetap di sini sekurang-kurangnya selama 8 tahun dari 12 tahun sebelumnya sebelum permohonan tersebut dibuat.
- ii) Mereka yang telah tinggal di Persekutuan Tanah Melayu sekurang-kurangnya 15 dari 20 tahun sebelum permohonan tersebut dibuat.

Sumber: Elina Farouk, Meniti Kejayaan Sejarah Malaysia SPM (Petaling Jaya: 1989), hal.122 - 124

LAMPIRAN VII

UNDANG-UNDANG PERLEMBAGAAN TUBOH KERAJAAN KELANTAN 1948

(Kutipan dari beberapa fasal yang berhubungan dengan kajian penulisan ini)

- *3. (1) Yang Maha Mulia Baginda King hendak-lah mempunyai kawalan yang penoh berkenaan dengan pertahanan dan Mulia Baginda King mengaku menaung Kerajaan dan Negeri Kelantan serta segala jajahan ta'alok-nya daripada serangan musoh daripada luar, dan kerana itu dan maksud lain yang sa-umpama ini, tentera Yang Maha Mulia Baginda King serta orang yang dikuasakan kerana dan bagi pehak Kerajaan Yang Maha Mulia Baginda King hendak-lah pada bila masa jua pun di-benarkan masok dengan bebas ka-dalam negeri Kelantan serta menggunakan apa jua yang mustahak supaya dapat melawan serangan musoh itu.
 - (2) Yang Maha Mulia mengaku bahawa jika tidak dengan pengetahuan dan persetujuan Kerajaan Yang Maha Mulia Baginda King, maka tidak-lah ia akan membuat apa² perjanjian atau pengakuan, atau berkira atau utus berutus di-atas perkara² siasah negeri dengan, atau menghantar utusan² kapada mana² negeri luar.
 - (4) Yang Maha Mulia mengaku menerima, dan mengadakan satu tempat kediaman yang menasabah bagi sa-orang Penasihat British kerana memberi nasihat di-atas semua perkara yang bersangkutan dengan kerajaan negeri itu, sa-lain daripada perkara² yang berthabit dengan Agam Islam dan 'adat isti'adat orang² Melayu, dan Yang Maha Mulia mengaku menerima nasihat itu; dengan sharat tidak-lah apa² di-dalam fasal ini, dengan sa-barang jalan pun akan menchachatkan hak Yang Maha Mulia pada berkira terus dengan Pesuruhjaya Tinggi, atau pun dengan Yang Maha Mulia Baginda King melalui sa-orang Setia Usaha Negara, sa-kiranya Yan Maha Mulia berkehendak membuat bagitu.
 - (5) Perbelanjaan bagi Penasihat British serta pejabatnya hendak-lah di-tetapkan oleh Pesuruhjaya Tinggi dan hendak-lah di-tanggong oleh hasil negeri Kelantan.
 - (6) Hendak-lah di-rundingkan dahulu dengan Yan Maha Mulia sa-belum di-lantek dengan sa-benar²-nya sa-

saorang pegawai yang dichadangkan di-hantar sa-bagai Penasihat British.

- (9) Yang Maha Mulia mengaku memerentah negeri Kelantan dengan menurut sharat² satu undang² Perlembagaan Tuboh Kerajaan yang bertulis yang hendak-lah berbetulan dengan sharat² perjanjian ini dan sharat² Persekutuan dan hendak-lah di-kurnia dan di-mashor-kan oleh Yang Maha Mulia dengan sa-berapa segera-nya boleh, sama ada dengan kesemua-nya, sa-kali bahagian² dari suatu masa ka-suatu masa.
- (10) Menurut pengakuan yang terkandong di-dalam fasal 9 perjanjian ini dan berbetulan dengan sharat² Perjanjian Persekutuan Yang Maha Mulia mengaku mendirikan dengan serta-merta;
 - (a) Sa-buah Majlis Meshuarat Kerajaan, yang digelar di-dalam bahasa Inggeris "State Executive Council";
 - (b) Sa-buah Majlis Majlis Meshuarat Negeri yang digelar di-dalam bahasa Inggeris "Council of State".
- (11) Melainkan jika Yang Maha Mulia memerentahkan yang lain pula hendak-lah berunding dengan-nya sa-belum di-hantar oleh atau dengan kuasa Pesuruhjaya Tinggi mana² pegawai kepada kapada mana² jawatan yang dibayar daripada istimit² negeri.
- (12) Semua orang daripada apa bangsa jua yang sama darjah-nya di-dalam jawatan Kerajaan Negeri Kelantan hendak-lah, dengan terta'alok kapada butir² dan sharat² pekerjaan mereka itu, di-pandang sama-rata.
- (13) Yang Maha Mulia berkehendak dan Yang Maha Mulia Baginda King bersetuju bahawa hendak-lah menjadi satu tanggongan khas ka-atas Kerajaan Negeri Kelantan mengadakan dan menggalakkan pelajaran dan latehan² orang² Melayu di-dalam negeri Kelantan supaya melayakkan mereka mengambil bahagian yang penoh di-dalam kemajuan iktisad, kebajikan 'am dan dalam hal Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan itu.
- (15) Kedaulatan dan kuasa² Yang Maha Mulia di-dalam Negeri Kelantan hendak-lah kedaulatan dan kuasa² yang di-punyai oleh Yang Maha Mulia Sultan Kelantan

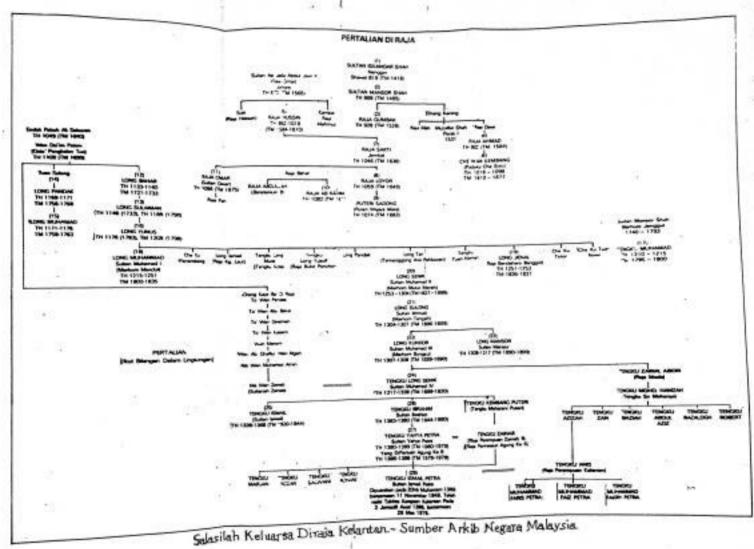
pada 1hb. Disember. 1941., dengan mengikut juga sharat² Perjanjian Persekutuan dan perjanjian ini."

UNDANG-UNDANG PERLEMBAGAAN TUBOH KERAJAAN KELANTAN 1955

(Kutipan Fasal-fasal 5, 6 dan 7 Undang-undang 1955 ini merupakan Bagian Kedua atau sambungan dari Undang-undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan 1948)

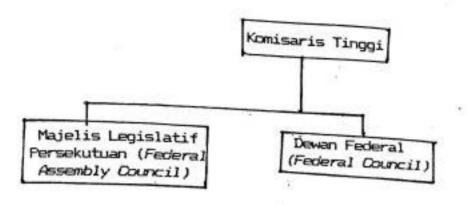
- "(5) Majlis Perajaan Negeri Kelantan, yang di-gelarkan di dalam bahasa Inggeris Council of Succession of Kelantan ada-lah dengan ini di-tubohkan.
 - (ó) Tidak-lah boleh siapa² pun menaiki takhta dan Kerajaan Kelantan melainkan kenaikan-nya itu di-sahkan oleh Majlies Perajaan Negeri.
 - (7) Majlis Perajaan Negeri hendak-lah mengandongi Mneteri Besar yang hendak-lah menjadi Yang Di-pertua, dua orang kerabat di-raja dan hendak-lah mengandongi ahli² Melayu yang lain di-dalam Majlis Meshuarat Kerajaan, berserta pegawai² Melayu yang kanan dan orang² besar negeri kita yang harus di-lantek oleh Raja dengan surat Tauliah dan di-tanda-tangani-nya serta di-chap dengan Mohor Kerajaan".

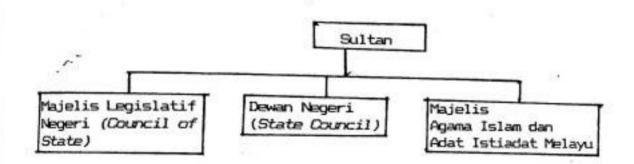
Sumber : Sa'ad Shukri Haji Muda, Detik-Detik Sejarah Kelantan, (Kota Bharu: Pustaka Aman Press, 1971), hal 194-195



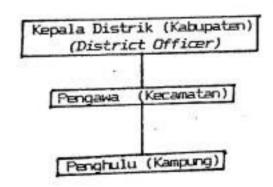
Ł

STRUKTUR ORGANISASI PERSEKUTUAN TANAH MELAYU dan KELANTAN TAHUN 1948



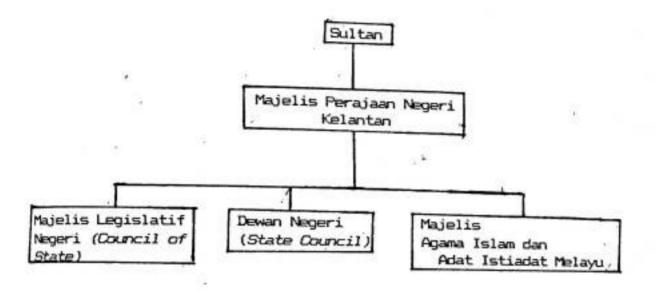


Pemerintahan Daerah Kelantan



STRUKTUR PEMERINTAHAN KELATAN SETELAH GERAKAN PEMISAHAN 1955

(Berdasarkan Undang-undang Tubuh Perlembagaan Kelantan)



STRUKTUR MAJELIS LEGISLATIF (COUNCIL OF STATE) dan DEWAN NEDERI KELANTAN EERDASAR UNDANG-UNDANG TAHUN 1949-1955

